



BANK INDONESIA

# **KAJIAN EKONOMI REGIONAL**

## **Provinsi Nusa Tenggara Barat**

Triwulan I- 2009

Kantor Bank Indonesia  
Mataram

# **KAJIAN EKONOMI REGIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Triwulan I-2009

KANTOR BANK INDONESIA MATARAM

---

Penerbit :

**BANK INDONESIA MATARAM**

Kelompok Kajian Statistik dan Survei

Jl. Pejanggik No.2 Mataram

Nusa Tenggara Barat

Telp. : 0370-623600 ext. 111

Fax : 0370-631793

E-mail : [thommy@bi.go.id](mailto:thommy@bi.go.id)

[ariadi\\_d@bi.go.id](mailto:ariadi_d@bi.go.id)

[sariani@bi.go.id](mailto:sariani@bi.go.id)



### **Visi Bank Indonesia**

Menjadi lembaga Bank Sentral yang dapat dipercaya (kredibel) secara nasional maupun internasional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan stabil.

### **Misi Bank Indonesia**

Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah melalui pemeliharaan kestabilan moneter dan pengembangan stabilitas sistem keuangan untuk pembangunan nasional jangka panjang yang berkesinambungan.

### **Nilai-nilai Strategis Organisasi Bank Indonesia**

Nilai-nilai yang menjadi dasar Bank Indonesia, manajemen dan pegawai untuk bertindak atau berperilaku yaitu kompetensi, integritas, transparansi, akuntabilitas dan kebersamaan.

### **Visi Kantor Bank Indonesia Mataram**

Menjadi Kantor Bank Indonesia yang dapat dipercaya di daerah melalui peningkatan peran dalam menjalankan tugas-tugas Bank Indonesia yang diberikan.

### **Misi Kantor Bank Indonesia Mataram**

Berperan aktif dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah melalui peningkatan pelaksanaan tugas bidang ekonomi moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank serta memberikan saran kepada pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

# KATA PENGANTAR

Ekonomi Nusa Tenggara Barat pada triwulan I-2009 diperkirakan masih mampu tumbuh positif sebesar 6,25% (yoy) di tengah bayang-bayang krisis ekonomi global. Di sisi permintaan sumber pertumbuhan ekonomi masih mengandalkan kegiatan konsumsi rumah tangga dan pemerintah. Sementara dari sisi penawaran, sektor-sektor andalan yakni sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) tumbuh stabil. Di sisi pembiayaan perbankan, penyaluran kredit untuk pembiayaan pertumbuhan ekonomi pada triwulan ini terus menunjukkan peningkatan yang mencapai 4,59% (ytd) dan diperkirakan sampai dengan akhir tahun 2009 tumbuh sebesar 24,79%.

Di samping ulasan di atas, buku ini juga mengupas perkembangan sistem pembayaran, perkembangan keuangan serta prospek ekonomi ke depan yang dapat menjadikan masukan bagi Kantor Pusat Bank Indonesia maupun *stakeholders* di daerah.

Bank Indonesia memiliki kepedulian tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional yang akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain dengan melakukan penelitian dan kajian serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi termasuk pengendalian harga barang dan jasa.

Ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasamanya kepada semua pihak terutama jajaran Pemerintah Daerah baik Provinsi, Kabupaten ataupun Kota, dinas/instansi terkait, perbankan, akademisi dan pihak lainnya yang telah membantu penyediaan data sehingga buku ini dapat dipublikasikan.

Semoga buku ini bermanfaat dan kiranya Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat bagi kita semua dalam berkarya.

Mataram, April 2009  
**BANK INDONESIA MATARAM**

Tri Dharma  
Pemimpin

**INDIKATOR EKONOMI DAN MONETER**  
**Provinsi Nusa Tenggara Barat**

INDIKATOR	2008				2009
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1
<b>MAKRO</b>					
Indeks Harga Konsumen	155.92	111.90	115.50	116.51	118.74
-Kota Mataram	155.92	111.24	114.83	115.87	117.93
-Kota Bima	-	114.38	118.00	118.91	121.78
Laju Inflasi Tahunan (yoy %)	8.38	12.46	14.74	13.29	11.89
-Kota Mataram	8.38	11.84	13.92	13.01	11.29
-Kota Bima	-	14.78	17.82	14.36	14.14
PDRB-harga konstan (miliar Rp)	3,892.80	3,987.21	4,453.22	4,374.32	4,136.22
-Pertanian	892.84	1,037.64	1,278.47	1,095.31	915.19
-Pertambangan & Penggalian	1,007.92	896.25	932.52	950.72	1,069.48
-Industri Pengolahan	187.43	206.07	216.49	226.94	204.28
-Listrik, gas dan air bersih	14.69	14.70	15.62	16.56	16.03
-Bangunan	327.58	261.78	316.58	342.92	361.09
-Perdagangan, Hotel dan Restoran	537.66	629.64	665.68	723.55	569.70
-Pengangkutan dan Komunikasi	302.02	309.31	355.45	352.78	326.11
-Keuangan, Persewaan dan Jasa	214.37	218.72	235.75	225.99	243.56
-Jasa	408.30	413.10	436.66	439.56	430.79
Pertumbuhan PDRB (yoy %)	6.30	0.35	(0.07)	2.25	6.25
Nilai Ekspor Nonmigas (USD Juta)	231.83	187.65	68.06	286.55	68.82
Volume Ekspor Nonmigas (ribu ton)	0.116	0.096	0.028	0.124	0.067
Nilai Impor Nonmigas (USD Juta)	65.07	55.42	67.89	125.16	25.47
Volume Impor Nonmigas (ribu ton)	0.028	0.022	0.019	0.013	0.009
<b>PERBANKAN</b>					
<b>Bank umum :</b>					
Total Aset (Rp triliun)	7.49	7.93	8.39	8.66	9.17
DPK (Rp triliun)	5.36	5.51	6.02	6.36	6.61
-Tabungan (%)	54.25	57.93	56.47	60.61	52.03
-Giro (%)	27.70	24.88	25.51	18.62	27.63
-Deposito (%)	18.05	17.19	18.02	20.77	20.35
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek	5.67	6.42	6.89	7.06	7.16
-Modal Kerja	2.06	2.39	2.49	2.49	2.49
-Investasi	0.51	0.50	0.50	0.48	0.46
-Konsumsi	3.09	3.53	3.90	4.09	4.21
-LDR	94.94	85.02	87.38	90.25	90.75
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi kantor cab	4.90	5.46	5.84	5.98	6.24
-Modal Kerja	1.73	1.93	1.98	1.97	2.00
-Investasi	0.37	0.36	0.38	0.36	0.31
-Konsumsi	2.80	3.17	3.49	3.64	3.94
-LDR	91.37	99.08	96.93	93.91	94.42
Kredit UMKM (Rp triliun)	4.81	5.31	5.70	5.85	6.17
Kredit Mikro (<Rp50 juta) (Rp triliun)	3.57	3.93	4.24	4.44	4.69
-Kredit Modal Kerja	0.83	0.89	0.92	0.98	1.02
-Kredit Investasi	0.20	0.18	0.16	0.16	0.11
-Kredit Konsumsi	2.54	2.87	3.15	3.30	3.56
Kredit Kecil (Rp 50 < x ≤ Rp500 juta) (Rp triliun)	0.58	0.66	0.71	0.70	0.73
-Kredit Modal Kerja	0.32	0.35	0.36	0.35	0.34
-Kredit Investasi	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
-Kredit Konsumsi	0.20	0.25	0.28	0.29	0.32
Kredit Menengah (Rp 500 juta < x < Rp5 miliar) (Rp triliun)	0.66	0.71	0.76	0.72	0.75
-Kredit Modal Kerja	0.53	0.57	0.60	0.57	0.61
-Kredit Investasi	0.08	0.09	0.11	0.10	0.10
-Kredit Konsumsi	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
Total Kredit MKM (Rp triliun)	4.81	5.31	5.70	5.85	6.17
NPL MKM gross (%)	3.34	2.94	2.79	2.36	2.55
NPL MKM nett (%)	0.36	(0.01)	(0.19)	(0.48)	(0.32)

INDIKATOR	2008				2009
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1
<b>BPR :</b>					
Total Aset (Rp triliun)	0.43	0.46	0.48	0.52	0.53
DPK (Rp triliun)	0.24	0.26	0.26	0.29	0.30
-Tabungan (%)	45.63	47.71	50.39	50.82	50.19
-Giro (%)	-	-	-	-	-
-Deposito (%)	54.37	52.29	49.61	49.18	49.81
Kredit (Rp triliun) - berdasarkan lokasi proyek	0.32	0.35	0.37	0.37	0.39
-Modal Kerja	0.18	0.20	0.21	0.21	0.23
-Investasi	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
-Konsumsi	0.13	0.13	0.14	0.14	0.15
Kredit UMKM (Rp triliun)	0.32	0.35	0.37	0.37	0.39
Rasio NPL Gross (%)	11.03	10.69	10.92	10.04	9.88
Rasio NPL Net (%)	5.76	5.51	5.68	5.49	5.30
LDR	136.99	138.43	139.52	129.85	133.04
<b>SISTEM PEMBAYARAN</b>					
Posisi Kas Gabungan (Rp triliun)					
Inflow (Rp triliun)	0.50	0.24	0.10	0.33	0.44
Outflow (Rp triliun)	0.18	0.74	0.84	0.04	0.22
Pemusnahan Uang (Jutaan lembar/keping)	18.87	12.87	7.27	10.43	9.06
Nominal Transaksi RTGS	0.99	1.21	1.26	0.77	0.96
Volume Transaksi RTGS	1.57	1.88	2.58	3.29	1.99
Rata-rata Harian Nominal Transaksi RTGS	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02
Rata-rata Harian Volume Transaksi RTGS	0.03	0.03	0.04	0.05	0.03
Nominal Kliring Kredit	677.38	656.38	747.99	819.21	727.52
Volume Kliring Kredit	24.45	23.39	25.15	23.84	22.02
Rata-rata Harian Nominal Kliring Kredit	11.29	10.42	11.87	13.65	12.13
Rata-rata Harian Volume Kliring Debit	0.41	0.37	0.40	0.40	0.37
Nominal Kliring Pengembalian	6.56	4.68	6.50	3.80	9.53
Volume Kliring Pengembalian	0.23	0.21	0.24	0.19	0.32
Rata-rata Harian Nominal Kliring Pengembalian	0.11	0.07	0.10	0.06	0.16
Rata-rata Harian Volume Kliring Pengembalian	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
Nominal Tolakan Cek/BG Kosong	3.39	3.19	5.37	2.94	8.31
Volume Tolakan Cek/BG Kosong	0.15	0.14	0.16	0.14	0.26
Rata-rata Harian Nominal Cek/BG Kosong	0.06	0.05	0.09	0.05	0.14
Rata-rata Harian Volume Cek/BG Kosong	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Indikator Ekonomi dan Moneter.....	ii
Daftar Isi .....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Tabel.....	vii
Ringkasan Eksekutif.....	viii
Bab 1 Perkembangan Ekonomi Makro Regional .....	1
1. Kondisi Umum.....	1
2. Sisi Permintaan.....	2
3. Sisi Penawaran .....	5
4. Tenaga Kerja dan Kesejahteraan .....	15
5. Keuangan Daerah .....	16
Bab 2 Perkembangan Inflasi.....	18
1. Kondisi Umum.....	19
2. Inflasi Triwulanan .....	20
3. Inflasi Tahunan.....	20
Bab 3 Perkembangan Perbankan Daerah .....	22
1. Intermediasi Perbankan.....	22
2. Perkembangan Aset Bank Umum.....	23
3. Penghimpunan Dana Masyarakat .....	24
4. Penyaluran Kredit.....	25
5. Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum.....	30
6. Perkembangan Bank Syariah.....	31
7. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat.....	33
Bab 4 Perkembangan Sistem Pembayaran.....	35
1. Transaksi Pembayaran Tunai .....	35
2. Transaksi Pembayaran Non Tunai.....	37
3. Aktivitas penukaran uang pecahan kecil.....	40
Bab 5 Prospek Ekonomi dan Harga.....	41
1. Prospek Ekonomi Nusa Tenggara Barat .....	41
2. Perkiraan Inflasi Nusa Tenggara Barat.....	42
3. Prospek Perbankan Nusa Tenggara Barat.....	42
Boks 1 Rencana Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Arbitrase .....	17a
Boks 2 Perkembangan Daya Beli Petani dari Indikator NTP.....	17d
Boks 3 Determinan Inflasi NTB Pasca Perhitungan Inflasi Kota Bima.....	21a
Boks 4 Cabe Rawit sebagai Komoditas Penyumbang Inflasi Kota Mataram.....	21e
Boks 5 Perkembangan PHBK di Nusa Tenggara Barat.....	34a



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Konsumsi Listrik Rumah Tangga di NTB .....	3
Grafik 1.2 Perkembangan Kredit Konsumsi di NTB.....	3
Grafik 1.3 Perkembangan PMTB di NTB.....	4
Grafik 1.4 Perkembangan Volume Penjualan Semen di NTB.....	4
Grafik 1.5 Perkembangan Kredit Investasi di NTB .....	4
Grafik 1.6 Perkembangan Impor Barang Modal NTB.....	4
Grafik 1.7 Perkembangan Nilai Impor NTB .....	5
Grafik 1.8 Perkembangan Nilai Ekspor NTB.....	5
Grafik 1.9 Perbandingan Struktur Ekonomi NTB Tw.I-08 dan Tw.I-09 .....	5
Grafik 1.10 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di NTB.....	6
Grafik 1.11 Perkembangan Pertumbuhan Sektor Utama di NTB.....	6
Grafik 1.12 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Padi.....	8
Grafik 1.13 Perkembangan Luas Tanam dan Panen Jagung.....	8
Grafik 1.14 Perkembangan Kredit Sektor Pertanian di NTB .....	9
Grafik 1.15 Perkembangan Harga Tembaga di Pasar Dunia.....	9
Grafik 1.16 Perkembangan Produksi Tembaga PT Newmont Nusa Tenggara .....	10
Grafik 1.17 Perkembangan Kredit Sektor Pertambangan di NTB.....	10
Grafik 1.18 Perkembangan Tingkat Hunian Kamar Hotel di NTB .....	11
Grafik 1.19 Perkembangan Kredit Sektor PHR di NTB.....	11
Grafik 1.20 Perkembangan Penjualan Semen di NTB .....	12
Grafik 1.21 Perkembangan Kredit Sektor Konstruksi di NTB.....	12
Grafik 1.22 Perkembangan Indikator Perbankan NTB.....	12
Grafik 1.23 Perkembangan Penumpang Internasional di Selaparang.....	13
Grafik 1.24 Perkembangan Penumpang Domestik di Selaparang.....	13
Grafik 1.25 Perkembangan Kredit Sektor Transportasi dan Komunikasi di NTB.....	13
Grafik 1.26 Perkembangan Konsumsi Listrik Industri di NTB.....	14
Grafik 1.27 Perkembangan Kredit Industri Pengolahan di NTB .....	14
Grafik 1.28 Perkembangan Konsumsi Listrik per Jenis Penggunaan di NTB .....	14
Grafik 1.29 Perkembangan Kredit Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih di NTB .....	14
Grafik 1.30 Perkembangan Remitansi NTB.....	15
Grafik 1.31 Perkembangan NTP di NTB.....	15
Grafik 1.32 Saldo Keuangan Pemerintah Daerah NTB di Perbankan.....	17
Grafik 2.1 Perkembangan Inflasi Tahunan NTB .....	18
Grafik 2.2 Perkembangan Inflasi Triwulanan NTB.....	18
Grafik 2.3 Inflasi Triwulanan NTB.....	20
Grafik 2.4 Sumbangan Inflasi Triwulanan NTB .....	20
Grafik 2.5 Perkembangan Harga Cabe Rawit di NTB.....	20
Grafik 2.6 Perkembangan Harga Emas dan Minyak Mentah di Pasar Dunia .....	20

Grafik 2.7 Inflasi Tahunan NTB.....	21
Grafik 2.8 Sumbangan Inflasi Tahunan NTB.....	21
Grafik 2.9 Perkembangan Harga Beras di NTB.....	21
Grafik 2.10 Perkembangan Harga Pangan di Pasar Dunia.....	21
Grafik 3.1 Perkembangan Aset Bank Umum.....	23
Grafik 3.2 Perkembangan Aset Bank Umum berdasarkan kegiatan usaha.....	23
Grafik 3.3 Pertumbuhan DPK Bank Umum di NTB.....	24
Grafik 3.4 Perkembangan DPK Bank Umum di NTB.....	24
Grafik 3.5 Pangsa DPK Bank Umum triwulan I-2009.....	24
Grafik 3.6 Pertumbuhan Kredit (yoy) .....	25
Grafik 3.7 Prioritas Penyaluran Kredit.....	27
Grafik 3.7 Pertumbuhan Kredit Sektor Unggulan NTB .....	24
Grafik 3.8 Perkembangan Cash Ratio Bank Umum.....	29
Grafik 3.9 Pangsa Kredit UMKM terhadap Total Kredit .....	30
Grafik 3.10 Pertumbuhan Kredit UMKM dan.....	30
Grafik 3.11 Perkembangan Rasio NPL Kredit UMKM.....	30
Grafik 3.12 Perkembangan Indikator Perbankan Syariah.....	32
Grafik 3.13 Pangsa perbankan Syariah terhadap perbankan NTB Tw. I-2009.....	32
Grafik 3.14 Perkembangan Rasio FDR dan NPF.....	32
Grafik 3.15 Perkembangan Indikator BPR.....	33
Grafik 3.16 Pertumbuhan Kredit menurut Jenis Penggunaan.....	34
Grafik 3.17 Pangsa penyaluran kredit BPR Tw. I-2009 .....	34
Grafik 3.18 NPL dan LDR BPR di NTB .....	34
Grafik 4.1 Perkembangan Inflow, Outflow dan Netflow.....	35
Grafik 4.2 Perkembangan Pertukaran Uang Pecahan Kecil.....	36
Grafik 4.3 Komposisi Penukaran Uang Kertas .....	36
Grafik 4.4 Uang Palsu yang Ditemukan Perbankan di NTB .....	37
Grafik 4.5 Perkembangan Nilai Transaksi Non Tunai di NTB .....	38
Grafik 4.6 Perkembangan Transaksi Kliring di NTB .....	38
Grafik 4.7 Perkembangan Tolakan Cek/BG melalui Kliring di NTB.....	39
Grafik 4.8 Perkembangan transaksi RTGS .....	40
Grafik 4.9 Rasio PTTB terhadap Cash Inflow di NTB.....	40
Grafik 5.1 Perkiraan Realisasi Usaha.....	41
Grafik 5.2 Ekspektasi Ekonomi Konsumen.....	41
Grafik 5.3 Ekspektasi Harga Konsumen.....	42
Grafik 5.4 Utilisasi Kapasitas Produksi .....	42

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pertumbuhan dan Sumbangan Sisi Permintaan NTB.....	2
Tabel 1.2 Pertumbuhan dan Sumbangan Sisi Penawaran NTB.....	6
Tabel 1.3 Perkembangan Produksi Padi di NTB.....	7
Tabel 1.7 APBD Gabungan NTB Tahun 2009.....	17
Tabel 3.1 Perkembangan Indikator Perbankan di NTB.....	22
Tabel 3.2 Pertumbuhan Kredit Bank Umum di NTB.....	26
Tabel 3.3 Perkembangan Kredit Bank Umum di NTB.....	26
Tabel 3.4 Perkembangan kualitas kredit Bank Umum di NTB.....	28
Tabel 3.5 Perkembangan Kredit UMKM Bank Umum di NTB.....	26

# RINGKASAN EKSEKUTIF

## 1. Perkembangan Ekonomi dan Perbankan

### Asesmen Ekonomi

Sampai dengan Maret 2009, ekonomi Nusa Tenggara Barat diprediksi mampu tumbuh mencapai 6,25% (yoy), namun sedikit melambat bila dibandingkan kinerja di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,30%. Dari sisi permintaan, kegiatan konsumsi mampu tumbuh positif mendominasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan aktivitas konsumsi, utamanya konsumsi rumah tangga, pada periode Januari-Maret 2009 turut dipengaruhi rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada awal triwulan II-2009. Perilaku *forward looking* konsumen PNS dikonfirmasi peningkatan pangsa kredit konsumsi pada triwulan I-2009. Kegiatan investasi diproyeksikan tetap tumbuh stabil mengandalkan investasi pemerintah. Percepatan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) beserta infrastruktur pendukungnya menjadi salah satu mesin pertumbuhan investasi di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ekspor impor yang sempat mengalami kontraksi pada semester II-2008, diperkirakan mampu bangkit mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan ini. Kinerja positif tersebut didorong oleh pulihnya kegiatan produksi konsentrat tembaga di Nusa Tenggara Barat.

Kinerja positif juga tercermin dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi andalan Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian, utamanya sub sektor tanaman bahan makanan, mencatatkan pertumbuhan positif sejalan dengan tibanya musim panen padi di akhir triwulan I-2009. Keberhasilan panen raya padi pada periode Maret-April 2009 selanjutnya akan mendorong pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang didominasi sub sektor perdagangan besar komoditas pertanian. Sementara optimisme pertumbuhan di sektor pertambangan didukung oleh hasil liaison KBI Mataram yang mengindikasikan tren peningkatan kegiatan produksi konsentrat tembaga.

Kualitas pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tren penurunan nilai tukar petani (NTP) hingga awal tahun 2009 menjadi salah satu indikator belum meratanya perbaikan kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Barat. Di lain sisi, penyaluran tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat ke luar negeri masih menunjukkan tren positif di tengah tekanan krisis ekonomi global.

Realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat masih di bawah target. Perkembangan penyerapan anggaran belanja daerah hingga Maret 2009 baru mencapai separuh dari jumlah yang ditargetkan. Masih relatif

rendahnya realisasi anggaran tersebut tidak lepas dari fokus pelaksanaan APBD pada triwulan pertama yang lebih condong pada persiapan instrumen administrasi belanja daerah. Diperkirakan penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah akan meningkat pada periode berikutnya sejalan dengan realisasi berbagai program pemerintah daerah.

### Asesmen Inflasi

**Sampai dengan Maret 2009, inflasi Nusa Tenggara Barat tercatat 11,89% (yoy) lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2008 sebesar 13,29% (yoy).** Penurunan laju inflasi dibandingkan akhir tahun sebelumnya antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Desember 2008, terjaganya pasokan bahan makanan, serta tidak adanya gejolak permintaan konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan I-2009.

**Secara triwulanan, laju inflasi pada triwulan ini mencapai 1,91% (qtq) lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 0,87% (qtq).** Setelah mengalami perlambatan pada bulan Januari dan Februari, dengan inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,61% dan 0,45%, laju inflasi pada triwulan ini menunjukkan percepatan di bulan Maret dengan inflasi bulanan mencapai 0,86%. Meningkatnya tekanan inflasi di bulan Maret diperkirakan bersifat musiman seiring menipisnya persediaan beberapa jenis bahan makanan seperti beras maupun berkurangnya pasokan komoditas bumbu-bumbuan yakni cabe rawit yang banyak dikonsumsi rumah tangga di Nusa Tenggara Barat.

**Berdasarkan kota pembentuk inflasi di Nusa Tenggara Barat, inflasi tertinggi dialami Kota Bima sebesar 14,14% (yoy) sementara Kota Mataram hanya sebesar 11,18% (yoy).** Tingginya inflasi di Kota Bima pada triwulan ini sangat dipengaruhi faktor musiman, yakni berkurangnya pasokan beras seiring belum adanya kegiatan panen padi. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan beras di Kota Bima, para pedagang besar mengandalkan pasokan dari Pulau Lombok. Akibatnya, rata-rata harga beras di Kota Bima, dengan menambahkan komponen biaya transportasi, menjadi lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram. Namun demikian, tekanan inflasi dari harga beras tersebut akan menurun pada periode mendatang seiring tibanya musim panen padi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masing-masing diperkirakan pada bulan April dan bulan Mei.

### Asesmen Intermediasi Perbankan

**Pertumbuhan kinerja perbankan NTB sampai dengan triwulan I 2009 terus menunjukkan peningkatan, tercermin dari kenaikan aset perbankan menjadi sebesar Rp9,70 triliun atau sebesar 22,54% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,15%.** Peningkatan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya penyaluran kredit perbankan NTB yang hingga triwulan I-2009 mencapai Rp6,64 triliun atau secara tahunan (yoy) meningkat

sebesar 27,13% atau Rp1,42 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 23,90%.

**Peningkatan penyaluran kredit tersebut diiringi pula dengan membaiknya kualitas kredit yang tercermin dari penurunan angka NPL dari sebesar 3,82% pada triwulan I-2008 menjadi 2,99% pada triwulan laporan.** Namun demikian, bila dibandingkan dengan triwulan IV-2008 yang tercatat sebesar 2,81%, NPL pada triwulan laporan mengalami sedikit peningkatan. Kenaikan penyaluran dana perbankan diikuti pula dengan kenaikan penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp1.31 triliun atau 23,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2008 yang mencapai 18,16%. Namun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit mendorong meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan dari 93,29% pada triwulan I-2008 dan 95,45% pada triwulan IV-2008 menjadi 96,08% pada triwulan laporan.

## 2. Prospek Ekonomi Triwulan II-2009

### Prospek Ekonomi

**Ekonomi Nusa Tenggara Barat diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4-5% di triwulan II-2009.** Prediksi tersebut mengindikasikan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (0,35%). Peningkatan kegiatan konsumsi dan ekspor Nusa Tenggara Barat menjadi pendorong pertumbuhan pada triwulan II-2009. Realisasi kenaikan gaji PNS serta penyaluran BLT tahap final di wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi faktor penunjang tingginya kegiatan konsumsi rumah tangga pada triwulan mendatang. Sementara peningkatan kegiatan konsumsi pemerintah didukung oleh realisasi belanja modal yang diperkirakan lebih baik dibandingkan triwulan pertama tahun 2009. Sementara pulihnya kegiatan ekspor Nusa Tenggara Barat yang didominasi komoditas konsentrat tembaga turut dipengaruhi kecenderungan membaiknya harga komoditas di pasar dunia.

### Prospek Inflasi

**Menurunnya tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan mampu menekan laju inflasi agregat Nusa Tenggara Barat pada kisaran 8-9% di triwulan II-2009.** Pada triwulan mendatang, laju inflasi di Kota Bima diprediksi masih di atas laju inflasi di Kota Mataram. Tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan yang mendominasi inflasi kedua kota tersebut pada triwulan pertama tahun 2009 diperkirakan akan menurun seiring dimulainya kegiatan panen raya padi di bulan April 2009 untuk wilayah Pulau Lombok dan bulan Mei 2009 untuk wilayah Pulau Sumbawa. Sementara itu, kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah sepanjang triwulan II-2009 membuka peluang penurunan tekanan *imported inflation* dari kelompok inflasi inti utamanya komoditas emas perhiasan yang cenderung *inflatoire* pada triwulan berjalan.

**Prospek Perbankan**

**Pertumbuhan penyaluran kredit sepanjang tahun 2009 diperkirakan masih cukup tinggi mampu mencapai 24,79% walaupun masih di bawah kinerja tahun sebelumnya sebesar 25,67%.** Di tengah pengaruh tekanan eksternal dari krisis ekonomi global, perbankan di Nusa Tenggara Barat masih mampu menjalankan fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2009. Penyaluran kredit untuk kegiatan produktif, seperti periode-periode sebelumnya, utamanya akan ditujukan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan penyaluran kredit untuk kegiatan konsumtif, yang relatif berisiko rendah, diperkirakan masih memiliki pangsa di atas separuh total kredit perbankan.

# BAB 1

## MAKRO EKONOMI REGIONAL NUSA TENGGARA BARAT

### 1.1 KONDISI UMUM

Sampai dengan Maret 2009, ekonomi Nusa Tenggara Barat diprediksi mampu tumbuh mencapai 6,25% (yoy), namun sedikit melambat bila dibandingkan kinerja di tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 6,30%. Dari sisi permintaan, kegiatan konsumsi mampu tumbuh positif mendominasi pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat. Peningkatan aktivitas konsumsi, utamanya konsumsi rumah tangga, pada periode Januari-Maret 2009 turut dipengaruhi rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada awal triwulan II-2009. Perilaku *forward looking* konsumen PNS dikonfirmasi peningkatan pangsa kredit konsumsi pada triwulan I-2009. Kegiatan investasi diproyeksikan tetap tumbuh stabil mengandalkan investasi pemerintah. Percepatan pembangunan Bandara Internasional Lombok (BIL) beserta infrastruktur pendukungnya menjadi salah satu mesin pertumbuhan investasi di Nusa Tenggara Barat. Kegiatan ekspor impor yang sempat mengalami kontraksi pada semester II-2008, diperkirakan mampu bangkit mencatatkan pertumbuhan positif di triwulan ini. Kinerja positif tersebut didorong oleh pulihnya kegiatan produksi konsentrat tembaga di Nusa Tenggara Barat.

Kinerja positif juga tercermin dari pertumbuhan sektor-sektor ekonomi andalan Nusa Tenggara Barat. Sektor pertanian, utamanya sub sektor tanaman bahan makanan, mencatatkan pertumbuhan positif sejalan dengan tibanya musim panen padi di akhir triwulan I-2009. Keberhasilan panen raya padi pada periode Maret-April 2009 selanjutnya akan mendorong pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR) yang didominasi sub sektor perdagangan besar komoditas pertanian. Sementara optimisme pertumbuhan di sektor pertambangan didukung oleh hasil liaison KBI Mataram yang mengindikasikan tren peningkatan kegiatan produksi konsentrat tembaga.

Kualitas pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Tren penurunan nilai tukar petani (NTP) hingga awal tahun 2009 menjadi salah satu indikator belum meratanya perbaikan kesejahteraan penduduk Nusa Tenggara Barat. Di lain sisi, penyaluran tenaga kerja asal Nusa Tenggara Barat ke luar negeri masih menunjukkan tren positif di tengah tekanan krisis ekonomi global.

Realisasi anggaran belanja pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat masih di bawah target. Perkembangan penyerapan anggaran belanja daerah



hingga Maret 2009 baru mencapai separuh dari jumlah yang ditargetkan. Masih relatif rendahnya realisasi anggaran tersebut tidak lepas dari fokus pelaksanaan APBD pada triwulan pertama yang lebih condong pada persiapan instrumen administrasi belanja daerah. Diperkirakan penyerapan anggaran belanja pemerintah daerah akan meningkat pada periode berikutnya sejalan dengan realiasi berbagai program pemerintah daerah.

Tabel 1.1  
Pertumbuhan dan Sumbangan Pertumbuhan Sisi Permintaan NTB

**Pertumbuhan Sisi Permintaan Nusa Tenggara Barat**

Uraian	2007	2008				2009	
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I*)
Konsumsi Rumah Tangga	8.97	4.85	5.45	8.34	7.56	6.57	4.08
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	6.55	7.94	8.03	8.75	8.56	8.33	6.99
Konsumsi Pemerintah	7.06	5.58	4.45	5.48	4.28	4.94	6.97
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7.53	15.45	16.98	7.35	4.58	10.40	6.73
Perubahan Stok	(7.56)	(16.75)	(35.68)	(18.95)	47.88	(18.91)	60.49
Ekspor	0.22	4.34	(10.25)	(13.30)	(14.65)	(9.18)	3.83
Impor	6.45	6.45	7.48	3.79	(2.13)	3.72	5.68
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5.24</b>	<b>6.30</b>	<b>0.35</b>	<b>(0.07)</b>	<b>2.25</b>	<b>2.07</b>	<b>6.25</b>

**Sumbangan Pertumbuhan Sisi Permintaan Nusa Tenggara Barat**

Uraian	2007	2008				2009	
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I*)
Konsumsi Rumah Tangga	4.25	2.62	2.73	3.78	3.64	3.23	2.17
Konsumsi Lembaga Swasta Nirlaba	0.07	0.09	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08
Konsumsi Pemerintah	0.95	0.83	0.62	0.70	0.59	0.68	1.03
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1.90	3.80	3.98	1.89	1.32	2.68	1.80
Perubahan Stok	(0.45)	(0.57)	(2.39)	(1.69)	0.71	(0.98)	1.61
Ekspor	0.07	1.23	(2.91)	(3.94)	(4.62)	(2.71)	1.07
Impor	(1.56)	(1.69)	(1.76)	(0.89)	0.53	(0.91)	(1.49)
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5.24</b>	<b>6.30</b>	<b>0.35</b>	<b>(0.07)</b>	<b>2.25</b>	<b>2.07</b>	<b>6.25</b>

\*) Proyeksi KBI Mataram

Sumber: BPS, diolah

## 1.2 SISI PERMINTAAN

Pada triwulan I-2009, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat dari sisi permintaan utamanya bersumber dari komponen konsumsi dan ekspor impor. Sementara kegiatan investasi masih tetap tumbuh melambat hanya mengandalkan realisasi investasi pemerintah untuk pembangunan infrastruktur publik di tengah minimnya realisasi investasi swasta.

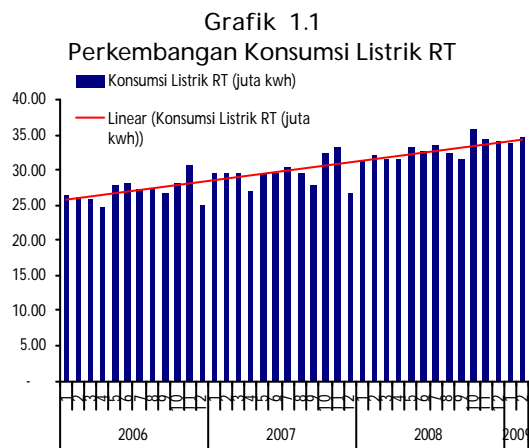
### a. Konsumsi

Kegiatan konsumsi rumah tangga pada periode Januari- Maret 2009 masih menunjukkan kecenderungan peningkatan mencapai 2,17% (yoy) walaupun relatif melambat dibandingkan periode yang sama tahun yang lalu. Stimulan pendorong kegiatan konsumsi rumah tangga pada triwulan ini salah satunya bersumber dari

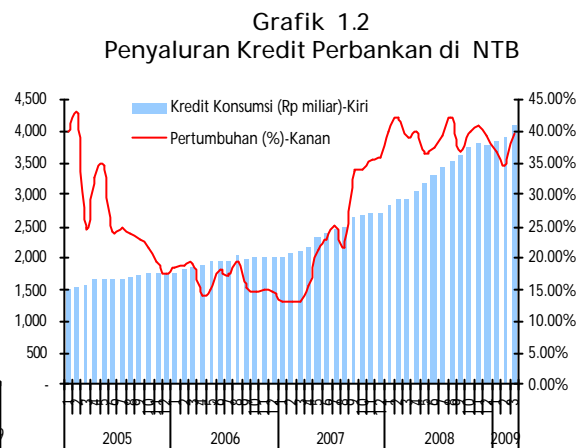
rencana kenaikan gaji PNS di bulan April 2009. Mengkonfirmasi hal itu, hasil survei konsumen yang dilakukan sepanjang triwulan ini juga mengindikasikan tren peningkatan keyakinan konsumen.

Peningkatan konsumsi rumah tangga terjadi merata untuk komoditas bahan makanan dan non bahan makanan. Hal tersebut tercermin dari indikator konsumsi listrik rumah tangga yang menunjukkan tren kenaikan di triwulan ini. Indeks Ketepatan Waktu Pembelian *Durable Goods* pada triwulan I-2009 juga tercatat meningkat, mengkonfirmasi tren kenaikan konsumsi rumah tangga.

Sumber pembiayaan konsumsi rumah tangga diperkirakan bersumber dari simpanan pribadi dan kredit perbankan. Hal tersebut tercermin dari kenaikan kredit konsumsi perbankan dengan pangsa mencapai 61,5% hingga Maret 2009 (Maret 2008 sebesar 56,01%). Sementara itu, tren penurunan dana pihak ketiga (DPK) milik perseorangan pada periode yang sama juga mengindikasikan penggunaan DPK untuk kegiatan konsumsi rumah tangga.



Sumber: PLN



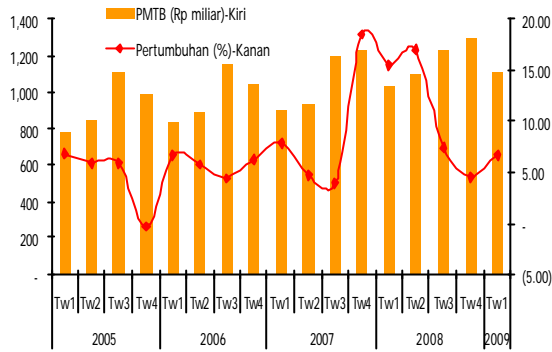
Sumber: BI

## b. Investasi

Masih minimnya realisasi investasi swasta hingga triwulan I-2009 turut mempengaruhi perlambatan aktivitas investasi di Nusa Tenggara Barat. Komponen investasi pada triwulan ini tercatat tumbuh 6,73% (yoy) lebih lambat dibandingkan pertumbuhan di triwulan yang sama tahun lalu sebesar 15,45% (yoy). Kegiatan pembangunan infrastruktur publik oleh pemerintah daerah terkait proyek pembangunan BIL dan infrastruktur terkait menjadi sumber pertumbuhan utama kegiatan investasi pada periode Januari-Maret 2009.

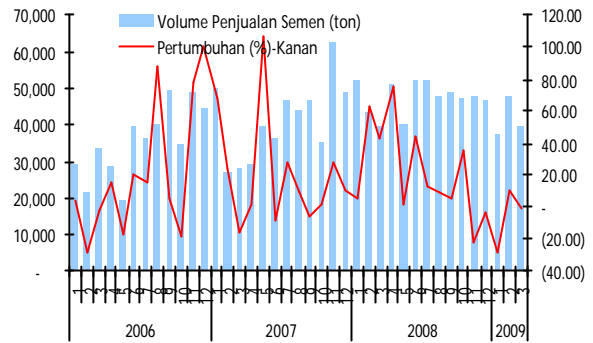
Dari sisi pembiayaan perbankan, kredit investasi tercatat terus mengalami penurunan hingga akhir triwulan I-2009 (-13% ytd) sejalan dengan minimnya realisasi investasi swasta. Investasi pemerintah yang terus tumbuh pada triwulan ini masih mengandalkan kekuatan anggaran belanja modal pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Grafik 1.3  
Perkembangan PMTB NTB



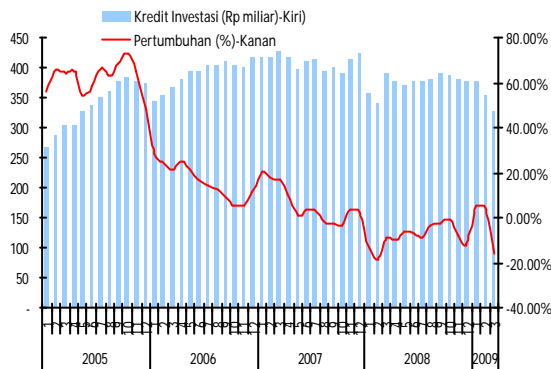
Sumber: BPS

Grafik 1.4  
Volume Penjualan Semen



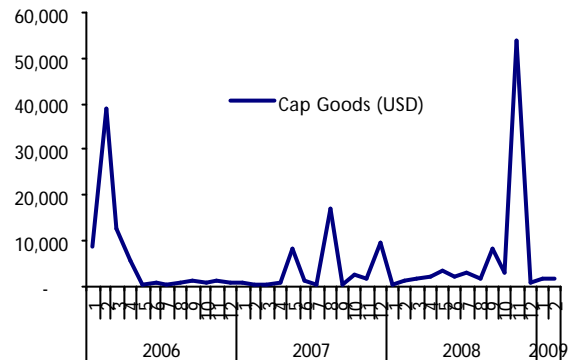
Sumber: ASI, diolah

Grafik 1.5  
Penyaluran Kredit Investasi



Sumber: BI

Grafik 1.6  
Perkembangan Impor NTB



Sumber: BI

### c. Ekspor Impor

Kegiatan ekspor impor diproyeksikan mampu tumbuh positif pada triwulan I-2009 sebesar 3,83% (yoy) setelah terkoreksi cukup dalam di paruh waktu kedua tahun lalu. Kegiatan ekspor Nusa Tenggara Barat, yang didominasi ekspor komoditas konsentrat tembaga, sangat dirugikan oleh tren penurunan harga komoditas tembaga di pasar komoditas internasional sepanjang semester II-2008 seiring melemahnya permintaan dunia akibat krisis global.

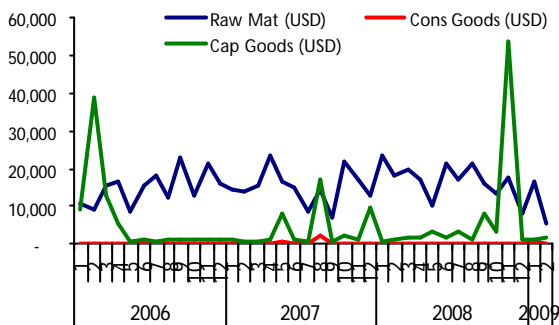
Paket kebijakan stimulus fiskal yang diambil sejumlah negara untuk meredam laju krisis ekonomi global, diantaranya berupa pendanaan proyek pembangunan infrastruktur, telah direspon dengan kenaikan harga komoditas metal di pasar dunia pada awal tahun 2009. Tren kenaikan harga komoditas metal termasuk tembaga diprediksi akan turut mendorong kinerja ekspor Nusa Tenggara Barat pada triwulan ini.

Hasil liaison KBI Mataram pada triwulan I-2009 mengindikasikan adanya peningkatan kinerja yang cukup signifikan pada produksi konsentrat tembaga.

Ekspor konsentrat tembaga di tahun 2009 diproyeksikan meningkat signifikan sebanyak 51,46% dibandingkan tahun 2008.

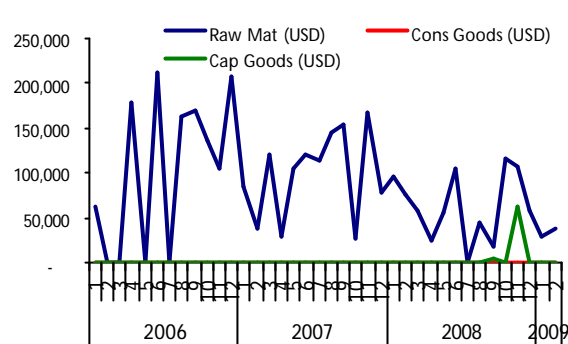
Di sisi lain, kegiatan impor Nusa Tenggara Barat relatif stabil, sebagian besar didominasi peralatan dan suku cadang pertambangan. Aktivitas produksi di sektor pertambangan pada triwulan I-2009 diperkirakan masih memanfaatkan alat berat yang diimpor pada tahun-tahun sebelumnya sehingga belum berdampak signifikan pada peningkatan kegiatan impor terutama *capital goods*.

Grafik 1.7  
Perkembangan Nilai Impor



Sumber: BI

Grafik 1.8  
Perkembangan Nilai Ekspor

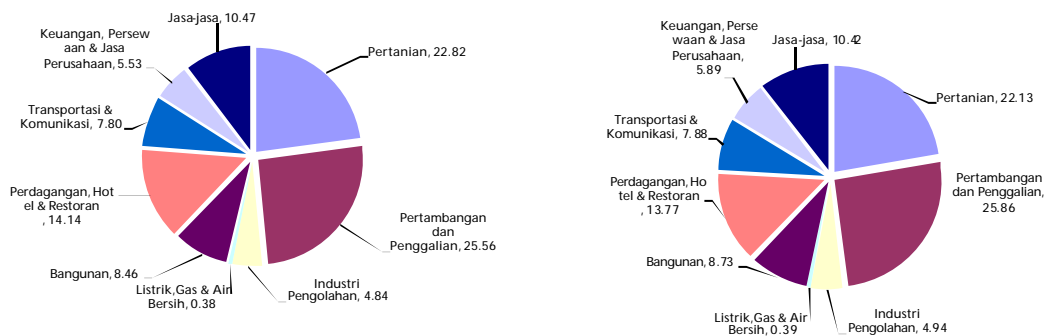


Sumber: BI

### 1.3 SISI PENAWARAN

Memasuki triwulan I 2009, perkembangan perekonomian NTB dari sisi penawaran mulai membaik setelah mengalami perlambatan akibat kontraksi di sektor pertambangan mulai triwulan II 2008. Struktur perekonomian di NTB pada triwulan ini masih didominasi oleh 3 (tiga) sektor utama yang menyumbang 61,76% dari keseluruhan PDRB Provinsi NTB, yaitu sektor Pertambangan dan Penggalian(25,86%), sektor Pertanian (22,13%), serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (13,77%).

Grafik 1.9  
Struktur Perekonomian Nusa Tenggara Barat periode  
Tw I 2008 (kiri) dan Tw I 2009 (kanan)



Sumber : BPS Provinsi NTB

Tabel 1.2  
Pertumbuhan dan Sumbangan Pertumbuhan Sisi Penawaran NTB

**Pertumbuhan Sisi Penawaran Nusa Tenggara Barat**

Uraian	2007	2008					2009
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I*)
Pertanian	2.94	5.83	5.48	2.01	6.86	4.84	2.50
Pertambangan dan Penggalian	2.76	6.93	(12.83)	(18.19)	(12.12)	(9.66)	6.11
Industri Pengolahan	9.96	10.53	7.03	9.13	8.46	8.73	8.99
Listrik, Gas & Air Bersih	9.86	11.99	12.89	12.62	5.56	10.55	9.11
Bangunan	7.59	13.58	6.38	10.40	4.87	8.76	10.23
Perdagangan, Hotel & Restoran	9.41	5.29	5.48	8.36	8.94	7.15	5.96
Transportasi & Komunikasi	9.85	3.14	(1.49)	7.06	4.58	3.40	7.98
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusaha	7.43	9.63	9.92	13.15	7.77	10.12	13.62
Jasa-jasa	3.39	0.67	3.36	6.64	7.75	4.62	5.51
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5.24</b>	<b>6.30</b>	<b>0.35</b>	<b>(0.07)</b>	<b>2.25</b>	<b>2.07</b>	<b>6.25</b>

**Sumbangan Pertumbuhan Sisi Penawaran Nusat Tenggara Barat**

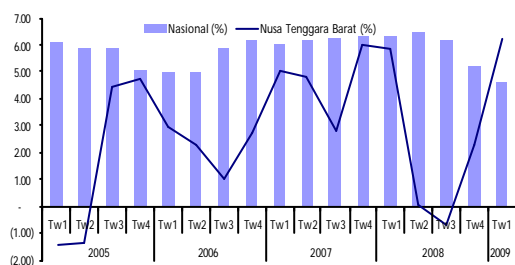
Uraian	2007	2008					2009
	FY	Tw.I	Tw.II	Tw.III	Tw.IV	FY	Tw.I*)
Pertanian	0.75	1.34	1.36	0.57	1.64	1.21	0.57
Pertambangan dan Penggalian	0.72	1.78	(3.32)	(4.65)	(3.07)	(2.47)	1.58
Industri Pengolahan	0.45	0.49	0.34	0.41	0.41	0.41	0.43
Listrik, Gas & Air Bersih	0.03	0.04	0.04	0.04	0.02	0.04	0.03
Bangunan	0.52	1.07	0.40	0.67	0.37	0.61	0.86
Perdagangan, Hotel & Restoran	1.32	0.74	0.82	1.15	1.39	1.04	0.82
Transportasi & Komunikasi	0.74	0.25	(0.12)	0.53	0.36	0.27	0.62
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusaha	0.36	0.51	0.50	0.61	0.38	0.50	0.75
Jasa-jasa	0.34	0.07	0.34	0.61	0.74	0.46	0.58
<b>Produk Domestik Bruto</b>	<b>5.24</b>	<b>6.30</b>	<b>0.35</b>	<b>(0.07)</b>	<b>2.25</b>	<b>2.07</b>	<b>6.25</b>

\*) Proyeksi KBI Mataram

Sumber : BPS, diolah

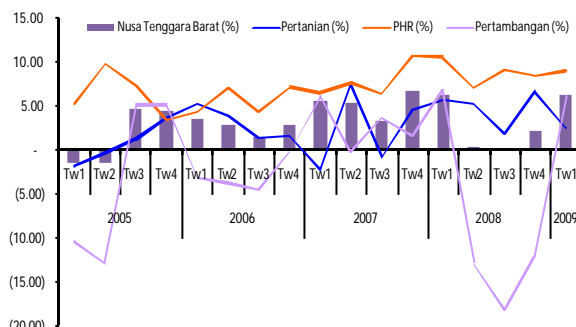
Pertumbuhan ekonomi dari sisi penawaran diperkirakan masih tumbuh positif mencapai 6,25% (yoy), lebih tinggi dibandingkan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,60% (yoy). Pertumbuhan pada triwulan ini sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2008 yang tumbuh sebesar 6,30% (yoy). Walaupun kontraksi di sektor pertambangan akibat kendala hak pinjam pakai hutan masih belum menemui jalan tengah, namun trend peningkatan ekspor konsentrat tembaga telah menunjukkan optimisme pelaku usaha di sektor pertambangan untuk terus meningkatkan produksinya, sehingga mendorong sektor pertambangan untuk tumbuh sebesar 6,11% (yoy) di triwulan I 2009.

Grafik 1.10  
Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi  
Nusa Tenggara Barat



Sumber : BPS Provinsi NTB, diolah

Grafik 1.11  
Perkembangan Pertumbuhan di Sektor Utama NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB, diolah

### a. Pertanian

Sektor Pertanian di triwulan I 2009 tetap menjadi salah satu penyumbang utama pertumbuhan ekonomi di NTB dengan kontribusi sebesar 22,13%. Namun pertumbuhan diperkirakan mengalami perlambatan yang ditunjukkan dengan turunnya pertumbuhan ekonomi di sektor ini mencapai 2,50% (yoy), menurun dibanding pertumbuhan triwulan I 2008 yang mencapai 5,83% (yoy). Pertumbuhan di sektor Pertanian didorong oleh peningkatan produksi komoditas-komoditas pertanian yang termasuk kedalam Tanaman Bahan Makanan terutama Padi, Jagung, dan Kedelai.

Kenaikan produksi padi dipengaruhi oleh meningkatnya jumlah luas lahan panen di tahun 2009 walaupun tingkat produktivitas mengalami sedikit penurunan. Berdasarkan perhitungan ramalan 1 yang dipublikasikan oleh BPS, luas panen di tahun 2009 diperkirakan meningkat 5,5%, dari 359,7 ribu hektar di tahun 2008 menjadi sebesar 379,6 ribu hektar di tahun 2009. Sementara tingkat produktivitas tanaman padi diperkirakan sedikit menurun dari 48,67 kwintal per hektar menjadi sebesar 47,22 kwintal per hektar.

Tabel 1.3  
Perkembangan Produksi Padi di NTB

Periode	Luas Lahan Panen (Hektar)	Produktivitas (Kuintal/hektar)	Produksi (Ton)
2002	310,969	44.06	1,370,170
2003	319,417	44.53	1,422,441
2004	325,984	44.99	1,466,757
2005	300,394	45.54	1,367,869
2006	341,418	45.48	1,552,627
2007	331,916	45.99	1,526,347
2008*	359,714	48.67	1,750,677
2009**	379,608	47.22	1,792,697

Sumber : BPS

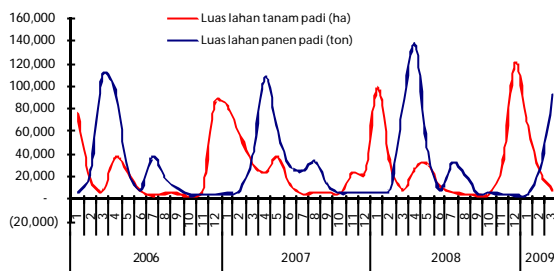
\*) Angka Sementara (ASEM)

\*\*) Angka Ramalan 1 (ARAM 1)

Selain padi, pertumbuhan di sektor pertanian juga disumbang oleh produksi Jagung yang juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Produksi Jagung di tahun 2009 berdasarkan angka ramalan 1 diperkirakan mencapai 201,1 ribu ton pipilan kering, meningkat 2,48% dibandingkan produksi tahun 2008 yang mencapai 196,3 ribu ton. Peningkatan produksi Jagung selain diakibatkan oleh meningkatnya luas panen, juga disebabkan oleh peningkatan produktivitas karena meningkatnya benih bermutu yang ditanam petani dengan menggunakan benih jagung hibrida.

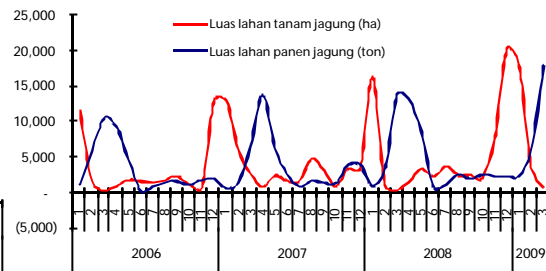
Sementara itu kedelai juga mengalami peningkatan produksi yang diakibatkan oleh peningkatan luas panen di tahun 2009 mencapai 85,9 ribu hektar atau meningkat 12,81% dibandingkan luas panen tahun 2008 yang mencapai 76,2 ribu hektar. Selain peningkatan luas panen, produktivitas tanaman kedelai juga mengalami peningkatan dari sebesar 12,02 kwintal per hektar menjadi sebesar 12,49 kwintal per hektar di tahun 2009.

Grafik 1.12  
Luas Lahan Tanam dan Panen Padi di NTB



Sumber : Dinas Pertanian Provinsi NTB

Grafik 1.13  
Luas Lahan Tanam dan Panen Jagung di NTB

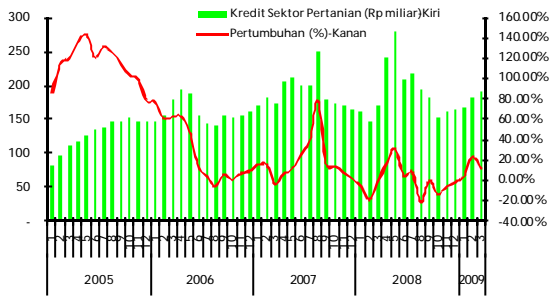


Sumber : Dinas Pertanian Provinsi NTB

Pertumbuhan di sektor pertanian selain diakibatkan oleh berhasilnya masa panen untuk masing-masing jenis komoditas, juga didorong oleh program pemerintah untuk mendorong sektor pertanian melalui program pemberian bantuan benih kepada petani. Bantuan yang diberikan berupa bantuan benih biasa untuk padi seluas 48 ribu hektar, benih jagung hibrida untuk lahan seluas 1.650 hektar, dan benih kedelai untuk lahan seluas 10 ribu hektar. Selain itu diberikan pula Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) pada tanaman padi hibrida untuk lahan 3.000 hektar, padi biasa 32 ribu hektar, jagung 12 ribu hektar, dan kedelai seluas 8 ribu hektar.

Peningkatan produksi di sektor pertanian juga diikuti dengan peningkatan penyaluran kredit perbankan ke sektor pertanian. Dapat dilihat dari hasil penyaluran kredit kepada sektor pertanian di triwulan I 2009, yang mengalami peningkatan mencapai 11,80% (yoy). Hasil tersebut lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit di triwulan yang sama tahun lalu yang mengalami perlambatan mencapai 2,19% (yoy). Nilai kredit yang disalurkan di triwulan ini mencapai Rp0,19 triliun, meningkat dibandingkan nilai kredit yang disalurkan di triwulan I 2008 mencapai Rp0,17 triliun.

Grafik 1.14  
Penyaluran Kredit Perbankan  
di Nusa Tenggara Barat Ke Sektor Pertanian

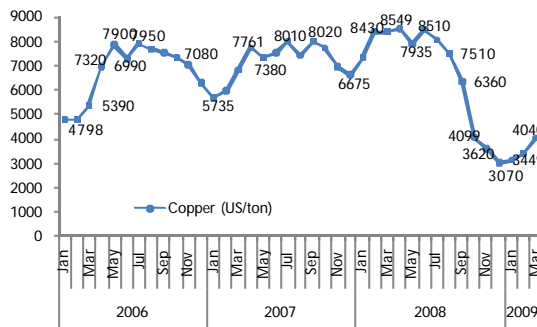


Sumber : Laporan Bulanan Bank, KBI Mataram

**b. Pertambangan**

Kinerja sektor pertambangan di triwulan I 2009 diperkirakan mengalami peningkatan mencapai 6,11% (yoy). Walaupun sedikit lebih rendah dibandingkan pencapaian triwulan I 2008 yang sebesar 6,93% (yoy), namun peningkatan ini merupakan sinyalemen positif dari sektor pertambangan di NTB yang masih terkendala dengan permasalahan hak pinjam pakai kawasan hutan yang mengakibatkan operasional tambang masih belum dapat berjalan secara optimum.

Grafik 1.15  
Perkembangan Harga Tembaga di Pasar Dunia



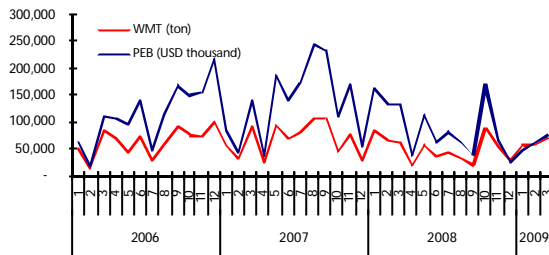
Sumber : London Metal Exchange, Ltd

Kinerja sektor pertambangan di awal tahun 2009 ini menunjukkan tren meningkat yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah produksi konsentrat tembaga pelaku usaha pertambangan utama di NTB, dengan jumlah produksi secara kumulatif di triwulan I 2009 sebesar 184.211 metric ton. Tren peningkatan tersebut terjadi seiring dengan peningkatan harga Tembaga Internasional hingga mencapai 4,04 ribu USD/metric ton

dari 3,07 ribu USD/metric ton di akhir tahun lalu. Peningkatan produksi tersebut semakin memantapkan posisi sektor pertambangan sebagai kontributor PDRB terbesar di Provinsi NTB, dengan pangsa sebesar 25,86% terhadap keseluruhan PDRB.

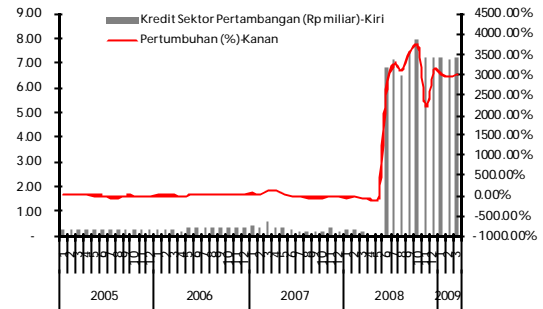


Grafik 1.16  
Jumlah Produksi dan Ekspor Konsentrat Tembaga



Sumber : PT Newmont Nusa Tenggara

Grafik 1.17  
Penyaluran Kredit Perbankan di Nusa Tenggara Barat ke sektor Pertambangan



Sumber : Laporan Bulanan Bank, KBI Mataram

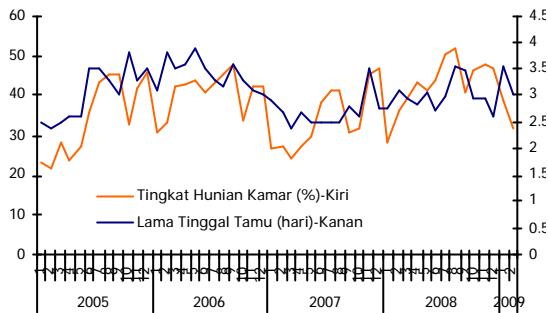
Penyaluran kredit perbankan untuk sektor pertambangan di awal tahun ini pun kembali stabil setelah mengalami penurunan cukup tajam di triwulan IV 2008. Nominal penyaluran kredit perbankan mencapai Rp7,2 miliar, jauh meningkat dibandingkan nominal penyaluran kredit di triwulan yang sama tahun 2008 yang hanya sebesar Rp0,23 miliar. Hal ini menunjukkan kondisi sektor pertambangan mulai stabil kembali setelah mengalami kontraksi cukup tajam di akhir tahun 2008. Namun demikian, pelaku utama di sektor ini diperkirakan tidak memanfaatkan pembiayaan perbankan di Nusa Tenggara Barat untuk kegiatan operasional maupun untuk investasi.

### c. Perdagangan Hotel & Restoran

Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di triwulan ini tetap menjadi salah satu sektor yang menjadi andalan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan share terhadap PDRB sebesar 13,77%. Walaupun masa liburan telah berakhir baik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara, kinerja sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran di triwulan I 2009 diperkirakan masih tumbuh positif sebesar 5,96% (yoy), sedikit meningkat dibandingkan pertumbuhan ekonomi sektor ini pada triwulan I 2008 yang mencapai 5,29% (yoy).

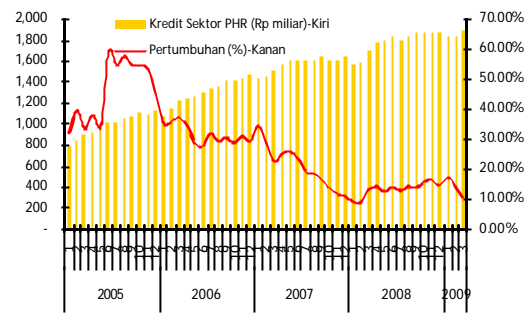
Sejalan dengan pertumbuhan yang dicapai, peningkatan kinerja sektor ini juga dikonfirmasi dengan meningkatnya *prompt indicator* berupa indeks tingkat hunian kamar (TPK) yang dipublikasikan oleh BPS pada bulan Januari 2009 menjadi sebesar 38,66%, yang lebih tinggi dibandingkan indeks pada periode yang sama di tahun lalu yang sebesar 27,98%. Sedangkan jumlah tamu yang menginap pada Hotel Bintang tercatat sebanyak 12.698 orang meningkat 12,95% dibandingkan jumlah tamu yang menginap pada periode yang sama tahun lalu yakni sebanyak 11.242 orang. Mayoritas wisatawan yang datang ke NTB merupakan wisatawan domestik (76,2%).

Grafik 1.18  
Tingkat Hunian Kamar dan Lama Tinggal Tamu di Nusa Tenggara Barat ke sektor PHR



Sumber : Dinas Pariwisata Provinsi NTB

Grafik 1.19  
Penyaluran Kredit Perbankan di Nusa Tenggara Barat ke sektor PHR



Sumber : Laporan Bulanan Bank , KBI Mataram

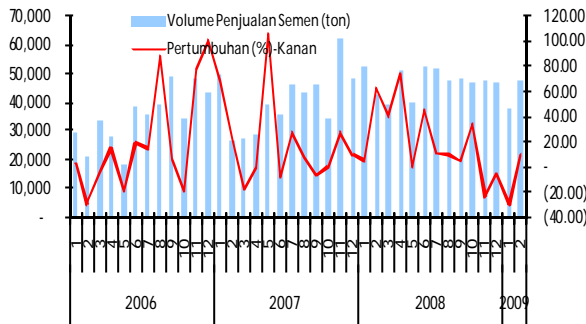
Dari sisi pembiayaan penyaluran kredit ke sektor PHR di triwulan I 2009 masih mampu tumbuh positif, namun menunjukkan tren menurun. Nilai penyaluran kredit untuk sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran pada triwulan ini mencapai Rp1,88 triliun, meningkat sebesar 10,75% dibandingkan jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan ke sektor PHR pada triwulan I 2008 yang mencapai Rp1,69 triliun.

**d. Bangunan**

Sektor Bangunan pada awal tahun ini diperkirakan mampu tumbuh positif. Pertumbuhan ekonomi di sektor ini diperkirakan mencapai 10,23% (yoy), melambat dibandingkan kinerja di triwulan I 2008 yang mencapai 13,58% (yoy). Masih berjalannya kegiatan proyek fisik di NTB seperti pembangunan perumahan, rumah toko (ruko) dan Bandara Internasional Lombok (BIL) di Kabupaten Lombok Tengah mengkonfirmasi pertumbuhan di sektor bangunan. Peningkatan di sektor bangunan juga dikonfirmasi oleh peningkatan volume penjualan semen di awal tahun ini.

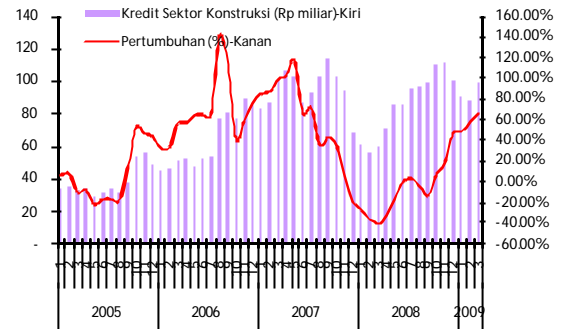
Dari sisi pembiayaan juga terjadi peningkatan penyaluran kredit perbankan di NTB ke sektor Bangunan. Penurunan suku bunga kredit perbankan dan ekspektasi penurunan BI Rate telah mendorong peningkatan penyaluran kredit di sektor bangunan (saat ini BI Rate per April 2009 adalah sebesar 7,50%). Penyaluran kredit di triwulan I 2009 mencapai Rp0,098 triliun, atau meningkat 65,26% dibandingkan penyaluran kredit pada periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp0,060 triliun.

Grafik 1.20  
Volume Penjualan Semen NTB



Sumber : ASI

Grafik 1.21  
Penyaluran Kredit Perbankan  
di Nusa Tenggara Barat ke sektor Bangunan



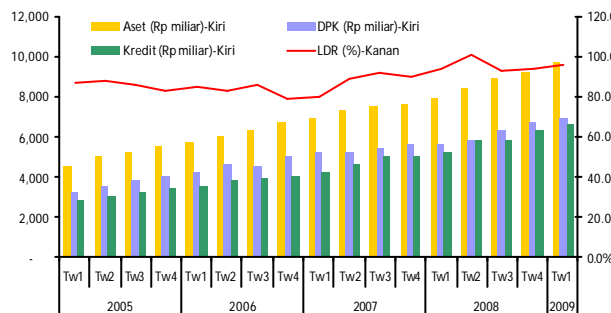
Sumber : Laporan Bulanan Bank , KBI Mataram

**e. Keuangan, Persewaan, dan Jasa**

Pergerakan sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa terhadap perekonomian di NTB relatif stabil. Di triwulan ini diperkirakan sektor ini mampu tumbuh mencapai 13,62% (yoy). Angka pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan angka pertumbuhan di periode yang sama tahun 2008 yang mencapai 9,63% (yoy). Penurunan BI Rate untuk kesekian kalinya beberapa waktu yang lalu hingga menyentuh level 7,50% (April 2009) mendorong turunnya suku bunga kredit perbankan, berdampak membaiknya daya beli masyarakat yang berimbas pada pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa yang cukup tinggi.

Di sisi lain krisis global yang terjadi akhir-akhir ini diperkirakan tidak berdampak besar pada perekonomian NTB tercermin dari stabilnya penyaluran kredit perbankan, terutama untuk kredit konsumtif yang didorong membaiknya daya beli masyarakat. Kredit perbankan di triwulan I 2009 tumbuh 27,13% (yoy) dengan nilai *outstanding* kredit mencapai Rp6,6 triliun, dengan mayoritas kredit atau 61,5% dari total kredit yang disalurkan untuk kegiatan konsumtif.

Grafik 1.22  
Perkembangan Kondisi Perbankan NTB



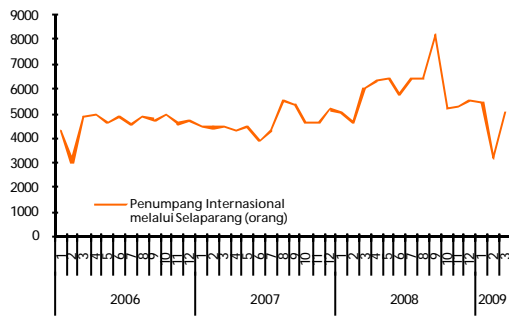
Sumber : Bank Indonesia

**f. Transportasi dan Komunikasi**

Sektor Transportasi dan Komunikasi pada triwulan I 2009 mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Kinerja sektor ini diperkirakan tumbuh 7,98% (yoy), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2008 yang mencapai 3,14% (yoy).

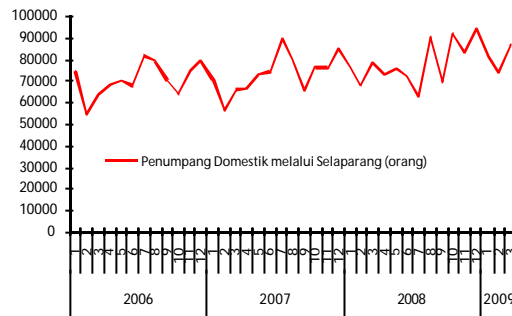
Indikator yang mencerminkan pertumbuhan di sektor ini adalah perkembangan jumlah arus penumpang internasional dan domestik yang menggunakan pesawat melalui Bandara Selaparang - Mataram. Meski sempat mengalami penurunan pada bulan Februari 2009 akibat telah berakhirnya masa liburan baik bagi wisatawan domestik dan mancanegara, namun jumlah pengguna angkutan udara mengalami tren meningkat.

Grafik 1.23  
Perkembangan Arus Penumpang Internasional



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

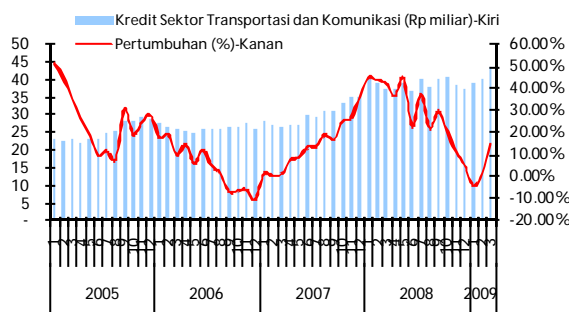
Grafik 1.24  
Perkembangan Arus Penumpang Domestik



Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi NTB

Pertumbuhan sektor transportasi dan komunikasi tidak lepas dari dukungan pembiayaan dari perbankan. Seiring dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi di sektor transportasi, penyaluran kredit perbankan juga mengalami pertumbuhan sebesar 14,81% (yoy), dengan nilai *outstanding credit* meningkat dari Rp0,038 triliun di triwulan I 2008 menjadi sebesar Rp0,043 triliun pada triwulan laporan.

Grafik 1.25  
Penyaluran Kredit Perbankan  
di Nusa Tenggara Barat ke sektor Transportasi



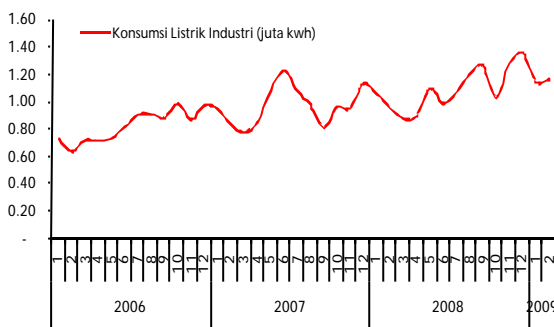
Sumber : Laporan Bulanan Bank , KBI Mataram

**g. Industri Pengolahan**

Sektor Industri Pengolahan pada triwulan ini tumbuh sebesar 8,99% (yoy), sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan I 2008 yang mencapai sebesar 10,53% (yoy). Pertumbuhan meningkat di sektor ini sejalan dengan perkembangan konsumsi listrik Industri yang juga mengalami peningkatan.

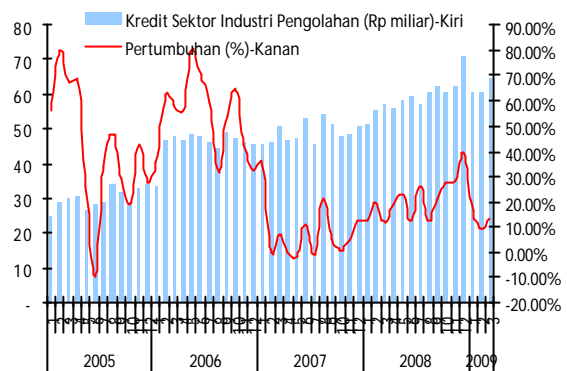
Sedangkan kinerja sisi pembiayaan di awal tahun menunjukkan peningkatan. Nilai kredit yang dikucurkan pada triwulan ini mencapai Rp0,064 triliun, meningkat 13,14% dibandingkan penyaluran kredit pada triwulan I 2008 sebesar Rp0,057 triliun.

Grafik 1.26  
Perkembangan Konsumsi Listrik Industri



Sumber : PLN

Grafik 1.27  
Penyaluran Kredit Perbankan di NTB ke sektor Industri Pengolahan

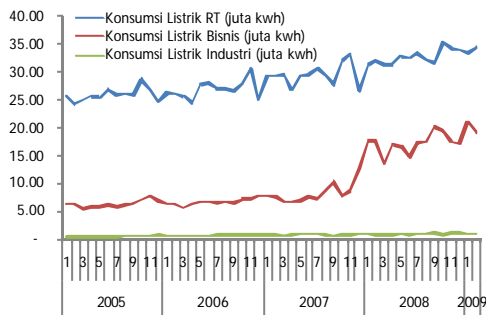


Sumber : Laporan Bulanan Bank, KBI Mataram

**h. Listrik, Gas, dan Air Bersih**

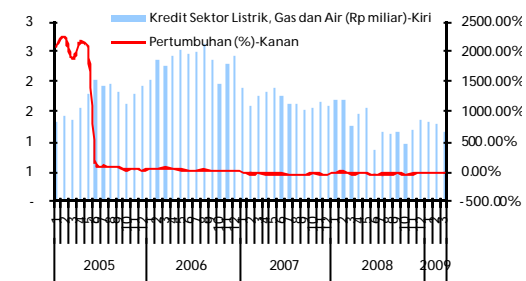
Pertumbuhan PDRB di sektor Listrik, Gas, dan Air Bersih di triwulan I 2009 diperkirakan sebesar 9,11% (yoy), menurun dibandingkan pertumbuhan pada triwulan yang sama pada tahun 2008 yang tumbuh sebesar 11,99% (yoy).

Grafik 1.28  
Konsumsi Listrik di NTB



Sumber : PLN

Grafik 1.29  
Penyaluran Kredit Perbankan di NTB ke sektor Listrik, Air & Gas



Sumber : Laporan Bulanan Bank, KBI Mataram

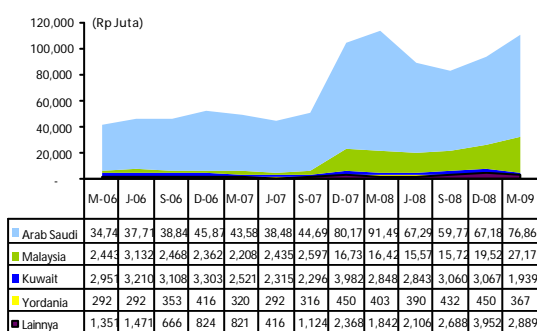
Konsumsi listrik di NTB yang cenderung meningkat disikapi oleh pemerintah dengan membangun PLTU Jeranjang agar semakin mempercepat pertumbuhan di sektor ini. Dari sisi pembiayaan, kinerja sektor listrik, gas, dan air bersih justru mengalami perlambatan yang ditunjukkan dengan pertumbuhan negatif sebesar 8,53% (yoy). Namun pertumbuhan ini lebih baik dibandingkan pencapaian triwulan I 2008 yang tumbuh negatif sebesar 27,99% (yoy).

**1.4 TENAGA KERJA DAN KESEJAHTERAAN**

Melemahnya pertumbuhan ekonomi global mulai berdampak terhadap penempatan tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Barat ke luar negeri. Pada periode Januari-Maret 2009 jumlah TKI asal NTB yang disalurkan bekerja di luar negeri turun tajam sebesar -59,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dari 31.673 orang menjadi 12.818 orang. Jumlah tenaga kerja asal NTB yang ditempatkan di luar negeri pada periode ini hanya sebesar 12.818 orang sementara pada triwulan I-2008 tercatat sebesar 31.673 orang.

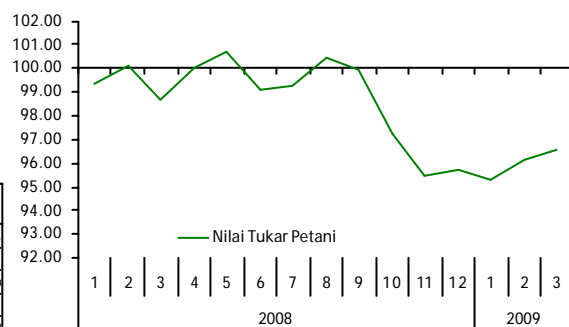
Negara tujuan para TKI asal Nusa Tenggara Barat utamanya ke Malaysia dan Arab Saudi, masing-masing dengan pangsa sebesar 60% dan 39% sementara sisanya tersebar di negara-negara Asia lainnya. Berdasarkan lapangan kerja, TKI yang bekerja di Malaysia pada umumnya menjadi buruh di perkebunan sawit di Malaysia, sementara di Arab Saudi sebagian besar menjadi pembantu rumah tangga. Krisis ekonomi global yang salah satunya berdampak pada penurunan harga komoditas pertanian pada gilirannya menyebabkan turunnya kebutuhan tenaga kerja di sektor perkebunan di Malaysia.

Grafik 1.30  
Penerimaan Remitansi TKI NTB



Sumber: BI

Grafik 1.31  
Perkembangan NTP di NTB



Sumber: BPS

Dari sisi penerimaan remitansi TKI, jumlah dana yang masuk melalui sistem perbankan pada triwulan I-2009 justru mengalami kenaikan mencapai Rp168 miliar

sementara pada triwulan yang sama tahun lalu hanya sebesar Rp126 miliar. Kenaikan jumlah remitansi yang masuk tersebut salah satunya turut dipengaruhi tren pelemahan nilai tukar rupiah sepanjang triwulan ini. Namun demikian, pada periode-periode mendatang diperkirakan jumlah remitansi TKI yang masuk ke NTB diperkirakan justru akan semakin berkurang seiring menurunnya penempatan TKI asal NTB ke luar negeri.

Sementara itu, pemerintah daerah bersama dinas/instansi terkait di Nusa Tenggara Barat tampaknya harus terus berupaya meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat terutama di sektor pertanian. Hal tersebut tercermin dari indikator Nilai Tukar Petani (NTP) yang terus menunjukkan kecenderungan penurunan sejak September 2008 hingga kini.

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai kualitas pertumbuhan ekonomi di Nusa Tenggara Barat mengingat sebagian besar tenaga kerja di Nusa Tenggara Barat diserap oleh sektor pertanian. NTP tersebut menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula daya beli petani.

Kenaikan harga komoditas pertanian hingga awal tahun 2009 belum mampu mengangkat daya beli petani di Nusa Tenggara Barat. Pada bulan Januari 2009, NTP tercatat sebesar 95,29 sementara pada Januari 2008 angka NTP sempat menyentuh level 99,33. Angka NTP di bawah 100 mencerminkan harga yang dibayar petani untuk konsumsi lebih tinggi dibandingkan harga yang diterima petani dari hasil produksi komoditas pertanian.

### **1.5 KEUANGAN DAERAH**

Sepanjang triwulan I-2009, perkembangan realisasi anggaran belanja pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat baru mencapai kisaran 10% di bawah target realisasi sebesar 20%. Seperti periode-periode sebelumnya, pola penyerapan anggaran cenderung lambat pada awal tahun dan selanjutnya dipercepat pada triwulan terakhir. Tidak meratanya pola penyerapan anggaran umumnya ditunjukkan pada pos belanja daerah langsung yakni belanja modal. Sementara realisasi untuk pos belanja langsung yakni belanja pegawai berjalan lancar setiap bulannya.

Dari sisi penerimaan, realisasi anggaran pada triwulan ini diperkirakan tidak mengalami kendala. Kecenderungan peningkatan dana milik pemerintah di perbankan pada periode Januari-Maret 2009 mengindikasikan laju penerimaan daerah bersumber dari dana perimbangan pemerintah pusat. Laju realisasi anggaran belanja yang lebih rendah dibandingkan penerimaan diprediksi menyebabkan kenaikan saldo DPK milik pemerintah daerah pada paruh waktu

pertama tahun 2009. Selanjutnya, seperti pola tahun-tahun sebelumnya, dana pemerintah tersebut akan turun drastis pada triwulan keempat untuk mengejar target realisasi.

Secara umum, anggaran penerimaan daerah masih mengandalkan dana perimbangan dengan perbandingan terhadap pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 85:15. Sementara peruntukan dana tersebut sebagian besar terserap untuk belanja gaji pegawai dengan porsi mencapai 60%. Di lain sisi, alokasi anggaran untuk belanja modal relatif kecil di bawah 20%. Menyikapi hal tersebut, alokasi anggaran untuk belanja modal seharusnya mendapat porsi yang lebih besar karena belanja modal memiliki *multiplier effect* yang lebih besar terhadap perekonomian Nusa Tenggara Barat.

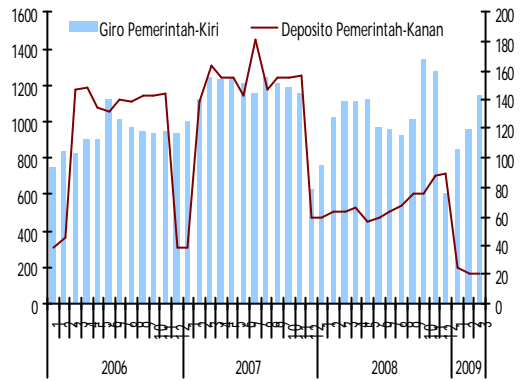
Tabel 1.4  
APBD Provinsi NTB

Uraian	APBD 2009	
	Rencana	Realisasi Tw I-09*)
<b>APBD</b>		
Provinsi NTB (Gabungan Kota/Kabupaten)		
<b>(Juta Rupiah)</b>		
<b>Pendapatan daerah</b>	<b>6,213,453</b>	<b>1,145,004</b>
1 <b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>715,524</b>	<b>82,643</b>
1 Pajak Daerah	424,243	49,000
2 Retribusi Daerah	127,607	14,739
3 Hasil perusahaan milik daerah	51,675	5,968
4 Lain-lain	111,999	12,936
2 <b>Dana Perimbangan</b>	<b>5,103,497</b>	<b>1,039,582</b>
1 Bagi hasil pajak dan bukan pajak	455,139	92,712
2 Dana alokasi umum	4,121,811	839,613
3 Dana alokasi khusus	526,547	107,258
3 <b>Lain-lain pendapatan</b>	<b>394,432</b>	<b>22,778</b>
<b>Belanja daerah</b>	<b>6,573,521</b>	<b>717,171</b>
1 <b>Belanja tidak langsung</b>	<b>4,018,317</b>	<b>438,398</b>
1 Belanja pegawai	3,140,412	342,619
2 Belanja bantuan sosial	251,707	27,461
3 Belanja bantuan keuangan	256,172	27,948
4 Belanja bagi hasil	189,546	20,679
5 Belanja tak terduga	23,817	2,598
6 Belanja subsidi dan hibah	156,663	17,092
2 <b>Belanja langsung</b>	<b>2,555,204</b>	<b>278,773</b>
1 Belanja pegawai	335,546	36,608
2 Belanja barang dan jasa	908,968	99,168
3 Belanja modal	1,310,690	142,996
<b>Surplus/(Defisit)</b>	<b>(360,068)</b>	<b>427,833</b>
<b>Pembiayaan</b>	<b>360,068</b>	<b>445,779</b>
Penerimaan daerah	470,216	445,779
Pengeluaran daerah	110,148	-

Keterangan  
\*) Perkiraan BI Mataram (kumulatif)

Sumber: Bappeda, diolah

Grafik 1.32  
Saldo Keuangan Pemerintah Daerah di NTB pada Perbankan NTB (Rp miliar)



Sumber: BI



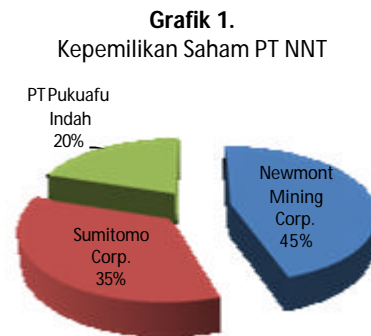
## Boks 1

### Rencana Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara Pasca Sidang Arbitrase

PT Newmont Nusa Tenggara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang tambang dengan produk utama tembaga (*copper*), dengan pemegang saham utama Nusa Tenggara Mining Corporation dan Sumitomo Corporation yang memiliki saham mayoritas dari PT NNT (80%), serta perusahaan local PT Pukuafu Indah Indonesia yang memegang 20% dari keseluruhan saham (Lihat Grafik 1).

Tahun 1986 PT NNT mendapatkan perjanjian kontrak karya, dan memulai operasional tambangnya pada tahun 2000. Luas Kontrak Karya yang didapatkan adalah sebesar 1.127.134 hektar, dengan nilai investasi awal sebesar 1,9 miliar US Dolar<sup>1</sup>. Kontrak karya diberikan dengan

perjanjian kewajiban divestasi saham asing mulai tahun 2006 hingga akhir 2010. Dengan perhitungan 20 persen saham sudah dimiliki swasta nasional, sehingga sisa saham yang harus didivestasikan sebesar 31% hingga akhir 2010. Detail divestasi dituangkan dalam ketentuan kontrak karya pasal 24 point 3. Adapun detail rencana divestasi saham PT NNT dapat dilihat pada tabel 1.



Sumber : Bisnis Indonesia, 6 April 2009

**Tabel 1.**  
Rencana Divestasi PT NNT sesuai Pasal 24 point 3 Kontrak Karya PT NNT

Tahun	Divestasi Saham PT NNT	Kepemilikan Saham PT NNT o/ pihak Indonesia	Nilai Saham yang ditawarkan (US\$ juta)
2000 s/d 2004	-	20%	
2006	3%	23%	109
2007	7%	30%	282
2008	7%	37%	426
2009	7%	44%	348
2010	7%	51%	(belum ada informasi)

Sumber : Bisnis Indonesia, 6 April 2009

<sup>1</sup> Informasi luas kontrak karya dan nilai investasi PT NNT didapatkan dari Jaringan Tambang (<http://www.jatam.org>)

### **Kronologis Divestasi Saham PT NNT**

- ? Pada tahun 2006 PT NNT telah menawarkan 3 persen kepada pemerintah. Namun pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan telah menolak untuk membeli saham yang kurang lebih bernilai 109 juta US dolar tersebut dengan alasan tidak adanya anggaran. Kemudian pada tanggal 13 Februari 2007 PT NNT menawarkan divestasi saham kepada tiga pemerintah daerah di NTB, yaitu Pemda Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Pemda Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Provinsi NTB. Saat itu Pemda KSB menunjukkan ketertarikan untuk membeli saham namun meminta tambahan waktu atas tawaran tersebut, dengan alasan untuk melakukan *due diligence* (uji tuntas) atas kinerja operasional PT NNT. Namun permohonan tersebut ditolak oleh Pemerintah Provinsi NTB walaupun pada saat itu juga menunjukkan ketertarikan untuk membeli saham tersebut. Sementara itu Pemda Kab. Sumbawa belum memberikan tanggapan atas penawaran tersebut. Kesepakatan tiga pemerintah daerah tidak juga tercapai hingga melampaui batas akhir pembelian saham pada tanggal 23 Agustus 2007. Sehingga pembelian saham sebesar 3 persen dari PT NNT batal dilakukan.
- ? Di tahun 2007 PT NNT kembali menawarkan divestasi saham kepada pemerintah sebesar 7 persen dengan nilai nominal mencapai 282 juta US dolar. Namun penawaran tahap kedua tersebut juga tidak ditanggapi oleh pemerintah mengenai pembelian saham, sehingga rencana divestasi kembali tertunda.
- ? Setelah dua kali penawaran pembelian saham gagal dilakukan, pada 11 Februari 2008 pemerintah menganggap bahwa Newmont telah lalai karena tidak juga menjual saham sesuai dengan kontrak karya. Menjawab pernyataan pemerintah tersebut, pada 26 Februari 2008 PT NNT mengajukan penundaan divestasi. Namun pengajuan tersebut ditolak oleh pemerintah, dan pada 3 Maret 2008 pemerintah mengajukan gugatan atas sengketa divestasi Newmont ke Arbitrase Internasional karena hingga tanggal tersebut PT NNT belum juga melaksanakan divestasi saham sesuai kontrak karya yang telah disepakati bersama.
- ? Pada tanggal 31 Maret 2009 majelis arbitrase mengumumkan secara resmi putusan yang memenangkan pemerintah Indonesia gugatannya atas kasus Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (PT NNT) di Arbitrase Internasional, dengan keputusan "*PT Newmont Nusa Tenggara wajib mendivestasikan 17 persen sahamnya dalam waktu 180 hari. Jika dalam waktu 180 hari sejak putusan arbitrase dikeluarkan Newmont tidak juga mendivestasikan sahamnya, maka pemerintah Indonesia berhak mencabut kontrak karyanya.*".

Sesuai prosedur arbitrase *United Nation Commision on International Trade Law* (UNCITRAL), saham yang didivestasikan harus bebas dari gadai (*Clean and Clear*), dan sumber dana pembelian saham tersebut bukan menjadi urusan PT NNT<sup>2</sup>. PT NNT dinyatakan bersalah oleh majelis arbitrase karena telah melakukan pelanggaran perjanjian. Sehingga PT NNT diperintahkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 point 3 Kontrak Kerjasama.

---

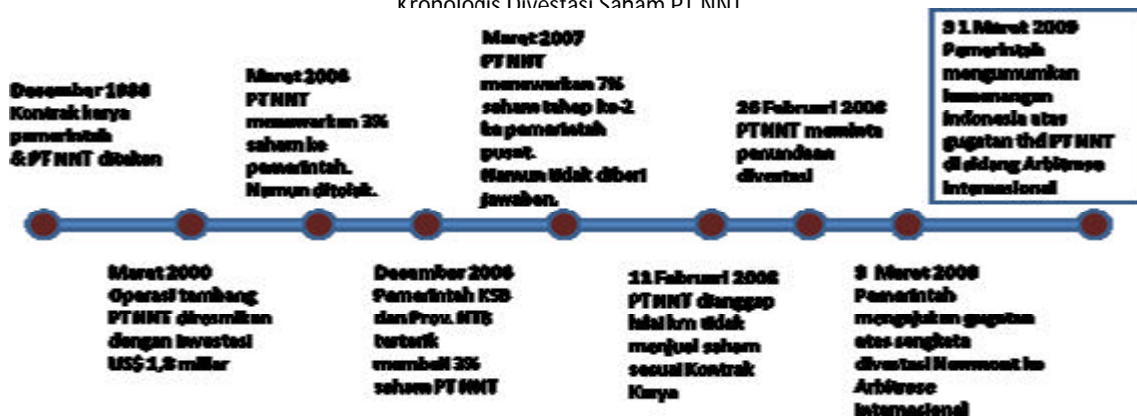
<sup>2</sup> Sebagai informasi, pada tahun 1996 PT NNT menggadaikan seluruh saham asingnya yang dimiliki Sumitomo dan Newmont Mining Corporation sebanyak 80 persen kepada Senior Lender yang terdiri dari Export Import Bank of Japan, US Export Import Bank, dan Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) Jerman, sebesar 1 miliar US Dolar untuk mengembangkan proyek. Tapi PT NNT telah melunasi sebagian, sehingga sisa 300 juta US Dolar. Sebanyak 20 persen sisa sahamnya dimiliki perusahaan lokal Pukuafu Indah. (sumber : Bisnis Indonesia)

Dengan adanya keputusan tersebut, pihak NNT menyatakan tetap berkomitmen untuk tetap melanjutkan divestasi saham seperti yang telah disepakati dalam kontrak kerja. Namun perlu dibahas lebih lanjut langkah-langkah kedepan dengan pemerintah guna melaksanakan putusan panel arbitrase. Sampai dengan akhir April 2009, Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih mengevaluasi dua alternatif pembelian saham Newmont. Pertama pemerintah dapat mengambil alih secara langsung, dan kedua melalui BUMN di sektor pertambangan. Evaluasi tersebut dengan mempertimbangkan tiga aspek yang menjadi *concern* utama pemerintah pusat. Pertama, nilai strategis dari komoditas pertambangan itu sendiri. Kedua, pertimbangan keuntungan bagi keuangan negara dan perekonomian secara keseluruhan apabila memutuskan membeli saham tersebut. Terakhir, aspek keberlangsungan dari aktivitas eksploitasi dan penjualan hasil komoditas Tambang Batu Hijau itu sendiri bagi kas negara.

Sebagai informasi, divestasi saham yang dilakukan hingga tahun 2009 dengan total divestasi 24% adalah sebesar 1,165 miliar US dolar atau setara dengan Rp12,41 triliun (dengan asumsi 1 US dolar setara dengan Rp 10.655). Sehingga apabila dihitung secara matematis untuk 100 persen saham PT NNT adalah sebesar 4,854 miliar US dolar atau setara dengan Rp51,72 triliun<sup>3</sup>.

Sesuai pasal 24 ayat 2 kontrak karya, jika pemerintah tidak menerima penawaran saham, kesempatan berikutnya jatuh pada warga Negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan warga Indonesia. Namun dengan berlakunya otonomi daerah, tidak hanya pemerintah pusat yang berhak membeli saham asing perusahaan tambang, pemerintah daerah juga memiliki kesempatan yang sama. Mengingat besarnya nilai investasi yang diperlukan, saat ini tiga Pemerintah daerah akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait pendanaan pembelian saham PT NNT sebesar 10 persen (untuk divestasi tahun 2006 dan 2007) dengan nilai kurang lebih Rp 4 triliun. Pemkab Sumbawa juga tengah mendesak pemerintah pusat untuk menandatangani Surat Keterangan (SK) agar PT NNT segera merealisasikan utang divestasi saham yang tertunda dua tahun tersebut.

Grafik 2 .  
Kronologis Divestasi Saham PT NNT



Sumber : Bisnis Indonesia, 2 April 2009

<sup>3</sup> Nilai ini merupakan perkiraan nilai investasi PT Newmont Nusa Tenggara, sementara ini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai nilai investasi PT NNT yang sesungguhnya. Apabila dibandingkan dengan jumlah penggadaian saham yang dilakukan pada tahun 1996, pada saat itu 80 persen saham digadaikan dengan harga 1 miliar US Dolar. Dengan perhitungan matematis, maka 100 persen harga saham PT NNT pada tahun 1996 adalah seharga 1,25 miliar US Dolar. Dengan asumsi demikian, dapat dilihat bahwa telah terjadi peningkatan nilai saham dari 1,25 miliar US Dolar pada tahun 1996 menjadi 4,85 miliar US Dolar pada tahun 2009. Atau dengan kata lain telah terjadi peningkatan nilai saham sebesar 288 persen dibanding tahun 1996.

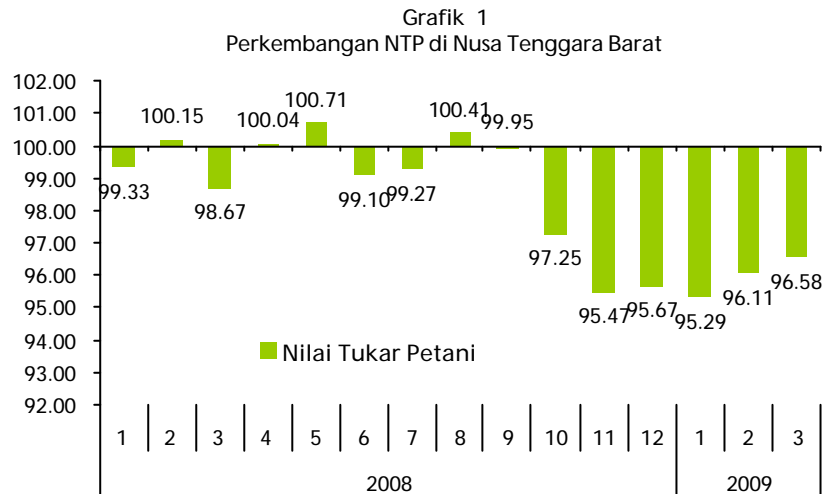
## Boks 2

### Perkembangan Daya Beli Petani dari Indikator Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur daya beli petani di pedesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Nilai tersebut diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani. Semakin tinggi NTP (di atas 100) maka semakin tinggi pula daya beli petani.

Di wilayah Nusa Tenggara Barat, NTP dihitung berdasarkan Survei Biaya Hidup tahun 2007. Perhitungan tersebut menghasilkan angka NTP untuk periode Januari 2008 – Maret 2009. Sepanjang periode tersebut angka NTP cenderung berfluktuasi dipengaruhi perubahan harga barang dan jasa.

Perkembangan NTP pada periode Januari 2008 – Maret 2009 menunjukkan masih rendahnya daya beli petani di Nusa Tenggara Barat. Secara umum, angka NTP berada di bawah angka 100 yang berarti harga yang dibayar petani untuk biaya produksi maupun konsumsi masih di atas harga yang diterima petani dari hasil produksi pertanian. Angka NTP sempat menyentuh level di atas 100 di tahun 2008 pada bulan Februari, April, Mei, dan Agustus, masing-masing sebesar 100,15; 100,04; 100,71; dan 100,41. Namun selanjutnya, angka NTP berada di bawah level 100 hingga akhir triwulan I-2009 yang tercatat sebesar 96,58.



Sumber: BPS

Dari lima sub sektor pertanian, terdapat dua sub sektor yang secara konsisten menunjukkan daya beli atau daya tukar (*terms of trade*) yang cukup baik di atas 100, yakni sub sektor peternakan dan sub sektor hortikultura. Sementara tiga sektor lainnya, yakni sub sektor tanaman pangan, sub sektor tanaman perkebunan rakyat, dan sub sektor perikanan justru menunjukkan kecenderungan di bawah level 100. Artinya, harga komoditas pertanian yang dinikmati para petani pada ketiga sub sektor tersebut masih belum mencukupi untuk memenuhi biaya produksi dan konsumsi.

Sampai dengan Maret 2009, angka NTP tertinggi dialami oleh sub sektor peternakan sebesar 108,97 diikuti sub sektor hortikultura sebesar 105,32. Di lain sisi, angka NTP terendah tercatat pada sub sektor tanaman pangan sebesar 91,27 diikuti, sub sektor pertanian, dan sub sektor tanaman perkebunan rakyat masing-masing tercatat sebesar 95,19 dan 95,26. Masih rendahnya NTP di sub sektor tanaman bahan makanan mengindikasikan belum meratanya kesejahteraan penduduk di Nusa Tenggara Barat yang sebagian besar bekerja di sub sektor tanaman pangan.

Tabel 1  
NTP Berdasarkan Sub Sektor

Sub Sektor	NTP	
	Feb 09	Mar 09
<b>1. Tanaman Pangan</b>		
Indeks yang Diterima	110.75	110.88
Indeks yang Dibayar	121.05	121.49
<b>Nilai Tukar Petani (NTPP)</b>	91.49	91.27
<b>2. Hortikultura</b>		
Indeks yang Diterima	123.26	128.32
Indeks yang Dibayar	121.35	121.84
<b>Nilai Tukar Petani (NTPH)</b>	101.57	105.32
<b>3. Tanaman Perkebunan Rakyat</b>		
Indeks yang Diterima	113.91	113.91
Indeks yang Dibayar	118.79	119.58
<b>Nilai Tukar Petani (NTPR)</b>	95.89	95.26
<b>4. Peternakan</b>		
Indeks yang Diterima	125.82	127.13
Indeks yang Dibayar	115.97	116.67
<b>Nilai Tukar Petani (NTPPT)</b>	108.49	108.97
<b>5. Perikanan</b>		
Indeks yang Diterima	111.66	113.13
Indeks yang Dibayar	117.93	118.84
<b>Nilai Tukar Petani (NTN)</b>	94.68	95.20
<b>Gabungan</b>		
Indeks yang Diterima	115.08	116.20
Indeks yang Dibayar	119.74	120.32
<b>Nilai Tukar Petani (NTP)</b>	96.11	96.58

Sumber: BPS

Tabel 2  
Nilai Tukar Petani di Beberapa Provinsi

Provinsi	IT	IB	NTP
Bali	121.65	118.24	102.88
<b>Nusa Tenggara Barat</b>	<b>116.20</b>	<b>120.32</b>	<b>96.58</b>
Nusa Tenggara Timur	122.23	121.58	100.53
Nasional	117.46	118.91	98.78

Sumber: BPS

Daya beli petani di Nusa Tenggara Barat juga masih di bawah rata-rata nasional dengan NTP sebesar 98,78. Dibandingkan dengan provinsi-provinsi tetangga yakni Provinsi Bali (NTP: 102,89) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTP: 100,54), daya beli petani di Nusa Tenggara Barat juga masih jauh tertinggal.

Untuk mengangkat daya beli para petani di Nusa Tenggara Barat, diperlukan upaya lebih serius dari pemerintah daerah beserta dinas/instansi terkait dalam pemberdayaan kegiatan pertanian. Dari sisi tata niaga, peran penting Bulog dalam menjaga kestabilan harga komoditas pertanian bahan makanan pada saat musim panen sangatlah penting agar petani dapat menikmati harga yang baik. Sementara dari sisi produksi, subsidi pemerintah daerah untuk sarana produksi merupakan salah satu cara untuk menekan tingginya biaya yang menjadi beban para petani.

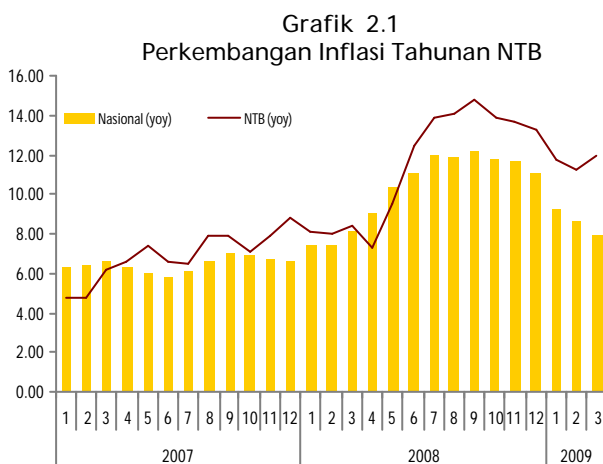
Dalam jangka panjang, kemampuan pemda beserta dinas/instansi terkait dalam menjaga kestabilan laju inflasi merupakan modal penting untuk terus meningkatkan daya beli/kesejahteraan petani. Selain itu, peningkatan produktivitas pertanian secara berkesinambungan merupakan nilai tambah yang diharapkan mampu lebih mendorong kenaikan daya beli/kesejahteraan para petani di Nusa Tenggara Barat.

# BAB 2 PERKEMBANGAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT

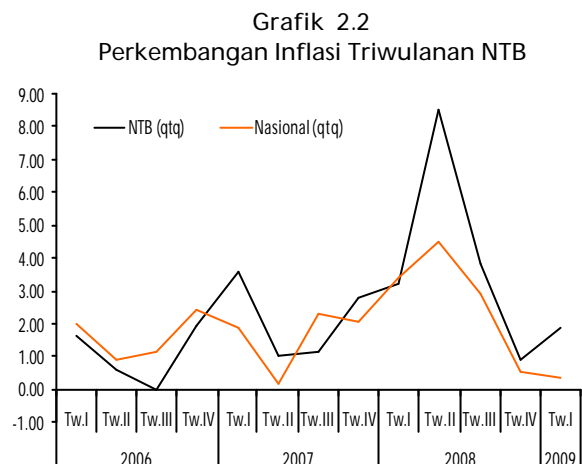
## 2.1 KONDISI UMUM

Sampai dengan Maret 2009, inflasi Nusa Tenggara Barat tercatat **11,89% (yoy)** lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2008 sebesar **13,29% (yoy)**. Penurunan laju inflasi dibandingkan akhir tahun sebelumnya antara lain dipengaruhi oleh penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) pada bulan Desember 2008, terjaganya pasokan bahan makanan, serta tidak adanya gejolak permintaan konsumsi rumah tangga sepanjang triwulan I-2009.

Secara triwulanan, laju inflasi pada triwulan ini mencapai **1,91% (qtq)** lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar **0,87% (qtq)**. Setelah mengalami perlambatan pada bulan Januari dan Februari, dengan inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,61% dan 0,45%, laju inflasi pada triwulan ini menunjukkan percepatan di bulan Maret dengan inflasi bulanan mencapai 0,86%. Meningkatnya tekanan inflasi di bulan Maret diperkirakan bersifat musiman seiring menipisnya persediaan beberapa jenis bahan makanan seperti beras maupun berkurangnya pasokan komoditas bumbu-bumbuan yakni cabe rawit yang banyak dikonsumsi rumah tangga di Nusa Tenggara Barat.



Sumber: BPS



Sumber: BPS

Berdasarkan kota pembentuk inflasi di Nusa Tenggara Barat, inflasi tertinggi dialami Kota Bima sebesar **14,14% (yoy)** sementara Kota Mataram hanya sebesar **11,18% (yoy)**. Tingginya inflasi di Kota Bima pada triwulan ini sangat dipengaruhi faktor musiman, yakni berkurangnya pasokan beras seiring belum adanya

kegiatan panen padi. Selanjutnya, untuk memenuhi permintaan beras di Kota Bima, para pedagang besar mengandalkan pasokan dari Pulau Lombok. Akibatnya, rata-rata harga beras di Kota Bima, dengan menambahkan komponen biaya transportasi, menjadi lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram. Namun demikian, tekanan inflasi dari harga beras tersebut akan menurun pada periode mendatang seiring tibanya musim panen padi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masing-masing diperkirakan pada bulan April dan bulan Mei.

## 2.2 INFLASI TRIWULANAN

Pada triwulan ini, kenaikan harga barang dan jasa dibandingkan triwulan sebelumnya mencapai 1,91% (qtq). Kenaikan tertinggi dialami kelompok bahan makanan (7,77%), kelompok sandang (3,85%), kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (1,75%). Di sisi lain, penurunan harga terjadi di kelompok transportasi (-4,01%), dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (-0,11%). Sementara kelompok barang dan jasa lainnya cenderung stabil dengan laju inflasi di bawah 0,5%. Sejalan dengan tingginya kenaikan harga yang terjadi di kelompok bahan makanan, sumbangan inflasi tertinggi berasal dari kelompok bahan makanan sebesar 1,98%. Sementara deflasi yang terjadi pada kelompok transportasi cukup signifikan menahan laju inflasi di triwulan ini dengan sumbangan deflasi sebesar -0,70%.

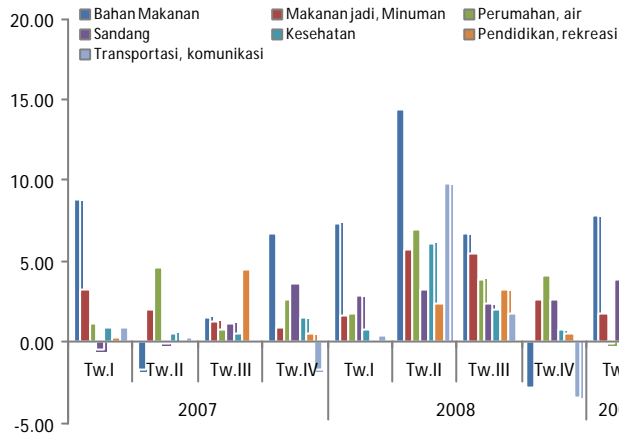
Tingginya inflasi pada kelompok bahan makanan diperkirakan bersifat sementara dipengaruhi faktor musiman. Musim panen padi yang diprediksi baru akan tiba pada bulan April dan bulan Mei masing-masing untuk areal sawah di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, menyebabkan pasokan beras mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan beras perlahan-lahan mendorong kenaikan harga beras pada periode Januari-Maret 2009. Selain itu, kenaikan harga juga ditunjukkan komoditas bumbu-bumbuan yakni cabe rawit yang mencapai puncaknya di pertengahan Maret untuk kemudian secara gradual menunjukkan kecenderungan penurunan.

Pada kelompok sandang, kenaikan harga utamanya terjadi pada komoditas emas perhiasan. Determinan inflasi komoditas tersebut bersumber dari *imported inflation* yakni tren kenaikan harga logam mulia di pasar dunia akibat perilaku investor global yang mempersepsikan logam mulia sebagai *safe haven* di saat ekonomi dunia dilanda krisis. Selain itu, kecenderungan pelemahan nilai rupiah pada periode yang sama turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan.

Penurunan tarif transportasi dan komunikasi yang terus terjadi sejak akhir tahun 2008 mampu menahan laju inflasi di triwulan I-2009 dengan sumbangan deflasi sebesar -0,70%. Penyesuaian tarif transportasi darat, laut, dan udara pasca penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) di bulan Desember 2008 menjadi salah satu determinan deflasi di kelompok transportasi dan komunikasi pada triwulan ini. Selain

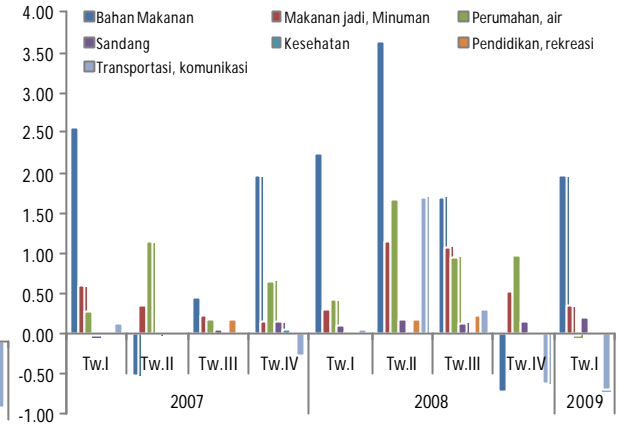
itu, perang tarif yang terus terjadi antara operator telepon seluler juga telepon sambungan tetap (fixed line) turut menekan laju inflasi di kelompok tersebut.

Grafik 2.3  
Inflasi Triwulanan Nusa Tenggara Barat



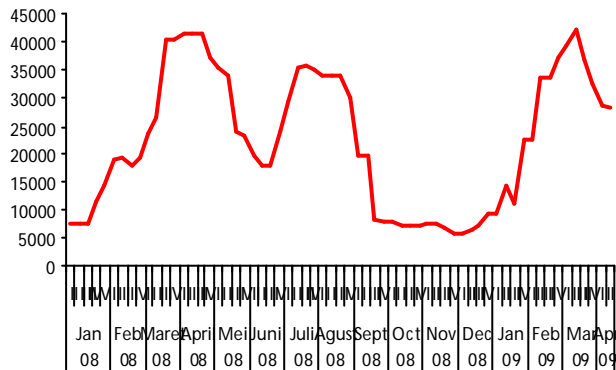
Sumber: BPS

Grafik 2.4  
Sumbangan Inflasi Triwulanan Nusa Tenggara Barat



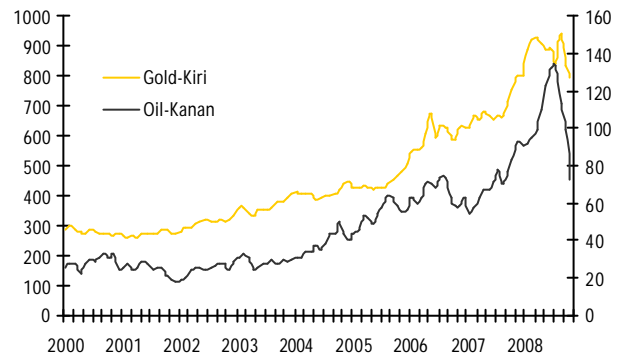
Sumber: BPS

Grafik 2.5  
Perkembangan Harga Cabe Rawit di NTB



Sumber: BPS

Grafik 2.6  
Harga Emas dan Minyak Mentah di Pasar Dunia



Sumber: CEIC

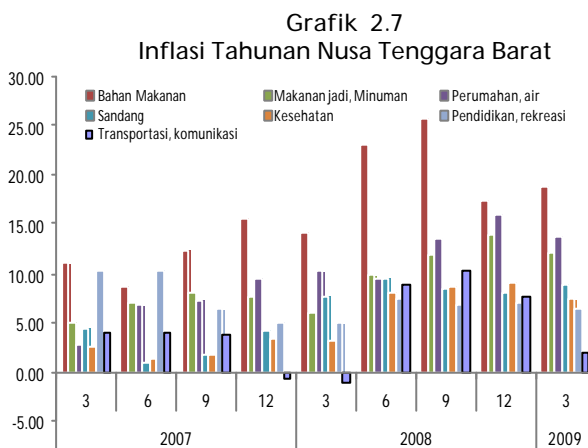
### 2.3 INFLASI TAHUNAN

Secara triwulanan, kenaikan harga barang dan jasa secara agregat di Nusa Tenggara Barat mencapai 11,89% (yoy) pada triwulan ini. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya (13,29%), namun masih lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional (7,92%). Inflasi tertinggi secara berurutan terjadi pada kelompok bahan makanan (18,97%), kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (13,81%), serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (12,10%). Laju inflasi terendah ditunjukkan kelompok transportasi dan komunikasi sebesar 1,92%. Sementara kelompok barang dan jasa lainnya mengalami kenaikan pada kisaran 6-8%.

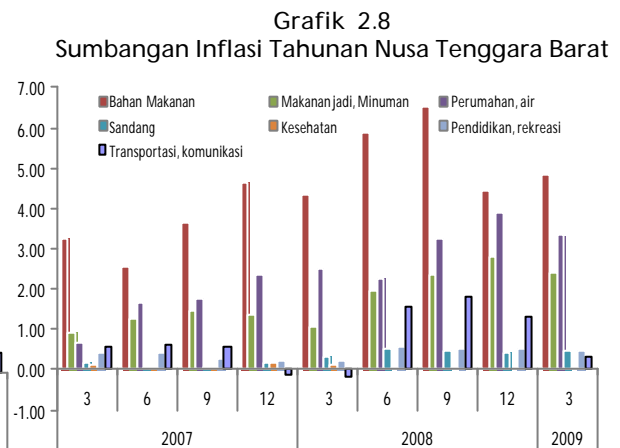


Berdasarkan sumbangannya, kelompok bahan makanan memberikan kontribusi inflasi tertinggi sebesar 4,82% diikuti kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar (3,33%), serta kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau (2,42%). Determinan inflasi pada kelompok bahan makanan utamanya berasal dari sisi penawaran. Pemberlakuan Instruksi Presiden No.8 Tahun 2008 perihal kenaikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah kering giling (GKG) dari Rp2.200 per kg menjadi Rp2.400 per kg yang efektif per Januari 2009, secara bertahap mendorong kenaikan harga beras pada triwulan I-2009. Selain itu, bergesernya musim panen padi di wilayah Pulau Sumbawa membuat persediaan beras di Kota Bima terus berkurang yang pada gilirannya mendorong tekanan inflasi komoditas beras di Kota Bima.

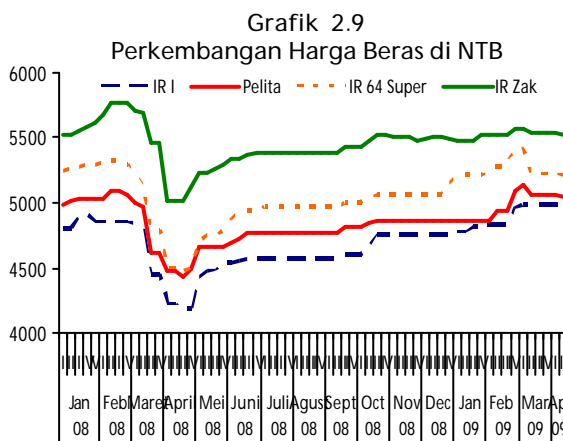
Laju inflasi yang masih tinggi pada kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar masih dipengaruhi harga bahan bakar minyak (BBM) pada triwulan I-2009 yang lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya. Namun demikian, inflasi tahunan untuk kelompok ini akan mulai terkoreksi pada triwulan II-2009 setelah harga BBM berada pada level pasca kenaikan BBM di Mei 2008. Selain itu, inflasi pada kelompok ini turut bersumber dari gejolak harga minyak tanah akibat terus berkurangnya kuota minyak tanah bersubsidi terkait program konversi minyak tanah ke LPG maupun bahan bakar alternatif lainnya.



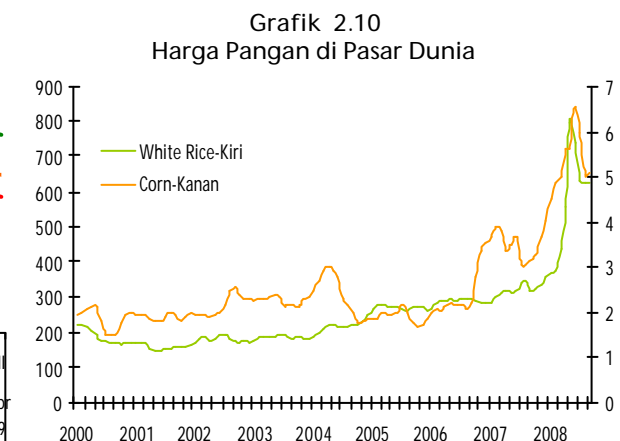
Sumber: BPS



Sumber: BPS



Sumber: BPS



Sumber: CEIC

## Boks 3

### Determinan Inflasi Nusa Tenggara Barat Pasca Perhitungan Inflasi di Kota Bima

Pada bulan Maret 2009 inflasi di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan mencapai 11,89% (yoy) dibandingkan inflasi bulan Februari 2009 yang mencapai 11,18% (yoy). Inflasi di Nusa Tenggara Barat mulai mengalami penurunan setelah meningkat tajam pasca kenaikan harga BBM pada bulan Mei 2008, yang mendorong inflasi NTB mencapai puncaknya pada bulan September 2008 sebesar 14,74% (yoy).

Secara umum pergerakan inflasi di NTB menunjukkan arah yang sama dengan pergerakan inflasi nasional. Selanjutnya, sejak bulan Juni 2008 terjadi kecenderungan pergerakan inflasi di NTB yang berada di atas laju inflasi nasional. Tingginya laju inflasi di NTB tersebut turut dipengaruhi tingginya laju inflasi Kota Bima yang mulai diperhitungkan dalam inflasi agregat NTB sejak bulan Juni 2008<sup>1</sup>.

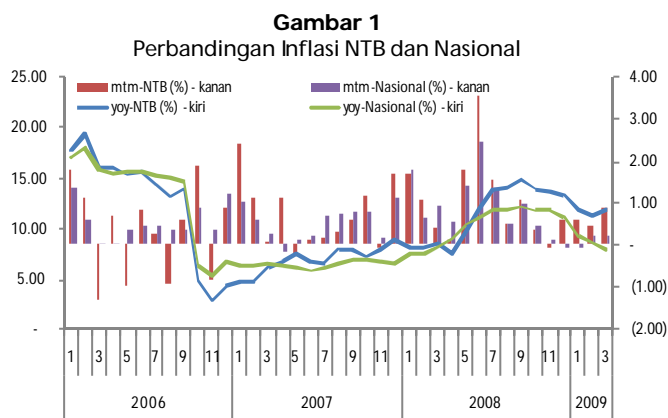
Selain itu, sejak Juni 2008 bobot perhitungan inflasi mengalami perubahan sesuai hasil Survei Biaya Hidup (SBH) 2007 yang dilaksanakan di 66 kota. Dalam SBH tahun 2007 bobot Kota Mataram adalah sebesar 0,79 turun dibandingkan pada SBH 2002 yang sebesar 1,07. Sedangkan Kota Bima yang sebelumnya tidak dihitung dalam perhitungan inflasi, dalam SBH 2007 bobotnya adalah sebesar 0,21. Walaupun mengalami penurunan bobot, laju inflasi Kota Bima yang relatif lebih tinggi dibandingkan Kota Mataram telah mendongkrak laju inflasi agregat Nusa Tenggara Barat sejak pertengahan tahun 2008.

Hasil SBH Tahun 2007 menunjukkan perubahan pola konsumsi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Kota Mataram yang mengalami peningkatan pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sedangkan konsumsi untuk kelompok bahan makanan cenderung menurun sebagaimana tercermin dari peningkatan bobot pada kelompok transportasi. Akibatnya, laju inflasi NTB secara tahunan hingga Maret

**Tabel 1.**  
Inflasi Mataram, Bima, Gabungan NTB, dan Nasional (Maret 2009)

	Inflasi m-t-m (%)	Inflasi y-o-y (%)
Mataram	0,79	11,29
Bima	1,07	14,14
Gabungan NTB	0,85	11,89
Nasional	0,22	7,92

Sumber : BPS



Sumber : BPS, diolah

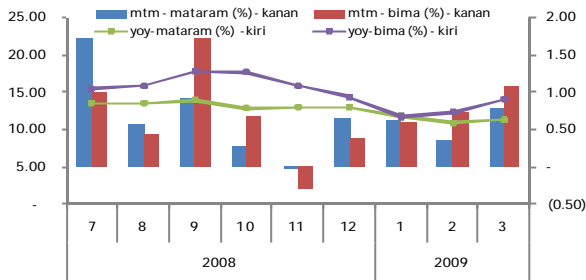
<sup>1</sup> Perhitungan Inflasi sejak Juni 2008 didasari oleh nilai konsumsi hasil Survei Biaya Hidup 2007

2009 yang belum sepenuhnya terlepas dari *multiplier effect* kenaikan harga BBM di bulan Mei 2008 masih berada pada level yang tinggi di kisaran 11%.

Perkembangan inflasi Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret 2009, menunjukkan inflasi di Kota Mataram mencapai 11,29% (yoy), meningkat dibanding inflasi Februari 2009 sebesar 10,87%. Hal serupa ditunjukkan oleh inflasi Kota Bima juga melonjak lebih tinggi dari 12,34% (yoy) pada bulan Februari 2009 menjadi 14,14% (yoy) di bulan Maret 2009.

**Gambar 2**

Perbandingan Inflasi Mataram dan Bima

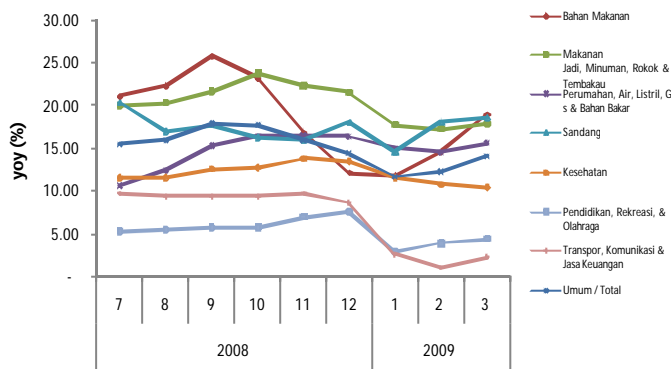


Sumber : BPS, diolah

Dari gambar 2, dapat dilihat bahwa inflasi Kota Bima cenderung lebih tinggi dibanding inflasi di Kota Mataram. Apabila di-breakdown berdasarkan kelompok komoditas, inflasi di Bima secara umum didominasi oleh kelompok Bahan Makanan dan Makanan Jadi, diikuti oleh kelompok komoditas lainnya, seperti perumahan air listrik gas & bahan bakar, sandang, kesehatan, pendidikan rekreasi & olahraga, serta transport komunikasi & jasa keuangan (Gambar 3). Hal ini sedikit berbeda dengan inflasi Kota Mataram yang didominasi oleh Bahan Makanan dan Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar.

**Gambar 3**

Komponen Inflasi di Kota Bima

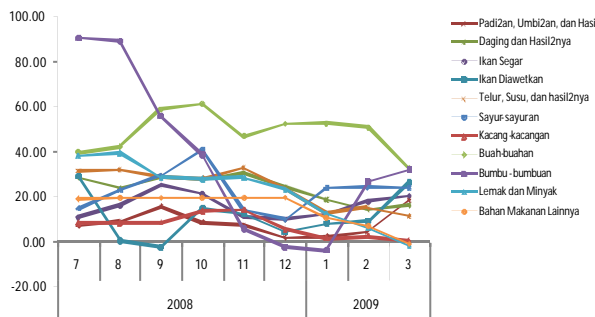


Sumber : BPS, diolah

kelompok komoditas makanan jadi, laju inflasi Kota Bima sangat dipengaruhi sub kelompok makanan jadi.

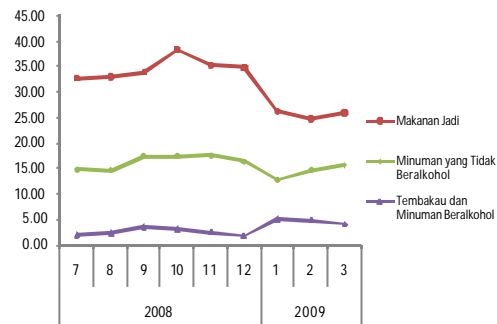
Dari kelompok komoditas bahan makanan, sub kelompok yang dominan mempengaruhi laju inflasi Kota Bima adalah buah-buahan dan bumbu-bumbu. Sedangkan untuk

**Gambar 4**  
Komponen Inflasi Kota Bima berdasarkan kelompok Bahan Makanan



Sumber : BPS, diolah

**Gambar 5**  
Komponen Inflasi Kota Bima berdasarkan kelompok Makanan Jadi



Sumber : BPS, diolah

Berdasarkan data publikasi BPS, komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi dari kota Bima menurut kelompok komoditas buah-buahan terutama adalah komoditas Apel. Sedangkan dari kelompok bumbu-bumbuan komoditas yang dominan menyumbang inflasi adalah Cabe Rawit, diikuti dengan Cabe Merah dan Bawang Merah (tabel 4). Hasil tersebut menunjukkan rentannya kedua kelompok komoditas tersebut di Kota Bima.

Kedua komoditas tersebut merupakan komoditas musiman, sehingga menyumbang inflasi yang cukup tinggi hanya pada bulan-bulan tertentu. Misalnya, untuk komoditas cabe rawit, pada bulan Agustus hingga Oktober 2008 komoditas tersebut tidak termasuk kedalam komoditas utama penyumbang inflasi. Namun pada bulan November 2008 hingga Maret 2009, komoditas tersebut selalu masuk kedalam daftar 20 komoditas utama. Dengan demikian ditenggarai masalah musiman dan kendala pasokan merupakan permasalahan utama inflasi di Kota Bima.

Sedangkan dari kelompok komoditas makanan jadi, minuman, rokok & tembakau, komoditas utama penyumbang inflasi di Kota Bima adalah Soto, Mie, dan komoditas-komoditas lain seperti dalam tabel 5.

**Tabel 4**  
Sub Komoditas Buah-buahan dan Bumbu-bumbuan  
yang masuk kedalam 20 Komoditas yang Dominan Memberikan Sumbangan Inflasi di Kota Bima

Sub Kelompok Komoditas	Periode								
	Jul-08	Aug-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08	Jan-09	Feb-09	Mar-09
Buah-buahan	Apel	Apel	Jeruk Nipis	Jeruk	Pisang	Apel	-	-	Pepaya
	-	Pisang	Jeruk	-	Apel	Anggur	-	-	Apel
	-	-	Apel	-	Jeruk	-	-	-	-
	-	-	-	-	Jeruk Nipis	-	-	-	-
Bumbu-bumbuan	Cabe Rawit				Cabe Rawit	Bawang Merah	Cabe Rawit	Cabe Rawit	Cabe Rawit
						Cabe Merah	Cabe Merah	Bawang Merah	Bawang Merah
							Cabe Rawit	Bawang Merah	

Sumber : BPS, diolah

**Tabel 5**  
Sub Komoditas Buah-buahan dan Bumbu-bumbuan  
yang masuk kedalam 20 Komoditas yang Dominan Memberikan Sumbangan Inflasi di Kota Bima

Sub Kelompok Komoditas	Periode								
	Jul-08	Aug-08	Sep-08	Oct-08	Nov-08	Dec-08	Jan-09	Feb-09	Mar-09
Makanan Jadi	Kue Basah	Biskuit	Ayam Goreng	Mie			Mie		Mie Kering Instant
				Sate					Soto
				Tempe					Bubur Kacang Hijau
				Soto					Nasi
								Sate	

Sumber : BPS, diolah

Untuk periode Januari-Maret 2009, komoditas dengan sumbangan inflasi tertinggi utamanya dialami oleh cabe rawit dan beras. Permasalahan tingginya sumbangan inflasi komoditas ini terhadap inflasi Nusa Tenggara Barat termasuk dalam pembahasan padarapat koordinasi TPID yang dilaksanakan pada 11 Maret 2009. Dalam forum tersebut, Dinas Pertanian menyampaikan salah satu penyebab peningkatan harga komoditas beras yakni implementasi Inpres No.8 tahun 2008 tentang peningkatan harga gabah dari Rp 2.200 per kg menjadi Rp 2.400 per kg.

Namun demikian, tekanan inflasi dari komoditas beras diperkirakan akan

menurun, sejalan dengan data dari Dinas Pertanian NTB yang mengindikasikan peningkatan gabah kering giling (GKG) pada bulan April dan Mei 2009 sejalan dengan datangnya panen raya. Kegiatan panen padi bulan April dan Mei 2009 diperkirakan sebesar 1,01 juta ton GKG atau ekuivalen dengan 56% sasaran produksi padi Provinsi NTB di tahun 2009.

Penyebab lain dari tingginya harga beras di Bima adalah pengiriman beras ke luar daerah NTB seperti Surabaya dan Kupang yang tidak termonitor dengan baik, yang menyebabkan berkurangnya pasokan di NTB. Dalam forum TPID juga dibahas perlunya penetapan peraturan yang mengatur tata niaga perdagangan antar pulau terutama bagi komoditas bahan makanan yang berkontribusi besar dalam pembentukan inflasi NTB.

Sementara untuk komoditas cabe rawit, peningkatan harga diperkirakan akibat berkurangnya pasokan cabe rawit di musim penghujan. Beberapa upaya telah dilakukan oleh Dinas Pertanian terkait kurangnya pasokan cabe rawit, salah satunya adalah menghimbau masyarakat untuk mengembangkan pola budidaya penanaman cabe rawit di tiap rumah tangga, sehingga saat musim hujan datang, permasalahan kekurangan pasokan dapat diminimalisir.

## Boks 4

# Cabe Rawit Sebagai Sub Komoditi Penyumbang Inflasi di Kota Mataram

### Pendahuluan

Cabe rawit (*Capsicum frutescens L.*) merupakan komoditas pertanian yang berasal dari daerah tropis di benua Amerika, tumbuh subur di daerah kering dan ditemukan pada ketinggian 0,5-1.250 meter di atas permukaan laut serta dapat diperbanyak dengan biji. Buahnya digunakan sebagai sayuran, bumbu masak, acar dan asinan sedangkan daun mudanya dapat dikukus untuk lalap. Karena merupakan bahan pangan yang dikonsumsi setiap saat, maka cabe akan terus dibutuhkan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Musim hujan sangat cocok untuk membuka lahan palawija cabe rawit karena kelembaban udara berpengaruh pada pertumbuhan tanaman itu sendiri. Cabe rawit sudah dapat dipetik pada umur kira-kira 80 – 90 hari. Berdasarkan pengalaman, cabe rawit dapat dipanen 15 kali - 18 kali. Namun demikian, cabe rawit adalah tanaman yang sangat peka terhadap air hujan sehingga curah hujan yang tinggi dapat berdampak pada membusuknya buah sebelum dipanen.

Hasil penelitian **Pengembangan Komoditas Unggulan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat**, yang merupakan kerjasama antara Bank Indonesia Mataram dengan Lembaga Penelitian Universitas Mataram pada tahun 2007, di antaranya mengenai produksi cabe rawit yang masuk dalam kelompok komoditi sayur-sayuran menunjukkan hasil sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1  
Produksi dan Luas Panen Cabe Rawit di NTB Tahun 2005 – 2007

No.	Daerah	Penelitian BLS*)				Data Dinas Pertanian Provinsi NTB					
		2005		2006		2006		2007		Perubahan 2006-2007	
		Luas Panen (ha)	Produksi (kwintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kwintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kwintal)	Luas Panen (ha)	Produksi (kwintal)	Luas Panen (%)	Produksi (%)
1	Kota Mataram	-	-	45	4,760	45	4,762	17	580	(62.2)	(87.8)
2	Kab. Bima	95	7,260	123	13,920	123	13,921	42	2,020	(65.9)	(85.5)
3	Kab. Dompu	239	4,780	188	3,760	188	3,760	274	13,840	45.7	268.1
4	Kab. Lotim	4,305	122,374	3,309	86,310	3,309	86,308	5,490	218,550	65.9	153.2
5	Kab. Loteng	478	13,377	462	11,300	462	11,300	351	17,280	(24.0)	52.9
	<b>Total</b>	<b>5,117</b>	<b>147,791</b>	<b>4,127</b>	<b>120,050</b>	<b>4,127</b>	<b>120,052</b>	<b>6,174</b>	<b>252,270</b>	<b>49.6</b>	<b>110.1</b>

\*) Base Line Survey

Sumber: BI dan Distan NTB

Dari Tabel 1 di atas, diketahui bahwa daerah penghasil cabe rawit terbesar di Provinsi NTB adalah Kabupaten Lombok Timur, kemudian Kabupaten Lombok Tengah, Bima, Dompu dan Kota Mataram. Secara garis besar, produksi cabe rawit di Provinsi NTB mengalami penurunan dari tahun 2005 ke tahun 2006. Sedangkan, tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan baik luas panen maupun produksi.

## Perkembangan Harga Cabe Rawit

Perkembangan laju inflasi barang dan jasa pada periode Januari 2007 hingga Maret 2009 menunjukkan hasil sebagaimana tercatat pada tabel 2 berikut ini. Tabel 2 menunjukkan bahwa cabe rawit, yang tergolong *volatile food*, adalah komoditi penyumbang inflasi di Kota Mataram yang menduduki urutan ke-3.

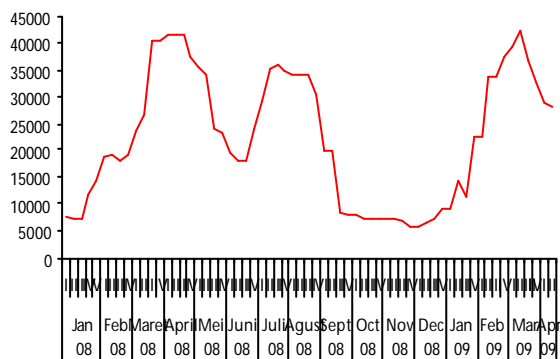
Tabel 2  
Komoditi Penyumbang Inflasi di Kota Mataram (Januari 2007-Maret 2009)

No.	Sub Komoditi
1	Minyak Goreng
2	Beras
3	Cabe Rawit
4	Tomat Sayur
5	Daging Sapi
6	Daging Ayam Ras
7	Tongkol
8	Kembung/Gembung
9	Emas Perhiasan
10	Semen

Sumber: BPS, diolah

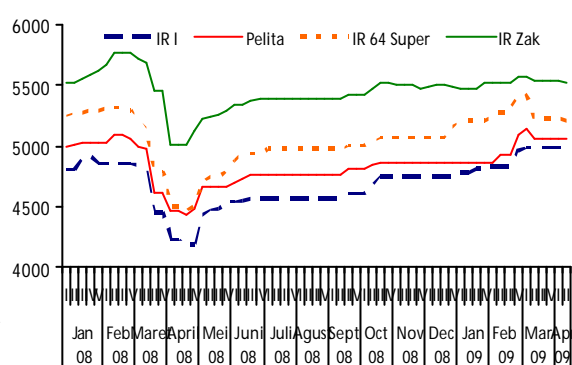
Pergerakan harga cabe rawit per kilogram di Kota Mataram sangat *volatile* mulai dari kisaran Rp5.000,00– Rp10.000,00 hingga mencapai Rp40.000,00-Rp45.000,00. Kenaikan harga cabe rawit ini pada tahun 2008 secara tajam terjadi pada bulan Maret-Mei 2008, Juli-September 2008. Sementara pada tahun 2009, lonjakan harga cabe rawit terjadi pada minggu IV Januari sampai dengan minggu II April 2009, dengan puncaknya pada minggu II Maret 2009 (grafik1) . Sedangkan pergerakan harga barang lainnya seperti beras cenderung stabil (grafik 2).

Grafik 1  
Perkembangan Harga Cabe Rawit di NTB



Sumber: BPS

Grafik 2  
Perkembangan Harga Beras di NTB



Sumber: BPS

## Determinan Harga Cabe Rawit

Tingginya harga cabe rawit pada triwulan pertama tahun 2009 sangat dipengaruhi faktor cuaca. Meningkatnya curah hujan pada periode tersebut, yang

dikonfirmasi data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), menyebabkan pembusukan cabe rawit sehingga pasokan cabe rawit menjadi berkurang. Hal tersebut diperparah dengan banjir yang sejumlah desa di lima kabuapten/kota di Nusa Tenggara Barat. Akibatnya, timbul tekanan inflasi dari komoditas cabe rawit sepanjang periode Januari-Maret 2009.

Sejalan dengan pola cuaca yang cenderung hujan pada triwulan pertama, pola tanam cabe rawit di Nusa Tenggara Barat umumnya baru dilakukan pada akhir bulan Maret. Pola tanam tersebut berlangsung hingga 3 bulan dengan periode panen setiap minggu pada periode tanam tersebut. Sepanjang periode tanam tersebut pasokan cabe rawit secara perlahan akan kembali meningkat dengan asumsi tidak ada kendala pada kegiatan tanam seperti yang terjadi pada tahun 2008. Kegiatan tanam cabe rawit di tahun 2008 yang dimulai pada bulan Maret terkendala faktor cuaca yakni curah hujan dengan intensitas tinggi. Sehingga harga cabe rawit pada periode Maret-Mei 2008 melonjak hingga 8 kali lipat harga normal. Pasokan cabe rawit dari luar Nusa Tenggara Barat utamanya dari Jawa Timur hanya mampu menurunkan lonjakan hingga 6 kali lipat pada periode Juli-September 2008.

### **Alternatif Solusi Mitigasi Tekanan Inflasi Cabe Rawit**

Dengan mencermati kondisi iklim dan pola tanam cabe rawit di Provinsi NTB, determinan penyebab inflasi cabe rawit di Kota Mataram disimpulkan bersifat sementara yang dipengaruhi faktor musiman.

Menyikapi hal tersebut peran pemerintah daerah dengan dinas pertanian dalam penerapan teknologi tepat guna untuk budidaya cabe rawit adalah hal penting. Pertama, teknologi pengeringan cabe rawit pada saat panen raya untuk menopang pasokan cabe rawit pada saat paceklik adalah salah satu alternatif solusi. Kedua, teknologi rumah kaca yang memungkinkan penanaman di saat curah hujan tinggi juga patut dilirik sebagai alternatif pemecahan masalah inflasi dari komoditas cabe rawit.

Penerapan kedua teknologi tersebut tentunya membutuhkan biaya investasi dan modal kerja yang tidak sedikit. Dengan demikian, dukungan APBD dalam jangka panjang, menjadi penting untuk kelangsungan penerapan teknologi pertanian cabe rawit tersebut.



# BAB 3

## PERKEMBANGAN PERBANKAN DAERAH

Kinerja perbankan di Nusa Tenggara Barat sampai dengan triwulan I 2009 terus menunjukkan peningkatan baik dari sisi aset, kredit maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) dengan kualitas kredit yang cukup moderat.

### 3.1 Intermediasi Perbankan

Pertumbuhan kinerja perbankan NTB sampai dengan triwulan I 2009 terus menunjukkan peningkatan, tercermin dari kenaikan aset perbankan menjadi sebesar Rp9,70 triliun atau sebesar 22,54% (yoy) meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 21,15%. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya penyaluran kredit perbankan NTB yang hingga triwulan I-2009 mencapai Rp6,64 triliun atau secara tahunan (yoy) meningkat sebesar 27,13% atau Rp1,42 triliun dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya 23,90%. Peningkatan penyaluran kredit tersebut diiringi pula dengan membaiknya kualitas kredit yang tercermin dari penurunan angka NPL dari sebesar 3,82% pada triwulan I-2008 menjadi 2,99% pada triwulan laporan, namun bila dibandingkan dengan triwulan IV-2008 sedikit meningkat yang tercatat sebesar 2,81%. Peningkatan penyaluran dana perbankan diikuti pula dengan kenaikan penghimpunan dana masyarakat sebesar Rp1.31 triliun atau 23,44% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan IV-2008 yang mencapai 18,16%. Namun pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) yang lebih kecil dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit mendorong meningkatnya *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan dari 93,29% pada triwulan I-2008 dan 95,45% pada triwulan IV-2008 menjadi 96,08% pada triwulan laporan.

Tabel 3.1.

Perkembangan Indikator Perbankan di NTB

(miliar Rp)

Indikator	2007				2008				2009
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1
1 Aset	6,939	7,291	7,539	7,575	7,919	8,398	8,875	9,177	9,704
<i>Growth % (yoy)</i>	22.10	21.30	19.26	12.58	14.12	15.19	17.73	21.15	22.54
2 Kredit	4,214	4,664	4,984	5,050	5,221	5,816	6,204	6,346	6,638
<i>Growth % (yoy)</i>	17.64	23.11	26.67	25.35	23.90	24.69	24.47	25.67	27.13
3 DPK	5,243	5,241	5,416	5,627	5,597	5,768	6,285	6,649	6,909
<i>Growth % (yoy)</i>	24.70	15.09	18.97	10.76	6.75	10.05	16.05	18.16	23.44
4 LDR (%)	80.38	88.98	92.03	89.74	93.29	100.82	98.71	95.45	96.08
5 NPL (%)	2.92	4.15	4.08	3.33	3.82	3.41	3.27	2.81	2.99

Sumber : KBI Mataram

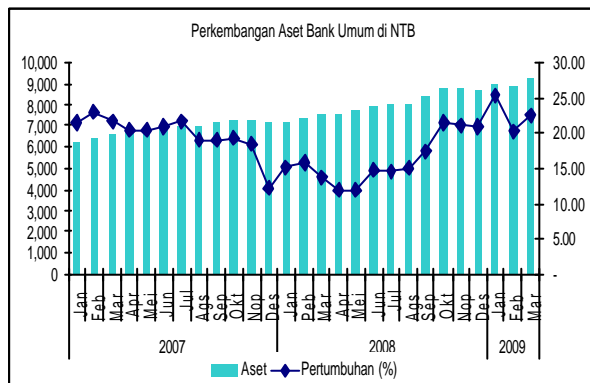
Tingginya laju ekspansi kredit pada triwulan I-2009 dibandingkan dengan triwulan I-2008, mengindikasikan bahwa perbankan masih mampu menangkap peluang usaha di masyarakat pada periode krisis ekonomi global, meskipun lebih didominasi penyaluran kredit untuk sektor konsumtif.

### 3.2. Perkembangan Bank Umum

#### 3.2.1. Perkembangan Aset

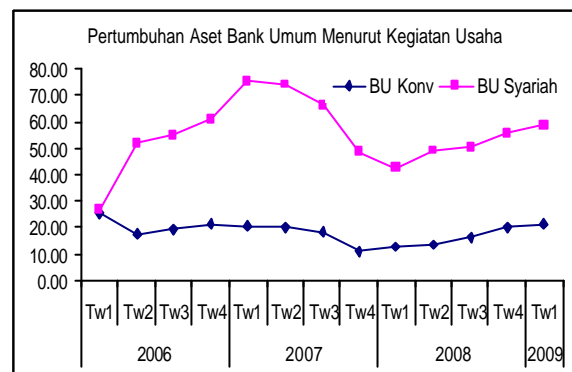
**Pertumbuhan Aset Bank Umum terus menunjukkan peningkatan di dorong oleh peningkatan dana milik pemerintah dalam bentuk giro.** Aset Bank Umum di NTB pada triwulan I 2009 mencapai Rp9,17 triliun atau tumbuh sebesar 22,54% meningkat dibandingkan triwulan I 2008 yang hanya mencapai 13,75%, namun dibandingkan dengan triwulan IV-2008 meningkat sebesar 5,91% (ytd) sedikit lebih tinggi dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya sebesar 4,55%. Peningkatan aset tersebut lebih disebabkan oleh adanya peningkatan dana milik pemerintah dalam bentuk giro, seiring dengan adanya transfer dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk tahun 2009.

Grafik 3.1.



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.2.



Sumber : KBI Mataram

Dari komposisi pembentukan aset bank umum di NTB sangat dipengaruhi oleh pembentukan aset bank milik pemerintah yang mencapai Rp7.27 triliun atau 79,28% dari total aset seluruh bank umum di NTB. Sementara itu, pembentukan aset bank swasta baru mencapai Rp1,90 triliun atau 20,72%. Besarnya pembentukan aset bank pemerintah tersebut dikarenakan jumlah kantor dan jaringan kantor yang lebih banyak dibandingkan bank swasta. Selain itu, sampai saat ini bank-bank pemerintah khususnya PT. Bank NTB (pangsa 30,19%) yang dimiliki oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota di NTB, masih menjadi pilihan utama bagi pemerintah provinsi NTB dan 9 pemerintah kabupaten/kota yang ada di NTB dalam melakukan transaksi keuangannya.

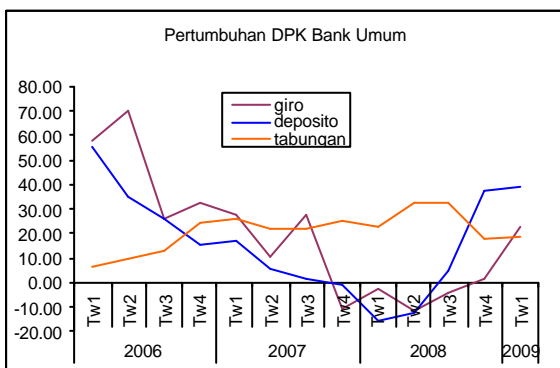
**3.2.2. Pengimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga pada triwulan I - 2009 mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 23,36% dengan nominal Rp6,61 triliun. Sebagian besar DPK ditempatkan dalam bentuk tabungan mencapai Rp3,44 triliun (52,03%). Pertumbuhan tabungan secara tahunan menurun dari 22,75% pada triwulan I-2008 menjadi 18,31%, sedangkan dibandingkan triwulan IV-2008 terjadi penurunan sebesar minus 10,78% (ytd) sedikit meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun sebelumnya tercatat sebesar minus 11,05%. Penurunan secara tahunan diperkirakan lebih disebabkan oleh pengalihan dana dari tabungan ke dalam bentuk deposito mengingat suku bunga yang diberikan lebih tinggi dari pada tabungan dan bahkan ada bank yang berani mematok suku bunga deposito mencapai 15% atau jauh di atas suku bunga penjaminan dari LPS untuk bank umum sebesar 8,25% posisi Maret 2009.

Hal ini tercermin dari peningkatan jumlah nominal deposito menjadi Rp1.35 triliun (39,07%) dibandingkan triwulan I-2008 yang sebesar Rp0,97 triliun dan dari sisi jumlah rekening terjadi kenaikan sebanyak 14.343 rekening yaitu dari 9.152 rekening menjadi 23.495 rekening. Dana jangka pendek lainnya yaitu giro mengalami pertumbuhan cukup signifikan yaitu dari minus 3,00% pada triwulan yang sama tahun sebelumnya menjadi 23,02%. Peningkatan giro lebih disebabkan realisasi dana perimbangan yang diperuntukkan bagi pemerintah daerah di NTB.

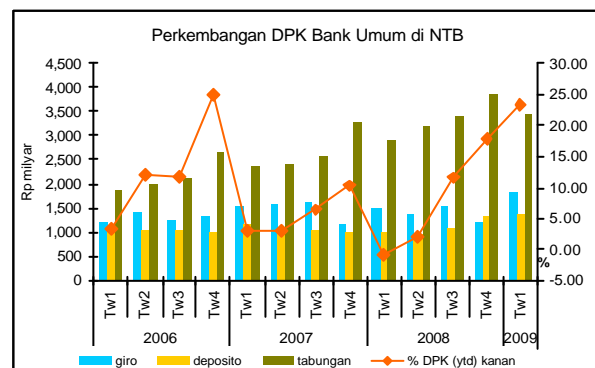
Banyaknya dana bersifat jangka pendek menunjukkan bahwa likuiditas perbankan masih memiliki risiko yang cukup tinggi dan berpotensi menciptakan *maturity mismatch*, mengingat kredit yang disalurkan bank umum jangka waktunya relatif lebih panjang. Hal ini dikonfirmasi dari jumlah simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu satu bulan yang mencapai 70,42% dari total deposito.

Grafik 3.3.



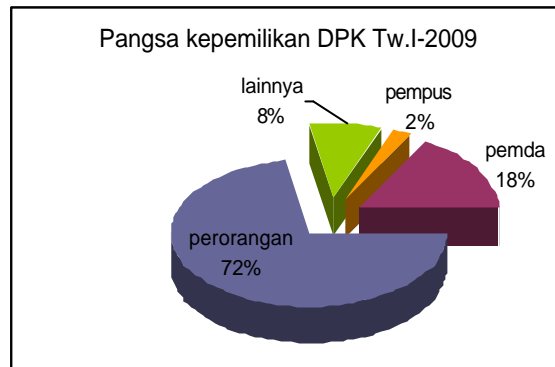
Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.4.



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.5.



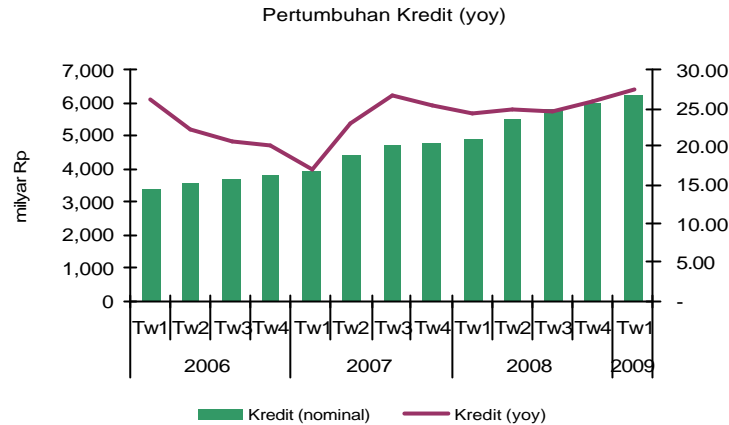
Sumber : KBI Mataram

### 3.2.3. Perkembangan Kredit Bank Umum

**Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan I-2009 yang diperkirakan tumbuh sebesar 6,25% juga dipengaruhi oleh pertumbuhan kredit bank umum di NTB dengan kualitas kredit tetap terjaga.** Pada triwulan I-2009 penyaluran kredit bank umum tercatat sebesar Rp6,24 triliun atau mengalami pertumbuhan secara tahunan (yoy) yang cukup besar, yaitu 27,49% dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 24,38%, sedangkan sampai dengan triwulan I-2009 tumbuh sebesar 4,50% (ytd). Pertumbuhan untuk kredit modal kerja, yaitu sebesar 1,40% (ytd) yang meningkat dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar minus 0,93% (ytd).

Tibanya musim panen di NTB dimana para pengusaha memerlukan modal usaha untuk membeli hasil panen ditengarai salah satu penyebab kenaikan KMK. Sedangkan kredit konsumsi tumbuh sebesar 7,96% (ytd) sedikit meningkat dibandingkan triwulan I-2008 sebesar 7,73% (ytd). Disisi lain, selama dua tahun terakhir pertumbuhan kredit investasi terus mengalami perlambatan bahkan pada triwulan laporan paling rendah mencapai minus 13,41% (ytd) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar minus 8,17%. Pola pertumbuhan kredit investasi yang sangat kecil menunjukkan iklim investasi di NTB masih kurang diminati. Hal ini disebabkan kendala infrastruktur seperti listrik dan jalan, perizinan dan permasalahan dengan masyarakat di sekitar lingkungan tempat berusaha termasuk masalah jaminan keamanan diperkirakan masih menjadi ganjalan utama para investor yang ingin menanamkan dananya di NTB.

Grafik 3.6



Sumber : KBI Mataram

Segmen pasar kredit konsumsi tetap menjadi primadona penyaluran kredit bank umum di NTB dengan pangsa mencapai 63,02%, disusul kredit untuk modal kerja dan investasi masing-masing mencapai 32,02% dan 4,96%. Pangsa kredit modal kerja sejak 2006 yang relatif stagnan dan kecilnya kredit investasi ini perlu mendapat perhatian dari manajemen bank agar terus menggali potensi penyaluran dana ke arah yang lebih produktif, mengingat kedua jenis kredit tersebut memiliki *multiplier effect* yang lebih besar dalam pertumbuhan ekonomi dibanding jenis kredit konsumtif. Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI) relatif memiliki respon yang lebih cepat dalam menggerakkan sektor riil yang pada akhirnya mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan menjadi salah satu solusi yang cepat dalam menyerap angkatan kerja.

Tabel 3.2

Pertumbuhan Kredit Bank Umum di NTB

Penyaluran Kredit	2006				2007				2008				2009	growth vtd
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4		
1 Menurut Jenis Penggunaan														
- Modal Kerja	41.88	32.18	34.06	31.33	23.55	28.95	26.03	18.46	11.72	13.50	11.43	13.22	27.49	1.40
- Investasi	21.15	16.54	8.72	11.26	16.47	3.12	(3.34)	1.43	(8.70)	(7.66)	(1.78)	-12.06	15.89	-13.41
- Konsumsi	17.99	17.18	14.95	14.26	12.37	22.82	33.48	36.00	41.05	38.55	37.84	40.30	-17.07	7.96
2 Menurut Sektor Ekonomi														
- Pertanian	63.68	17.13	4.48	8.50	(3.02)	25.01	13.85	1.87	(4.90)	0.51	(3.00)	-4.59	6.71	12.58
- Pertambangan	4.44	45.56	45.71	44.49	115.06	(30.47)	(42.30)	(35.88)	(57.99)	2.637.45	3.783.50	2.983.70	2.891.45	0.00
- Industri Pengolahan	59.02	73.01	57.38	34.05	5.83	9.46	3.47	10.28	11.09	12.36	21.37	41.64	13.46	-10.14
- Listrik, Gas dan Air	67.23	21.70	28.76	25.00	(22.76)	(28.75)	(34.64)	(34.45)	(27.99)	(51.59)	(35.28)	-36.83	-21.01	0.00
- Konstruksi	55.51	64.25	112.69	74.87	98.48	65.31	42.24	(19.01)	(41.09)	(1.33)	(14.48)	45.44	64.47	-2.00
- Perdaa, Hotel & Rest	38.30	28.72	32.26	31.08	22.76	23.52	15.80	9.41	12.38	12.45	12.45	13.64	9.59	0.35
- Peraanakt & Komunik	10.02	11.99	(6.90)	(10.25)	1.25	13.57	16.62	36.73	42.17	22.62	29.09	4.62	14.44	16.22
- Jasa dunia usaha	14.08	38.36	2.04	3.36	23.16	6.58	38.73	82.56	21.26	18.31	22.12	-9.91	-13.00	-20.39
- Jasa sosial	(6.59)	(1.28)	4.00	6.34	36.15	46.28	70.43	82.50	(37.05)	(48.73)	(55.67)	-59.10	16.83	0.00
- Lain-lain	17.90	16.86	14.96	14.35	12.48	22.66	33.27	35.69	40.76	38.42	38.39	40.59	40.86	7.93

Sumber : KBI Mataram

Pertumbuhan kredit konsumsi yang semakin meningkat sejak triwulan II-2007 menunjukkan bahwa pangsa pasar yang besar disertai pola konsumsi masyarakat NTB yang cenderung konsumtif menjadi daya tarik kuat bagi industri perbankan. Akibat kondisi tersebut, persaingan yang cukup tinggi di segmen yang sama mendorong bank untuk mencari alternatif pembiayaan dan fasilitas yang diminati oleh masyarakat, seperti kemudahan untuk memperoleh kartu kredit dan kemudahan dalam proses pengajuan kredit yang relatif lebih singkat.

Tabel 3.3.

Perkembangan Kredit Bank Umum di NTB

Penyaluran Kredit	2006				2007				2008				2009	
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	% (yoy)
1 Menurut Jenis Penggunaan	3.367	3.562	3.698	3.782	3.938	4.380	4.685	4.747	4.898	5.462	5.838	5.975	6.245	27.49
- Modal Kerja	1.250	1.316	1.408	1.470	1.544	1.697	1.774	1.742	1.726	1.927	1.977	1.972	2.000	15.89
- Investasi	352	381	395	401	409	393	382	407	374	363	375	358	310	-17.07
- Konsumsi	1.766	1.864	1.895	1.910	1.984	2.290	2.529	2.598	2.799	3.172	3.486	3.645	3.935	40.60
2 Menurut Sektor Ekonomi														
- Pertanian	173	150	149	155	168	188	170	158	159	189	165	151	170	6.71
- Pertambangan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	7	8	7	7	2.891.45
- Industri Pengolahan	46	47	48	44	49	51	49	49	55	57	60	69	62	13.46
- Listrik, Gas dan Air	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	-21.01
- Konstruksi	51	52	81	85	101	86	115	69	60	85	98	100	98	64.47
- Perdaa, Hotel & Rest	1.128	1.199	1.305	1.367	1.385	1.481	1.512	1.496	1.557	1.666	1.700	1.700	1.706	9.59
- Peraanakt & Komunik	26	26	27	26	26	30	31	35	38	36	40	37	43	14.44
- Jasa dunia usaha	126	164	128	125	155	175	178	229	189	207	217	206	164	-13.00
- Jasa sosial	44	49	56	59	60	72	95	108	38	37	42	44	44	16.83
- Lain-lain	1.770	1.871	1.902	1.918	1.991	2.295	2.534	2.602	2.803	3.177	3.507	3.658	3.948	40.86
3 Suku bunga kredit (%)														
- Modal Kerja	16.73	16.91	16.95	16.64	16.11	15.93	15.36	15.18	14.81	14.22	14.64	15.62	15.97	
- Investasi	16.45	16.28	16.26	16.11	15.63	15.6	15.21	15.10	14.42	14.44	14.50	15.58	15.26	
- Konsumsi	15.42	15.45	15.36	15.39	14.93	14.58	14.3	14.16	13.89	13.75	13.78	13.90	13.96	

Sumber : KBI Mataram

Penurunan suku bunga acuan BI rate hingga menjadi 7,75% pada Maret 2009 belum direspon oleh perbankan NTB dengan penurunan suku bunga kredit yang masih di kisaran 15 – 16% untuk KMK dan KI dan 13 – 14% untuk kredit konsumsi, namun untuk suku bunga simpanan telah menunjukkan kecenderungan penurunan yang tercermin dari rata-rata suku bunga deposito posisi Desember 2008 sebesar 9,33% menjadi 8,68% pada Maret 2009.

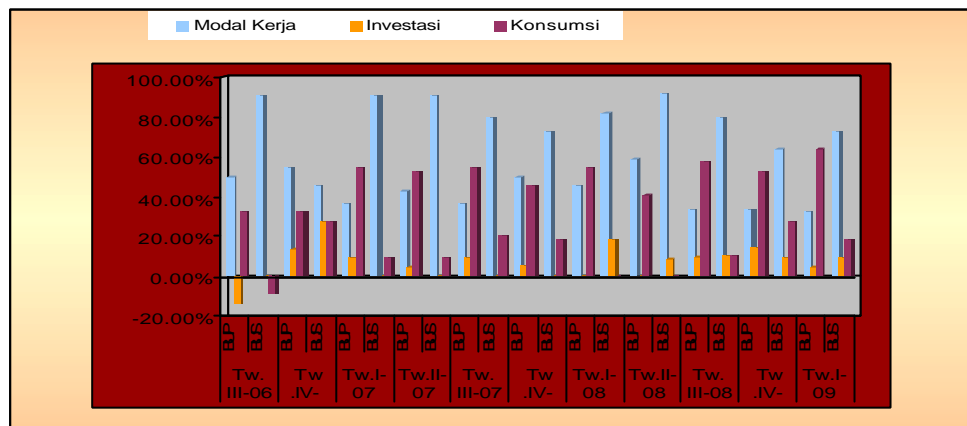
Peningkatan penyaluran kredit tersebut sejalan dengan hasil survei opini pimpinan/pejabat bank umum yang menyatakan bahwa permintaan kredit pada triwulan I 2009 meningkat dijawab oleh 58,33% responden dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya dijawab 55,88% responden. Penyebab utama meningkatnya permintaan kredit dikarenakan membaiknya prospek usaha nasabah seiring dengan telah direalisasikannya APBD dan kenaikan gaji PNS yang direspon perbankan untuk peningkatan plafond kredit, meskipun persyaratan kredit masih cukup ketat.

Selain terjadinya peningkatan permintaan kredit, kondisi ekonomi NTB juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah permohonan kredit baru yang meningkat jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Secara internal bank umum, 45% responden menyatakan bahwa peningkatan permohonan kredit baru dikarenakan permodalan yang cukup dan 30% responden menyatakan adanya perbaikan mengenai kualitas portofolio kredit serta 15% responden menyatakan likuiditas yang mencukupi. Secara eksternal, 61%

responden menyatakan prospek usaha nasabah meningkat dan 28% responden menyatakan kondisi ekonomi membaik.

Penyaluran kredit bank umum di NTB secara sektoral pada triwulan I-2009 masih didominasi untuk sektor-sektor primadona yaitu perdagangan, hotel dan restoran (27,32%), pertanian (2,72%), jasa dunia usaha (2,63%) dan konstruksi (1,58%). Pola penyebaran kredit tersebut relatif tidak berubah dibandingkan periode-periode sebelumnya, mengingat karakteristik perekonomian NTB yang digerakkan oleh 3 sektor andalan yaitu pertanian, pertambangan dan perdagangan, hotel dan restoran.

Grafik 3.7  
Prioritas Penyaluran Kredit



Sumber : KBI Mataram

### 3.2.3. Risiko Kredit

Risiko kredit bank umum di NTB relatif terjaga, ditunjukkan oleh rasio *Non Performing Loan* (NPL) yang secara umum masih stabil dibawah level 3%, yaitu sebesar 2,55% lebih rendah dibandingkan triwulan yang sama tahun lalu yaitu 3,34%. Selain ekspansi kredit, faktor lainnya yang mempengaruhi perbaikan kualitas kredit di antaranya adalah semakin intensifnya penagihan kredit bermasalah dan upaya restrukturisasi kredit nasabah-nasabah besar. Di samping itu, perbankan relatif konsisten dalam menerapkan penilaian risiko dalam menyalurkan kredit baru serta mengedepankan *prudential banking* (prinsip kehati-hatian). Ke depan, perbankan tetap harus mencermati potensi meningkatnya kredit non lancar sebagai dampak dari krisis keuangan global yang belum diketahui kapan berakhirnya dan faktor gejolak kurs nilai rupiah akan menjadi pemicu tersendatnya angsuran kredit perbankan, apabila penyaluran kredit diarahkan pada produksi barang ekspor yang ditujukan pada negara yang terkena dampak krisis.

Pada triwulan laporan, sektor ekonomi yang NPL-nya meningkat dibandingkan triwulan IV-2008 yaitu sektor pertambangan, konstruksi, jasa dunia usaha dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, sedangkan yang turun cukup signifikan adalah sektor pengangkutan dan komunikasi dan jasa sosial.

Tabel 3.4.  
Perkembangan Kualitas Kredit Bank Umum di NTB

Kolektibilitas Kredit	2007				2008				2009
	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Tw1
1 NPL (nominal Rp jutaan)	93.351	159.999	170.851	137.930	163.720	160.698	162.957	141.317	159.341
NPL (%)	2.37	3.65	3.65	2.91	3.34	2.94	2.79	2.36	2.55
2 NPL per kelompok bank (%)									
- Bank Pemerintah	2.65	4.21	4.11	2.91	3.34	3.33	3.20	2.36	2.55
- Bank Swasta	1.10	1.11	1.58	3.18	3.65	1.08	0.92	1.55	1.50
3 NPL kredit per jenis pendaan (%)									
- Modal Kerja	3.48	6.65	6.88	5.39	6.43	5.82	5.85	5.10	5.55
- Investasi	3.17	4.53	4.68	2.97	4.87	4.25	4.11	3.18	4.18
- Konsumsi	1.34	1.28	1.22	1.23	1.24	1.05	0.91	0.80	0.90
4 NPL kredit per sektor ekonomi (%)									
- Pertanian	2.69	5.74	7.70	3.71	4.36	3.79	8.45	7.05	7.19
- Pertambangan	-	83.67	-	100.00	92.74	0.00	0.00	0.00	25.20
- Industri Pengolahan	0.34	14.23	15.68	2.03	2.27	1.84	1.62	0.74	0.70
- Listrik, Gas dan Air	-	-	-	0.00	0.00	0	0	0	0
- Konstruksi	3.19	13.85	12.51	8.50	12.67	9.76	7.19	6.29	7.24
- Perdag. Hotel & Rest	3.83	6.26	6.26	5.78	6.82	6.28	5.99	5.37	5.60
- Pendaanakt & Komunik	0.75	1.77	1.57	1.73	1.35	0.49	0.36	1.10	0.91
- Jasa dunia usaha	2.71	3.21	4.51	1.94	2.36	2.25	2.34	0.50	3.04
- Jasa sosial	1.60	1.41	0.93	0.99	4.05	2.72	2.64	2.10	1.41
- Lain-lain	1.36	1.31	1.25	1.25	1.25	1.06	0.94	0.82	0.92

Sumber : KBI Mataram

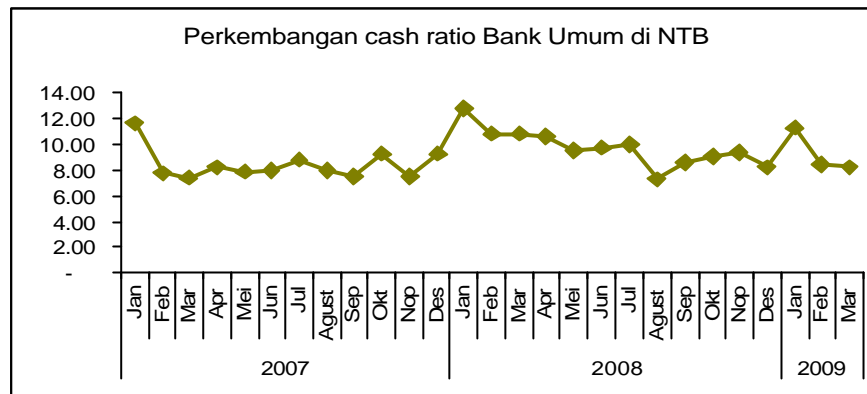
### 3.2.4. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas perbankan pada triwulan I-2009 masih rendah. Pengelolaan likuiditas yang baik akan terlihat dari kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Apabila likuiditas tidak dikelola dengan baik, bank akan dihadapkan pada risiko-risiko yang dapat mempengaruhi kelangsungan usahanya.

Indikator likuiditas perbankan yang tercermin dari DPK yang dihimpun dan kredit yang disalurkan masih baik meski sedikit menurun. Krisis keuangan global yang melanda perbankan nasional tidak begitu terasa dampaknya di perbankan NTB. Meskipun demikian, dampak krisis ini diduga sedikit mengganggu likuiditas perbankan NTB pada triwulan III-2008 yang ditandai dengan semakin mengecilnya rasio kas bank (*cash ratio*) yaitu dari 10,81% (Maret 2008), 8,28% (Des 2008) menjadi 8,22% (Maret 2009). Secara sederhana, *cash ratio* diukur dari penjumlahan kas, giro bank di Bank Indonesia dan penempatan pada bank lain dibagi jumlah DPK yang dihimpun.



Grafik 3.8



Sumber : KBI Mataram

Dilihat dari segi waktu, hampir seluruh DPK bank umum di NTB adalah dana jangka pendek. Komposisi DPK secara berurutan adalah simpanan tabungan (52,03%), simpanan giro (27,63%) dan simpanan deposito (20,35%), di mana simpanan deposito dengan jangka waktu 1 bulan mencapai 70,42%. Melihat struktur pendanaan bank umum tersebut, menjadikan perbankan cukup hati-hati dalam menanamkan dananya dalam bentuk kredit yang diberikan. Kehati-hatian perbankan tersebut tercermin dari dominasi penyaluran kredit untuk sektor konsumsi yang cukup besar dan umumnya diperuntukkan bagi pegawai negeri dengan pembayaran angsuran melalui pemotongan gaji. Porsi terbesar kedua adalah kredit modal kerja yang berjangka waktu pendek. Sementara itu, kredit investasi porsinya cukup kecil dan pertumbuhannya juga relatif lamban, karena sifatnya yang jangka panjang dengan risiko kredit yang lebih besar. Risiko likuiditas masih relatif kecil, mengingat cash ratio bank umum cukup optimal meskipun LDR bank umum mencapai 94,42%.

### 3.2.5. Risiko Pasar

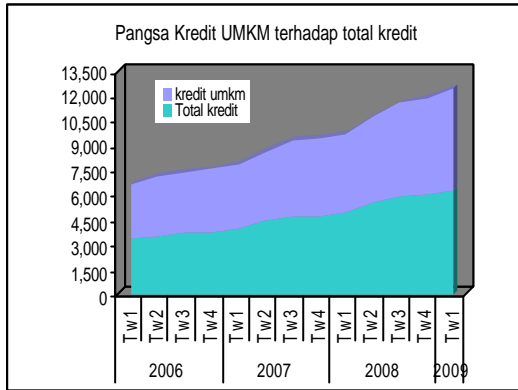
Risiko pasar bank umum di NTB relatif rendah yang tercermin pada suku bunga dan nilai tukar. Dari sisi suku bunga, seiring dengan penurunan suku bunga acuan BI rate, respon penurunan suku bunga DPK lebih cepat, dibandingkan dengan penurunan suku bunga kredit yang biasanya akan direspon pada triwulan berikutnya dan lebih kecil, sehingga *spread* suku bunga relatif terjaga. Dengan kondisi tersebut maka fluktuasi suku bunga secara keseluruhan masih dapat dihadapi oleh bank. Kemungkinan risiko yang dihadapi bank hanya berkurangnya margin keuntungan yang diterima.

### 3.3. Perkembangan Kredit UMKM

Sampai dengan triwulan I-2009, perkembangan kredit usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) terus menunjukkan peningkatan. Dengan tingkat pertumbuhan kredit mencapai 28,19% (yoy) mampu memperluas pangsaanya terhadap total kredit

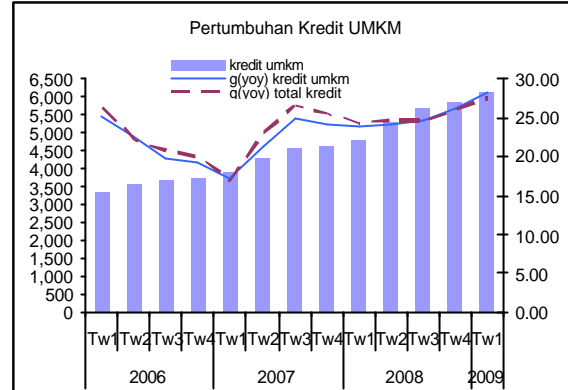
hingga 98,78% secara nominal sebesar Rp6,17 triliun. Menandakan bahwa hampir seluruh kredit yang disalurkan oleh bank umum di NTB dengan plafond kurang dari Rp5 miliar.

Grafik 3.9



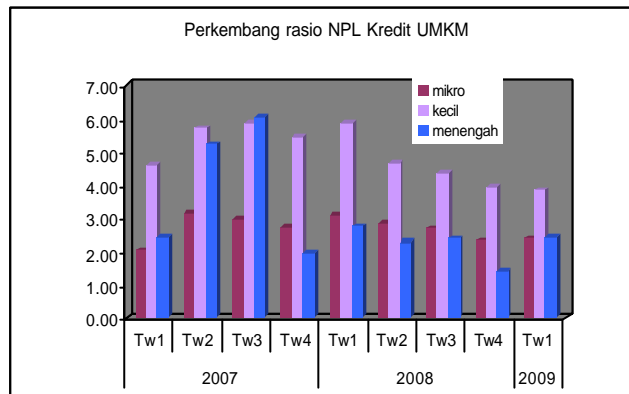
Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.10



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.11



Sumber : KBI Mataram

Menurut skala kreditnya, 75,06% penyaluran kredit UMKM disalurkan dalam bentuk kredit mikro atau sebesar Rp4,69 triliun, sedangkan untuk kredit kecil dan menengah memiliki pangsa 11,66% dan 12,06%. Secara nominal, kredit untuk usaha kecil mencapai sebesar Rp0,73 triliun dan kredit untuk usaha menengah sebesar Rp0,75 triliun.

Berdasarkan jenis penggunaan, penyaluran kredit UMKM masih didominasi oleh kredit konsumsi dengan nominal kredit sebesar Rp3,93 triliun dengan pangsa 63,68% dari total kredit UMKM yang telah disalurkan, diikuti dengan kredit modal kerja sebesar Rp1,97 triliun dengan pangsa 31,91% sedangkan kredit investasi sebesar Rp0,27 triliun dengan pangsa 4,41%.

Bank Indonesia melakukan berbagai upaya untuk mendukung potensi sektor UMKM di NTB yang cukup besar, antara lain melalui pemberian bantuan teknis, fasilitasi yang bertujuan memperbaiki *assymetric information* antara perbankan dengan sektor riil serta pelaksanaan penelitian yang bertujuan untuk mendorong pengembangan komoditas tertentu. Sementara itu, kebijakan perbankan juga turut

mendorong berkembangnya UMKM dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/1/DPNP, yang menetapkan bobot risiko dalam perhitungan aktiva kredit usaha rakyat (KUR) sebesar 20%. Diharapkan dengan ditetapkannya ketentuan tersebut dapat mendorong perbankan lebih banyak menyalurkan kredit mikro dengan skema penjaminan.

Selain itu, penandatanganan perjanjian kerjasama antara Bank Indonesia Mataram dengan Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Lombok Timur dan PT. Agrindo Nusantara tentang pengembangan klaster budidaya tanaman tomeo di kawasan Sembalun dan sekitarnya, di Kabupaten Lombok Timur yang dilaksanakan pada awal tahun 2009, diharapkan dapat meningkatkan kinerja UMKM yang berada dalam klaster budidaya tomeo, guna peningkatan kualitas, kuantitas, produktivitas tomeo, adanya jaminan pasar dan mengoptimalkan serta meningkatnya kemampuan sumber daya petani yang diharapkan dapat mendorong peran perbankan dan/atau lembaga pembiayaan lainnya dalam memberikan pembiayaan kepada petani tomeo.

Program pemerintah untuk meningkatkan akses usaha mikro ke perbankan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sumber dananya 100% merupakan dana murni perbankan, dan 70% risiko kredit bermasalah-nya ditanggung pemerintah melalui Askrido dan Perusahaan Sarana Penjaminan Usaha telah direspon realisasinya di NTB. Dana yang telah tersalur melalui program ini oleh tigabelas bank umum di NTB hingga triwulan I-2009 tercatat sebesar Rp124,66 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 17.902.

### 3.4. Perkembangan Bank Syariah

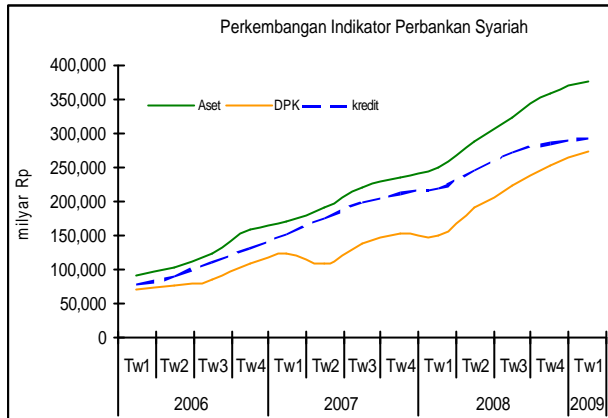
**Pada triwulan I2009, perkembangan industri perbankan syariah terus mencatatkan perkembangan yang menggembirakan yang tercermin dari pertumbuhan aset, dana pihak ketiga maupun pembiayaan.** Hal ini mengindikasikan perbankan syariah memiliki potensi yang cukup besar untuk berkembang di NTB. Sampai dengan triwulan I-2009, aset bank syariah mampu tumbuh sebesar 52,28% (yoy) atau tumbuh sebesar 5,43% (ytd), dari Rp247,69 miliar pada triwulan I-2008 menjadi Rp377,19 miliar pada triwulan laporan. Jumlah tersebut menurun dibandingkan pertumbuhan triwulan IV 2008 yang mencapai 52,58% (yoy).

Sementara itu, pangsa aset perbankan syariah terhadap total aset perbankan di NTB baru mencapai 3,89% dan masih dibawah target indikatif aset perbankan syariah yang ditetapkan sebesar 5%.

Dilain sisi, pertumbuhan pembiayaan tercatat mengalami peningkatan hingga mencapai 33,60% (yoy) dengan nominal pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp292,69 miliar. Sejalan dengan peningkatan DPK menjadi sebesar Rp273,43 miliar dengan tingkat pertumbuhan yang mencapai 83,47% (yoy).

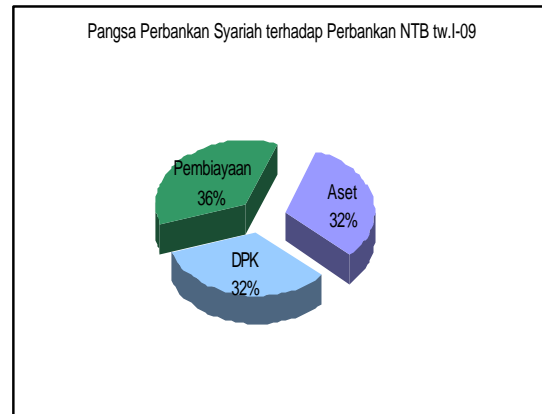
Tingkat pertumbuhan DPK yang lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pembiayaan yang diberikan menyebabkan *Financing Deposit Ratio* (FDR) perbankan syariah NTB pada triwulan I-2009 menurun sebesar 107,04%, lebih rendah dibandingkan pencapaian pada triwulan yang sama tahun lalu sebesar 146,99%.

Grafik 3.12



Sumber : KBI Mataram

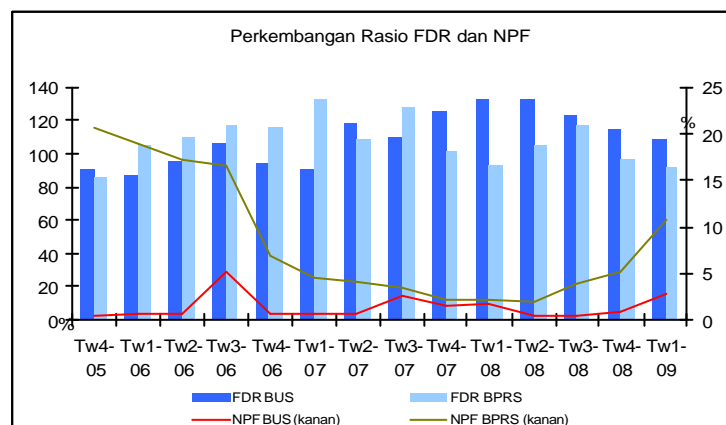
Grafik 3.13



Sumber : KBI Mataram

Sementara itu, risiko pembiayaan baik bank umum syariah maupun BPR Syariah di NTB pada triwulan I-2009 mengalami kenaikan. Hal itu ditunjukkan oleh rasio gross *Non Performing Financing* (NPF) bank umum syariah sebesar 2,86%, meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 1,75%. Sedangkan NPF BPR syariah meningkat tajam mencapai 10,77% di triwulan laporan, jauh lebih tinggi dibanding triwulan yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,16%.

Grafik 3.14



Sumber : KBI Mataram

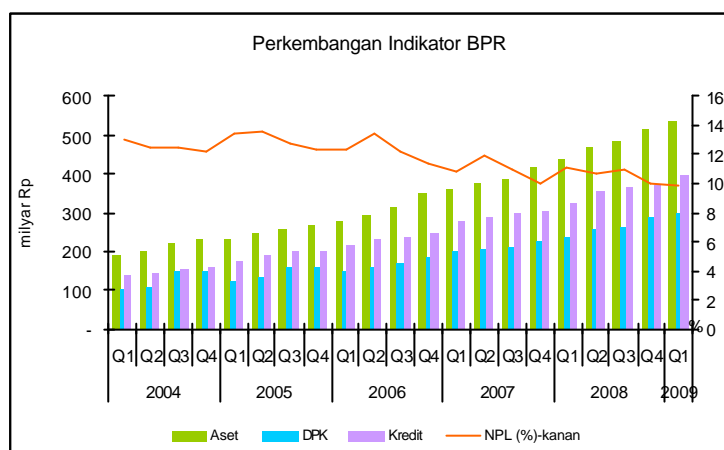
### 3.5. Perkembangan Bank Perkreditan Rakyat

Ekspansi kredit yang dilakukan BPR juga tetap berkualitas dengan angka rasio NPL yang cenderung menurun dan ditujukan kepada sektor yang

**produktif.** Perkembangan indikator BPR di wilayah kerja Bank Indonesia Mataram selama triwulan I-2009 menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah kantor, belum ada penambahan yaitu masih terdapat 68 BPR dengan 77 jumlah kantor, serta 3 BPR yang beroperasi secara syariah. Proses intermediasi BPR berjalan cukup baik seiring dengan perbaikan kualitas kredit.

Total aset BPR pada triwulan laporan tercatat sebesar Rp531 miliar atau meningkat sebesar 22,50% dibandingkan dengan triwulan I-2008. Namun jika dibandingkan akhir tahun lalu meningkat hanya sebesar 2,83% (ytd). Peningkatan tersebut lebih banyak bersumber dari dana pihak ketiga yang meningkat sebesar 25,44% sehingga menjadi Rp296 miliar. Suku bunga yang relatif lebih tinggi dan kemudahan pelayanan setoran nasabah menjadi daya tarik BPR dalam menyedot dana masyarakat.

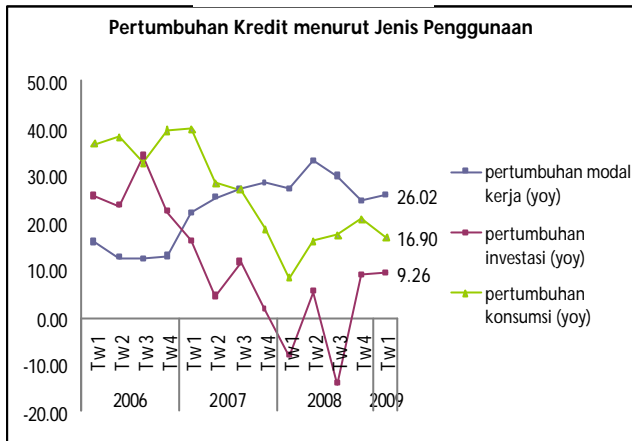
Grafik 3.15



Sumber : KBI Mataram

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit modal kerja menjadi penyumbang terbesar kredit BPR. Kredit yang disalurkan BPR di NTB sampai dengan triwulan I-2009 sebesar Rp393 miliar, dengan pangsa kredit modal kerja mencapai 58,27%, kredit investasi 4,33% dan konsumtif sebesar 37,40%. Meskipun BPR memiliki kegiatan operasional yang sama dengan bank umum, namun BPR memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank umum. BPR memiliki prosedur pemberian kredit yang lebih cepat dan BPR lebih mengutamakan pendekatan personal. Banyaknya usaha mikro dan kecil yang dimiliki masyarakat NTB menjadi faktor pemicu tingginya penyaluran kredit ke modal kerja. Namun demikian bila dilihat secara sektoral, sektor perdagangan, hotel dan restoran menempati ranking pertama bagi BPR dalam menyalurkan kreditnya yaitu sebesar Rp175 miliar atau 44,53%, kemudian diikuti sektor lain-lain sebesar Rp164 miliar atau 41,73%.

Grafik 3.16

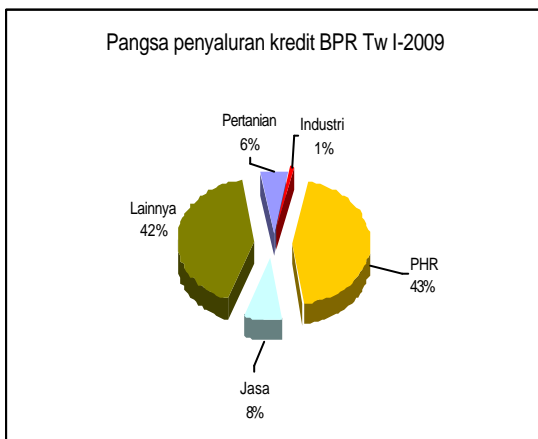


Sumber : KBI Mataram

Fungsi intermediasi BPR pada triwulan ini mengalami penurunan, ditunjukkan dengan rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR) yang menurun dari 136,99% pada triwulan yang sama tahun lalu menjadi 133,04%. Namun demikian rasio ini jauh lebih tinggi dibandingkan LDR bank umum yang mencapai 96,08. Penurunan ini disebabkan oleh pertumbuhan DPK yang lebih besar dibandingkan pertumbuhan kredit.

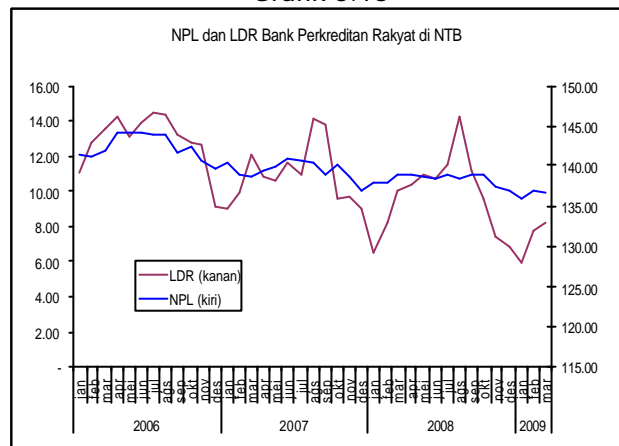
Kualitas kredit yang disalurkan oleh BPR pada triwulan laporan masih tetap pada kisaran yang tinggi yaitu 9,88%, namun kondisi ini lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 11,03%.

Grafik 3.17



Sumber : KBI Mataram

Grafik 3.18



Sumber : KBI Mataram

## **Boks 5**

### **Perkembangan Pola Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK) di Nusa Tenggara Barat**

Pola Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat atau disingkat PHBK adalah program yang bertujuan untuk menghubungkan antara perbankan dengan kelompok pengusaha mikro yang usahanya dipandang layak namun belum *bankable*. PHBK pertama kali dikenalkan dalam bentuk *pilot project* di 2 provinsi yakni Provinsi Sumatra Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1989-1993. Setelah *pilot project* ini dipandang berhasil yakni terjalin hubungan antara perbankan dengan kelompok pengusaha mikro maka dilakukan penyebarluasan program yang mencakup wilayah Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan dan Sulawesi mulai tahun 1993-2003.

Tabel 1. Transaksi Keuangan antara Bank dengan KSM  
Posisi Bulan Maret 2009

No.	Nama BPR	Jumlah Kelompok	Plafon (Rp)	Baki Debet (Rp)	Kolektibilitas			
					1	2	3	4
1	Dalam Alas	6	46,500	22,299				6
2	Labuhan Sumbawa	2	60,000	28,318	2			
3	Bima Abdi Swadaya	5	26,000	16,485	5			
4	Montabaru	1	13,000	3,310			1	
5	Bajo	48	144,000	120,000			48	
6	Tente	12	142,916	61,765	3			9
7	Kayangan	1	17,000	294				1
8	Gerung	18	156,000	43,719	1		17	
9	Perampuan	5	475,000	18,237	2			3
10	Sowan Utama	2	265,000	2,852	1			1
11	Tulen Amanah	2	65,000	1,685	1	1		
12	Ampenan Utara	12	120,000	3,448	12			
13	Janapria	22	995,000	62,785	19	1		2
14	Aikmel	4	23,000	6,610				4
15	Belo	15	105,000	45,000				15
16	Mujur	25	1,876,400	1,492,649	12			13
17	Moyo	6	81,000	41,024	1			5
18	Segara Anak	4	34,000	19,499	3			1
19	Lembuak	17	1,261,000	40,898	8			9
	<b>Jumlah</b>	<b>207</b>	<b>3,150,916</b>	<b>2,064,555</b>	<b>70</b>	<b>2</b>	<b>66</b>	<b>69</b>

Sumber : Laporan Bank Perkreditan Rakyat

Sejak tahun 2007, PHBK di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami penurunan kinerja, hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kredit bermasalah yang dialami oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) peserta PHBK. Akibatnya pada tahun berikutnya (2008 hingga sekarang) sebagian BPR tidak menyalurkan lagi kredit secara kelompok. Pada tahun 2003 terdapat 42 BPR peserta PHBK yang kemudian menurun pada tahun 2009 menjadi 19 BPR.

Pada tabel 1 diketahui terdapat 19 BPR di NTB yang masih menyalurkan kredit kepada 207 kelompok dengan nilai plafon (realisasi) sebesar Rp3,15 miliar dan baki debit sebesar Rp2,06 miliar pada Maret 2009. Dari 207 kelompok terdapat 70 kelompok (33,8%) kolektibilitas kreditnya dalam kondisi lancar sedangkan 137 kelompok (66,2%) dalam kondisi bermasalah. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit secara kelompok yang dilakukan oleh BPR dapat dipastikan mengalami gagal bayar. Kondisi gagal bayar tersebut menimbulkan akibat terhadap semakin besar penyisihan penghapusan aktiva produktif yang wajib dilakukan berdampak pada semakin besar biaya yang harus ditanggung oleh BPR.

Banyak faktor penyebab yang mendasari kegagalan penyaluran kredit kelompok, secara umum dapat dikelompokkan kedalam faktor internal dan eksternal BPR. Faktor internal adalah penyaluran kredit kurang memenuhi prinsip kehati-hatian misalnya kredit tanpa agunan, sedangkan faktor eksternal antara lain disebabkan karena debitur mengalami kegagalan usaha, karakter debitur buruk, penyimpangan keuangan kelompok oleh ketua atau anggota.

Hal-hal tersebut mendasari Bank Indonesia untuk mempertimbangkan kembali penyaluran kredit secara kelompok. Apabila dilakukan analisa SWOT maka dapat diuraikan sebagai berikut :

a. *Strength*

- Mempercepat peningkatan plafon kredit daripada menyalurkan kredit secara perorangan/individu.
- Mempercepat peningkatan individu yang akan memperoleh kredit.

b. *Weakness*

- Mempertinggi risiko kredit apabila terjadi gagal bayar apabila tidak didukung oleh penyertaan agunan kredit.
- Memerlukan pembinaan yang intensif, sedangkan kapasitas personil BPR untuk melakukan pembinaan sangat terbatas baik dari kapasitas jumlah personil BPR maupun waktu yang diperlukan untuk melakukan pembinaan tersebut.

c. *Opportunity*

Banyak kelompok-kelompok pengusaha mikro yang terdapat di Nusa Tenggara Barat, baik kelompok formal (Kelompok-kelompok tani) maupun kelompok informal (kelompok PKK, kelompok keagamaan, paguyuban, dan lain-lain).

d. *Threat*

Adanya konflik antar ketua dengan anggota kelompok yang berisiko terhadap keseriusan pelunasan kredit.

Untuk meminimalisir hal tersebut maka BPR perlu memperkecil kelemahan dan mengurangi ancaman antara lain dengan menerapkan persyaratan agunan dan melakukan seleksi ketat terhadap kelompok yang akan memperoleh kredit.

Pemaparan hasil riset dari Pusat Pendidikan dan Studi Kebansentralan (PPSK) Bank Indonesia yang telah melakukan survei terhadap Usaha Mikro Informal (UMI) pada tahun 2008 menunjukkan bahwa :

- 1) Populasi UMI sangat besar, menyangkut sebagian besar masyarakat Indonesia
- 2) Usahnya *profitable* tetapi tidak *bankable*
- 3) Pemberian kredit kepada UMI tidak bisa diproses dengan tata cara, ukuran, dan kriteria bank umum
- 4) Kondisi UMI ter-marginal-kan oleh keadaan, padahal merupakan segmen terbesar dalam masyarakat Indonesia



Strategi yang ditawarkan oleh PPSK untuk menghubungkan UMI dengan perbankan adalah melalui kerjasama terfokus antara Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan Koperasi untuk pembiayaan Usaha Mikro Informal (UMI) dengan pendekatan kepada kelompok, yaitu:

1. Kerjasama BPD dengan Koperasi  
Koperasi yang bekerjasama dengan BPR memiliki kriteria :
  - Tingkat Kesehatan 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut Sehat
  - Sisa Hasil Usaha (SHU) meningkat 2 (dua) tahun terakhir dan posisi 1 (satu) tahun terakhir positif
  - Koperasi dengan outstanding pinjaman yang diberikan diatas Rp 1 (satu) miliar wajib diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat Wajar Tanpa Syarat
  - Rasio Modal / Total Asset : 2,5% (setelah diberikan pinjaman oleh BU)
  - Modal sendiri sesuai ketentuan yang berlaku tentang Koperasi
  - Minimal beroperasi 3 tahun berturut-turut
  - Memiliki NPF maksimum 5%
2. Koperasi menyalurkan kredit kepada UMI
  - Persyaratan pinjaman, yang meliputi plafon dan jangka waktu pinjaman, suku bunga pinjaman, agunan, penjaminan dan jadwal angsuran. Proses pinjaman yang dilakukan dengan tahapan pembentukan kelompok, pengajuan permohonan, persetujuan, pencairan dan pengembalian angsuran.
  - Adanya Pola penjaminan. Pola penjaminan yang dapat diterapkan dalam bentuk adanya Simpanan Anggota, Tanggung Renteng dan penjaminan kredit oleh Lembaga Penjaminan Kredit Daerah (LPKD), Lembaga Penjaminan Kredit kepada Koperasi.
3. Adanya Pengawasan Pinjaman
  - Pengawasan pinjaman dilakukan oleh BPD (eligibilitas debitur, persyaratan pinjaman, penggunaan dan pengembalian pinjaman)
  - Pengawasan pinjaman dilakukan oleh Koperasi (penggunaan pinjaman dan pengembalian pinjaman)
4. Pengawasan dan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dan Dinas Koperasi dan UMKM
  - Pengelolaan data dan informasi mengenai koperasi yang ikut dalam pembiayaan UMI terfokus.
  - Peningkatan kinerja dan tingkat kesehatan koperasi.
  - Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.
  - Keberlangsungan pola kerjasama UMI terfokus.
  - Pelatihan kepada pengurus koperasi.
  - Pembinaan dalam rangka pemberdayaan koperasi

# BAB 4 PERKEMBANGAN SISTEM PEMBAYARAN

Mekanisme sistem pembayaran di NTB pada triwulan I-2009 terlaksana dengan baik dan normal. Dalam transaksi tunai, Bank Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan uang kartal dalam jumlah dan pecahan yang cukup serta layak edar. Pada transaksi pembayaran non tunai, Bank Indonesia secara terus menerus melakukan penyempurnaan Sistem Kliring Nasional (SKN) dan *Real Time Gross Settlement (RTGS)*.

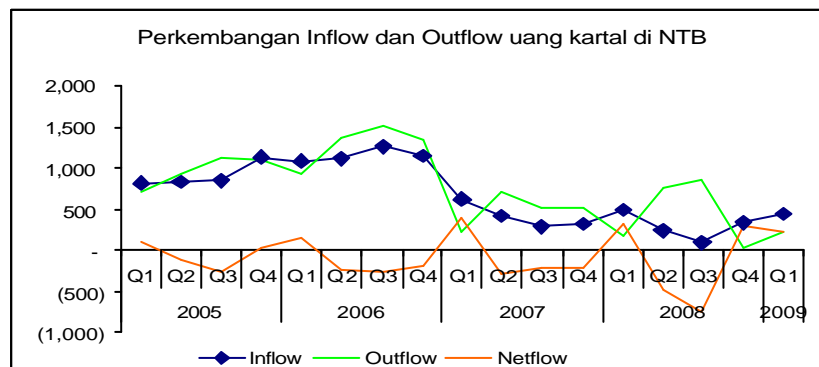
Perkembangan sistem pembayaran di NTB pada triwulan I-2009 secara umum mengalami peningkatan dibandingkan triwulan IV-2008 baik transaksi tunai maupun non tunai.

## 4.1. Transaksi Keuangan Secara Tunai

Pada triwulan I-2009 transaksi tunai (qtq) meningkat, baik *inflow* maupun *outflow*. Aliran uang masuk/*inflow* yang lebih besar dibandingkan aliran uang keluar/*outflow* pada triwulan ini menyebabkan *net inflow* sebesar Rp226 miliar. Pada triwulan I-2009 kas *inflow* Bank Indonesia tercatat sebesar Rp444 miliar meningkat sebesar 33,33% dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar Rp333 miliar. Sedangkan jumlah uang keluar/*outflow* meningkat sebesar 461,54% yaitu dari Rp39 miliar pada triwulan IV-2008 menjadi Rp218 miliar pada triwulan laporan.

Selama empat periode, kecenderungan kas KBI Mataram dalam posisi *net-inflow* untuk setiap triwulan I tahun berjalan dan puncaknya terjadi pada triwulan I-2007 yang mencapai Rp403 miliar. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor musiman, dimana triwulan I merupakan periode pasca lebaran dan tahun baru sehingga masyarakat cenderung menaruh kembali uang ke perbankan, selain itu adanya kebijakan Bank Indonesia yang memberikan kelonggaran/diskresi kepada bank-bank untuk menyetorkan uang layak edar pasca lebaran dan tahun baru serta kegiatan menjelang musim tanam tembakau dimana para pengusaha tembakau menempatkan dananya untuk membantu petani plasma, juga turut mempengaruhi aliran dana ke perbankan.

Grafik 4.1.

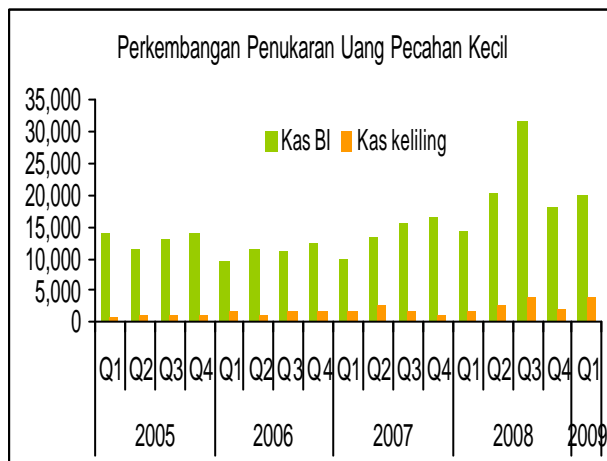


Sumber : KBI Mataram

**4.2. Perkembangan Penukaran Uang Pecahan Kecil**

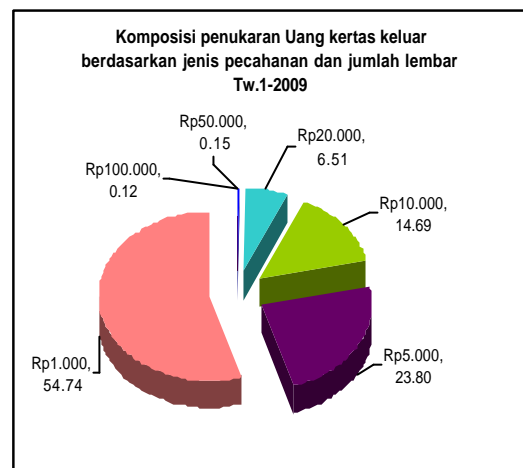
**Kebutuhan uang pecahan kecil masyarakat di NTB pada triwulan I-2009 mengalami peningkatan disebabkan oleh transaksi perdagangan di NTB berkaitan dengan hasil bumi di bidang pertanian.** Jumlah nominal yang ditukarkan masyarakat NTB baik melalui kas keliling maupun langsung ke KBI Mataram mencapai Rp23,57 miliar atau meningkat sebesar 17,94% bila dibandingkan triwulan IV-2008 yang mencapai Rp19,99 miliar. Secara keseluruhan, penukaran keluar pecahan mata uang kertas rupiah yang paling diminati masyarakat adalah pecahan Rp1.000 sebanyak 2.295.478 lembar, diikuti oleh pecahan Rp5.000 sebanyak 997.914 lembar dan pecahan Rp10.000 sebanyak 616.008 lembar.

Grafik 4.2.



Sumber : KBI Mataram

Grafik 4.3



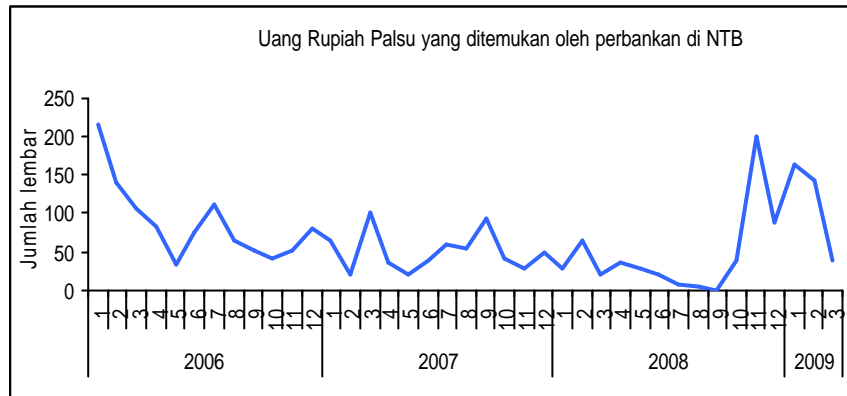
Sumber : KBI Mataram

**4.3. Penemuan Uang Palsu di NTB**

**Jumlah uang rupiah palsu yang dilaporkan oleh perbankan dan masyarakat kepada KBI Mataram selama triwulan I-2009 terjadi peningkatan.** Jumlah uang palsu pada triwulan ini tercatat sebanyak 344 lembar, meningkat sebesar 4,88% dibandingkan triwulan IV-2008 dengan jumlah 328 lembar. Jika dibandingkan dengan triwulan I-2008, jumlah uang palsu yang dilaporkan sebanyak 113 lembar. Sehingga secara tahunan telah terjadi peningkatan jumlah lembar uang palsu yang ditemukan di triwulan I-2009 sebanyak 204,42% (yoy). Peningkatan jumlah uang palsu tersebut diduga terkait dengan kegiatan kampanye politik yang semakin intensif menjelang pemilihan legislatif. Namun, apabila dilihat selama tiga tahun terakhir, uang palsu yang dilaporkan oleh masyarakat dan perbankan di NTB terjadi penurunan baik dalam segi jumlah lembar maupun nominalnya. Hal tersebut sejalan dengan semakin gencarnya Bank Indonesia mensosialisasikan ciri-ciri keaslian uang rupiah baik

melalui media elektronik maupun secara langsung ke masyarakat. Namun demikian, jumlah uang palsu tersebut masih relatif kecil bila dibandingkan aliran uang kartal yang keluar dari perkasan KBI Mataram yang mencapai Rp2.02 triliun.

Grafik 4.4



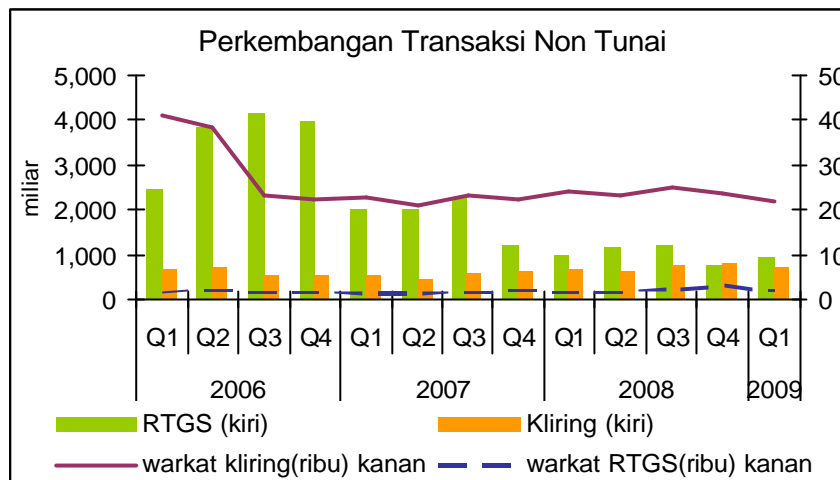
Sumber : KBI Mataram

#### 4.4. Transaksi Pembayaran Secara Non Tunai

Penyelesaian transaksi non tunai dengan menggunakan sarana RTGS meningkat pada triwulan laporan sedangkan transaksi melalui kliring menurun dibandingkan triwulan IV-2008. Transaksi kliring dan RTGS telah mencapai angka Rp1,69 triliun, yang terus didorong untuk mengoptimalkan penggunaan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) yang lebih dikenal dengan istilah *less cash society* (LCS).

Transaksi keuangan secara non tunai dari sisi jumlah transaksi masih didominasi oleh sistem kliring. Selama triwulan I-2009 penyelesaian transaksi RTGS mencapai Rp960 milyar dengan jumlah transaksi sebanyak 1.989 lembar, secara nominal terjadi peningkatan sebesar 24,51% dibandingkan triwulan IV-2008 yang tercatat sebesar Rp771 miliar namun jumlah transaksi menurun sebanyak 1.302 lembar dari 3.291 lembar. Sementara itu, transaksi melalui kliring di Kantor Bank Indonesia Mataram pada triwulan laporan menurun sebesar 11,23% yaitu dari Rp819 milyar dengan jumlah transaksi sebanyak 23,844 lembar pada triwulan sebelumnya menjadi Rp727 milyar dengan jumlah transaksi sebanyak 22.016 lembar.

Grafik 4.5.

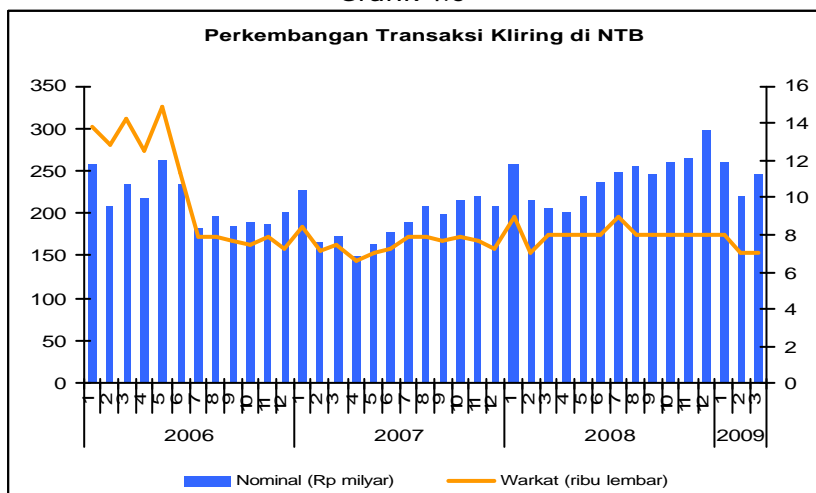


Sumber : KBI Mataram

a. Transaksi Kliring

**Penyelesaian transaksi non tunai dengan menggunakan sarana kliring pada triwulan I-2009 menunjukkan penurunan dibandingkan triwulan sebelumnya.** Jumlah transaksi kliring tercatat sebesar Rp727 milyar menurun 12,65% (qtq) dibandingkan dengan jumlah transaksi kliring pada triwulan IV-2008. Dilihat dari volumenya, jumlah warkat yang diproses pada triwulan laporan tercatat sebanyak 22,02 ribu lembar menurun 7,67% (qtq). Penurunan nilai transaksi dan volume tersebut terkait dengan belum terealisasinya pembayaran proyek-proyek pemerintah meskipun APBD telah disetujui namun realisasinya masih sangat kecil yaitu pada kisaran 10%. Hal ini salah satunya tercermin dari relatif kecilnya pembayaran SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kota Mataram.

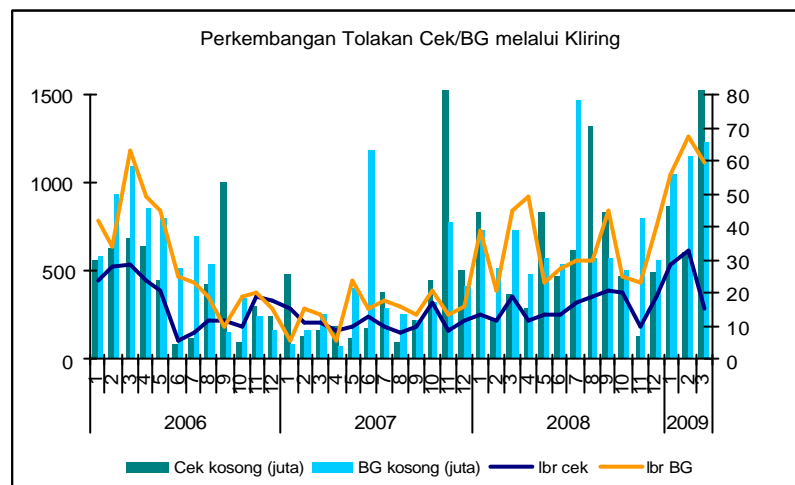
Grafik 4.6



Sumber : KBI Mataram

Selama triwulan I-2009 Cek/BG kliring yang ditolak karena saldo tidak cukup, baik dari sisi jumlah warkat maupun nilai transaksi relatif kecil. Persentase jumlah nominal dan volume cek dan BG yang ditolak karena saldo tidak cukup periode laporan masing-masing sebesar 0,67% dan 0,47%, dengan nominal sebesar Rp8,31 miliar dan jumlah warkat sebanyak 259 lembar. Jumlah tolakan Cek/BG tersebut mengalami peningkatan sebesar 182,89% dengan nominal Rp2,94 miliar pada triwulan IV-2008. Hal tersebut terjadi karena adanya kebijakan Bank Indonesia yang memberikan kelonggaran waktu selama 7 (tujuh) hari untuk memenuhi kecukupan saldo rekening nasabah.

Grafik 4.7



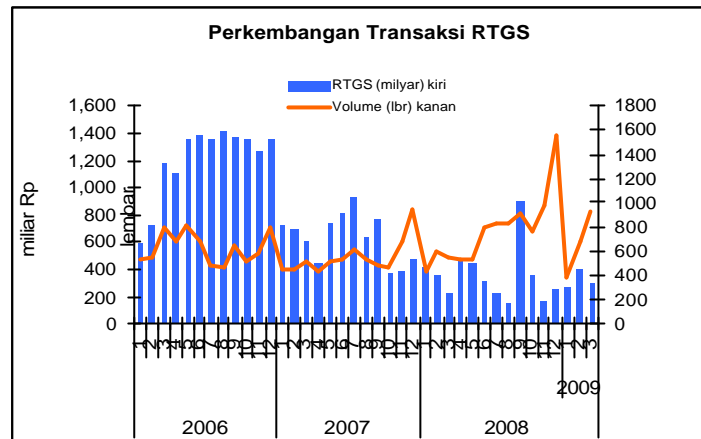
Sumber : KBI Mataram

#### b. Transaksi RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

Nominal transaksi melalui RTGS di NTB mengalami peningkatan secara qtq, namun secara yoy menurun. Meskipun transaksi melalui RTGS memiliki keunggulan dalam kecepatan dan ketepatan dalam penyelesaian transaksi dan risiko settlementnya dapat diperkecil, namun demikian seiring dengan makin berkembangnya instrumen transaksi antar bank seperti APMK, western union, internet banking turut berpengaruh pada transaksi RTGS. Pada periode laporan, baik transaksi masuk (*incoming*) maupun transaksi keluar (*outgoing*) melalui RTGS menunjukkan peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara total, transaksi melalui RTGS terjadi peningkatan sebesar 24,51% dari Rp771 milyar pada triwulan IV-2008 menjadi Rp960 milyar pada triwulan laporan.

Dari sisi volume, terdapat penurunan RTGS pada triwulan I-2009. Jumlah transaksi RTGS tercatat sebanyak 1.989 transaksi, menurun 39,56% dibanding triwulan IV-2008 yaitu sebesar 3.291 transaksi.

Grafik 4.8



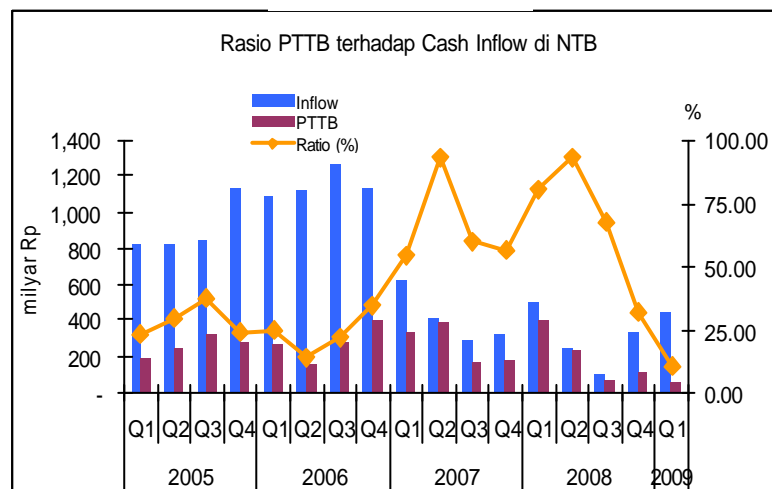
Sumber : KBI Mataram

#### 4.5. Penyediaan Uang Kartal Layak Edar

Kebijakan Bank Indonesia terkait dengan transaksi pembayaran secara tunai bertujuan untuk senantiasa memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jumlah nominal yang cukup menurut jenis pecahan dan dalam kondisi layak edar (*fit for circulation*). Pada triwulan I-2009, jumlah Pemberian Tanda Tidak Berharga (PTTB) di KBI Mataram tercatat sebesar Rp44,74 miliar, mengalami penurunan sebesar 57,41% dibandingkan triwulan IV-2008. Hal ini mengindikasikan, uang yang masuk ke Bank Indonesia sebagian besar masih layak edar dan selanjutnya akan diedarkan kembali ke perbankan.

Sementara itu, rasio PTTB terhadap *cash inflow* Kantor Bank Indonesia Mataram pada triwulan laporan sebesar 10,18%.

Grafik 4.9



Sumber : KBI Mataram

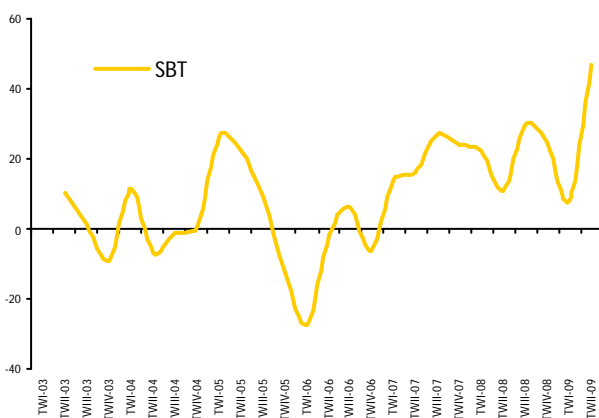
# BAB 5 PROSPEK EKONOMI DAN HARGA

## 5.1 PROSPEK EKONOMI NUSA TENGGARA BARAT

**Ekonomi Nusa Tenggara Barat diproyeksikan tumbuh pada kisaran 4-5% di triwulan II-2009.** Prediksi tersebut mengindikasikan kinerja yang lebih baik dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya (0,35%). Peningkatan kegiatan konsumsi dan ekspor Nusa Tenggara Barat menjadi pendorong pertumbuhan pada triwulan II-2009. Realisasi kenaikan gaji PNS serta penyaluran BLT tahap final di wilayah Nusa Tenggara Barat menjadi faktor penunjang tingginya kegiatan konsumsi rumah tangga pada triwulan mendatang. Sementara peningkatan kegiatan konsumsi pemerintah didukung oleh realisasi belanja modal yang diperkirakan lebih baik dibandingkan triwulan pertama tahun 2009. Sementara pulihnya kegiatan ekspor Nusa Tenggara Barat yang didominasi komoditas konsentrat tembaga turut dipengaruhi kecenderungan membaiknya harga komoditas di pasar dunia.

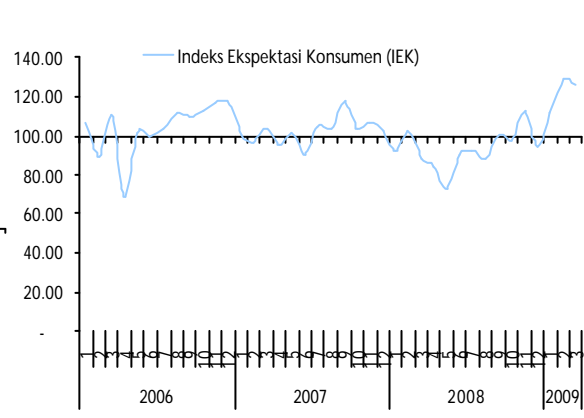
**Bila dianalisa berdasarkan sektor ekonomi, kinerja pertumbuhan pada triwulan II-2009 masih bersumber dari tiga sektor ekonomi andalan Nusa Tenggara Barat.** Sektor pertanian yang didominasi sub sektor tanaman bahan makanan diproyeksikan tumbuh lebih baik dibandingkan triwulan pertama tahun 2009 seiring tibanya musim panen raya padi pada periode April-Mei 2009. Selanjutnya, dengan asumsi tidak ada kendala pada kegiatan panen tersebut, sektor PHR diperkirakan mampu tumbuh positif dipengaruhi kegiatan perdagangan besar komoditas pertanian. Sementara itu, kegiatan produksi konsentrat tembaga yang mulai pulih di tahun 2009 untuk memenuhi *carry forward* kontrak penjualan di tahun lalu menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan di sektor pertambangan.

Grafik 5.1  
Perkiraan Realisasi Usaha



Sumber: BI

Grafik 5.2  
Ekspektasi Ekonomi Konsumen



Sumber: BI

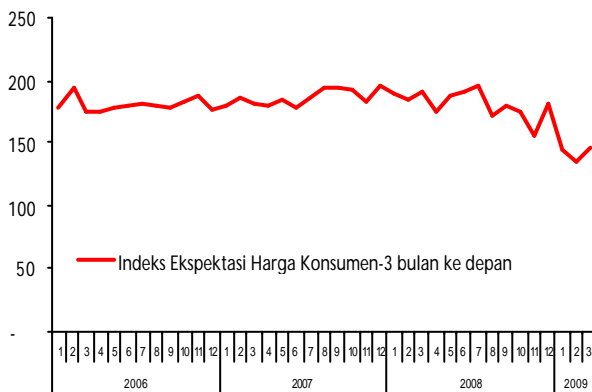


**5.2 PERKIRAAN INFLASI NUSA TENGGARA BARAT**

Menurunnya tekanan inflasi dari sisi penawaran diperkirakan mampu menekan laju inflasi agregat Nusa Tenggara Barat pada kisaran 8-9% di triwulan II-2009. Pada triwulan mendatang, laju inflasi di Kota Bima diprediksi masih di atas laju inflasi di Kota Mataram. Tekanan inflasi dari kelompok bahan makanan yang mendominasi inflasi kedua kota tersebut pada triwulan pertama tahun 2009 diperkirakan akan menurun seiring dimulainya kegiatan panen raya padi di bulan April 2009 untuk wilayah Pulau Lombok dan bulan Mei 2009 untuk wilayah Pulau Sumbawa. Sementara itu, kecenderungan penguatan nilai tukar rupiah sepanjang triwulan II-2009 membuka peluang penurunan tekanan *imported inflation* dari kelompok inflasi inti utamanya komoditas emas perhiasan yang cenderung *inflatoire* pada triwulan berjalan.

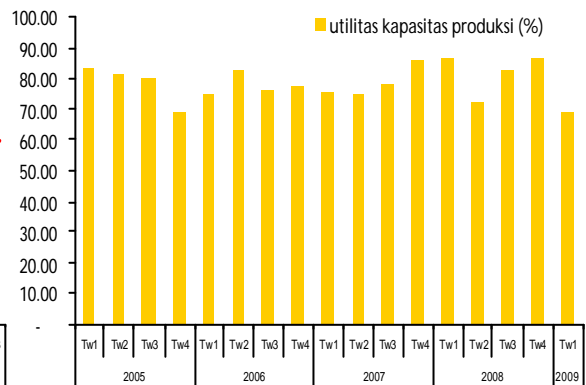
**Potensi tekanan inflasi yang patut diwaspadai yakni dari sisi permintaan.** Kegiatan konsumsi yang diperkirakan mengalami kenaikan pada triwulan II-2009 berpotensi menimbulkan tekanan *demand pull inflation* sepanjang triwulan tersebut. Peningkatan kegiatan konsumsi pada triwulan kedua tersebut dipengaruhi peningkatan daya beli dari kenaikan gaji PNS yang rencananya direalisasikan pada April 2009. Selain itu, tibanya musim ajaran baru juga akan mendorong konsumsi untuk perlengkapan sekolah. Menyikapi hal tersebut, antisipasi dari sisi fiskal di daerah berupa kegiatan operasi pasar komoditas bersubsidi serta program subsidi untuk pendidikan secara berkelanjutan diharapkan mampu mengatasi potensi fluktuasi harga.

Grafik 5.3  
Ekspektasi Harga Konsumen



Sumber: BI

Grafik 5.4  
Utilisasi Kapasitas Produksi



Sumber: BI

**5.3 PROSPEK PERBANKAN NUSA TENGGARA BARAT**

Kebijakan penurunan suku bunga acuan BI rate hingga akhir Maret 2009 diprediksi mampu mendorong penyaluran kredit di triwulan II-2009. Penurunan BI rate dari level 8,75% di awal 2009 menjadi 7,50% per Maret 2009

diperkirakan akan diikuti penurunan suku bunga perbankan pada triwulan mendatang. Dengan demikian, kebutuhan pembiayaan pelaku ekonomi pada periode mendatang dapat didukung oleh penyaluran kredit perbankan dengan suku bunga yang lebih ringan dibandingkan tahun sebelumnya.

**Pertumbuhan penyaluran kredit sepanjang tahun 2009 diperkirakan masih cukup tinggi mampu mencapai 24,79% walaupun masih di bawah kinerja tahun sebelumnya sebesar 25,67%.** Di tengah pengaruh tekanan eksternal dari krisis ekonomi global, perbankan di Nusa Tenggara Barat masih mampu menjalankan fungsi intermediasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun 2009. Penyaluran kredit untuk kegiatan produktif, seperti periode-periode sebelumnya, utamanya akan ditujukan untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sedangkan penyaluran kredit untuk kegiatan konsumtif, yang relatif berisiko rendah, diperkirakan masih memiliki pangsa di atas separuh total kredit perbankan.